



DOKUMEN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM-DESA)

TAHUN 2019 - 2024



DESA LORULUN
KECAMATAN WER TAMRIAN
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR



KEPALA DESA LORULUN
KECAMATAN WER TAMRIAN
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

PERATURAN DESA LORULUN
NOMOR: 01 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Des)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LORULUN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka RPJM-Des perlu dibuat Peraturan Desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunanDesa
- b. bahwa untuk menetapkan RPJM-Des sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan adanya peraturan Desa
- c. bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi peraturan tersebut diperlukan keputusan Kepala Desa
- d. bahwa dalam menjalankan kebijakan tertentu, diperlukan rekomendasi dan petunjuk teknis.

- Mengingat:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan masyarakat
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014, tentang Pedoman Teknins Peraturan di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Teringgal, dan Transmigrasi No. 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Teringgal, dan Transmigrasi No. 2 tahun 2015 tentang Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Teringgal, dan Transmigrasi No. 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Teringgal, dan Transmigrasi No. 21 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2016
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 tahun 2014 tentang Desa
14. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Hukum Adat dalam Wilayah Provinsi Maluku
15. Peraturan Desa LORULUN Nomor 01 Tahun 2019, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LORULUN
dan
KEPALA DESA LORULUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Des)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- (1). Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa LORULUN dan BPD.
- (2). Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa.
- (3). Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD
- (4). Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (5). Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM-Des adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
- (6). Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Des yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
- (7). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPM/LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
- (8). Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk

menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.

- (9). Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Desa.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-Des

Pasal 2

- (1). Rencana RPJM-Des dapat diajukan oleh pemerintahan Desa
- (2). Dalam menyusun rancangan RPJM-Des, pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPM/LKMD
- (3). Rancangan RPJM-Des yang berasal dari pemerintahan negeri disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPM/LKMD, LK, PKK, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya
- (4). Setelah menerimarancangan RPJM-Des, pemerintahan Desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang perencanaan pembangunan Desa
- (5). Jika rancangan RPJM-Des berasal dari pemerintahan Desa, maka pemerintahan Desa mengundang LPM/LKMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang-Desa membahas RPJM-Des
- (6). Setelah dilakukan Musrenbang-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka pemerintahan Desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan pemerintah Desa serta LPM/LKMD dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RPJM-Des menjadi RPJM-Des yang dituangkan dalam Peraturan Desa, dan
- (7). Setelah mendapat persetujuan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka kepala Desa menetapkan RPJM-Desa, serta memerintahkan sekretaris Desa atau Kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran Desa.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 3

- (1). Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikordinir oleh LPM/LKMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa
- (2). Mekanis mepengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan Desa ini akan diatur oleh Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa LORULUN

Ditetapkan di LORULUN
Pada tanggal, 20 Mei 2019

KEPALA DESA LORULUN

YOHANES BWARLELING

Diundangkan di LORULUN
Pada tanggal, 20 Juni 2019
SEKRETARIS DESA LORULUN,

MOSES SAMPONU

LEMBARAN DESA LORULUN TAHUN 2019 NOMOR 01

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa setelah melalui proses penggalian gagasan di setiap kelompok sampai dengan musyawarah desa dalam rangka Menggagas Masa Depan Desa, tim penyusun yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, LPM, Wakil Masyarakat, anggota BPD dan Perangkat Desa LORULUN telah berhasil membahas dan menyepakati Dokumen RPJMDes.

RPJMDes adalah bagian dari perencanaan seluruh warga masyarakat Desa LORULUN yang menginginkan masa depan desa yang lebih baik di segala bidang. Mimpi desa akan menjadi kenyataan ketika dimulai dengan perencanaan yang matang dan disertai kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya.

Dokumen ini dalam penyusunannya telah melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak orang dan merupakan pengalaman pertama bagi masyarakat dalam menyusun mimpi-mimpi desa dalam bentuk dokumen perencanaan desa.

Meskipun banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen RPJMDes tetapi dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat karena disusun dengan prinsip lengkap, cermat, sistematis, partisipatif dan terbuka.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Tim Penyusun dalam proses penyusunan RPJMDes ini sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Harapan kami semoga Dokumen ini bisa menjadi landasan pijak dalam melaksanakan proses Pembangunan di Desa LORULUN Kecamatan WER TAMRIAN Kabupaten KEPULAUAN TANIMBAR dan semoga seluruh Rencana Pembangunan yang tersusun dalam dokumen RPJMDes ini bisa terealisasi sesuai dengan yang di cita-citakan masyarakat Desa LORULUN.

LORULUN, JUNI 2019

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Peraturan Desa Tentang RPJM-Desa	i
Kata Pengantar	vii
Daftar isi	viii
Daftar Lampiran	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Pengertian.....	3
1.4. Maksud dan Tujuan	8
1.5. Maksud dan Tujuan	8
BAB II : KEADAAN UMUM KONDISI DESA	
2.1. Sejarah Desa	10
2.2. Kondisi Desa Secara Umum.....	11
2.3. Kondisi Pemerintahan Desa.....	16
2.4. Potensi dan Masalah Mendasar.....	20
BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPJMDes..... 26	
BAB IV : VISI, MISI ARAH KEBIJAKAN DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN	
4.1. Visi	28
4.2. Misi.....	28
4.3. Arah Kebijakan Pembangunan	28
4.4. Kegiatan Pembangunan Desa	32
BAB V : PENUTUP..... 60	

DAFTAR LAMPIRAN

NO	NAMA LAMPIRAN
1	Daftar rencana Program
2	Daftar Sumber Daya Alam
3	Daftar Sumber Daya Manusia
4	Daftar Sumber Daya Pembangunan
5	Daftar Sumber Daya Sosbud
6	Kajian Potensi dan Masalah dari Peta Desa
7	Kajian Potensi dan Masalah dari Kalender Musim
8	Kajian Potensi dan Masalah dari Badan Kelembagaan Desa
9	Kajian Pengelompokan Masalah
10	Kajian berdasarkan Menentu Peringkat Masalah
11	Kajian Berdasarkan Tindakan Pemecah Masalah
12	Penentu Peringkat Tindakan Pemeca Masalah
13	Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015 – 2021
14	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2015 - 2021
15	Keputusan Kepala Desa Tantang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Dokumen RPJM-Desa
16	Keputusan BPD Tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa Mengenai Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-Desa) tahun 2015 – 2021
17	Berita Acara Musyawar Desa, Pembahasan BPD Tentang Perubahan Penyusunan RPJM-Desa 2015 – 2021
18	Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrebangdes) Tentang Penyusunan RPJMDesa 2015 – 2021



AB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, di Kabupaten Maluku Barat Daya dimana bahwa Desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan / atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka setiap Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di Desa, maka Desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ataupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).



RPJM Desa LORULUN ini merupakan rencana strategis Desa LORULUN untuk mencapai tujuan dan cita-cita Desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan diseleraskan dengan perencanaan tingkat Kabupaten. Semangat ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada Desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Government*) seperti patisipasif, transparan dan akuntabilitas.

1.2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang Lokal Berskala Desa
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kepulauan Tanimbar Tahun 2007-2017;
12. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2012-2021 ;
13. Peraturan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Pedoman Keuangan Desa;
14. Peraturan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

1.3. PENGERTIAN

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat (APB-Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
2. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang



termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

3. Potensi Desa adalah kekuatan atau sumber daya yang dimiliki oleh desa untuk mendukung peningkatan kesejahteraan desa. Sumber daya desa yang dimaksud meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya kelembagaan dan sumber daya prasarana dan sarana.
4. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan inisiatif kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
5. Gotong royong adalah bentuk kerja sama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga Desa / kelurahan dan atau antara warga Desa / kelurahan dengan Pemerintahan desa / kelurahan untuk memenuhi kebutuhan Desa / kelurahan yang sifatnya tetap maupun insidental berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik material maupun spiritual.
6. Desa, atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa. adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi pemerintahan desa sebagai unsur peyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Dusun yang selanjutnya disebut Kadus dan atau disebut Perangkat Desa bertugas membantu kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
10. Rukun Tetangga disebut Rukun Tetangga (RT) adalah organisasi masyarakat yang di akui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong royong dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah, Pembangunan dan dan kemsyarakatan didesa.
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disebut LPM merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai wadah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan di Desa atau Kelurahan.
12. Batas Desa adalah batas yang dinyatakan dalam bentuk Peta Desa yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
13. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
14. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
15. Adat-istiadat adalah kebiasaan turun temurun yang dilakukan berulang-ulang yang telah menjadi tradisi atau ciri khas dari sutau atau dengan



pengertian lain : Adat-istiadat adalah seperangkat nilai atau norma kaedah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa dan atau satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lainnya yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola kelakuan yang merupakan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat.

16. Hak Adat adalah hak untuk hidup didalam memanfaatkan sumberdaya yang ada dalam lingkungan hidup warga masyarakat, yang berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam msasyarakat atau persekutuan hokum adat tertentu.
17. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang maha esa dan merupakan Anugrah- Nya yang wajib dihormati dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara hokum, Pemerintah, dan Setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
18. Transmigrasi lokal adalah transmigrasi yang berasal dari penduduk setempat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Transmigrasi berkerja sama dengan Departemen Dalam Negeri / Pemerintah Daerah bersangkutan.
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut (Musrenbang Desa) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 1 (satu) tahunan.
20. Pembangunan desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata. baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses



- terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia.
21. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
 22. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
 23. Perencanaan Pembangunan Desa dimaksud adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di desa guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu desa dalam jangka waktu tertentu. Wujud Perencanaan Pembangunan Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa.
 24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat (RPJM-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
 25. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa,



rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.

26. Peraturan Desa (yang selanjutnya disingkat Perdes) adalah perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
27. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
28. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Penyusunan RPJMDesa

Maksud dilaksanakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah:

1. Menjabarkan Visi dan Misi, dan Program pemerintah Desa dalam kurun waktu enam tahun dalam melaksanakan proses pembangunan.
2. Memberikan kesempatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang dilaksanakan di Desa yang di harapkan bisa menekan terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan.



3. Sebagai rencana induk pembangunan Desa yang merupakan acuan Pembangunan Desa
4. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan
5. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari Pemerintah.
6. Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat.

b. Tujuan Penyusunan RPJMDes

Adapun tujuan di adakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah :

1. Merumuskan rencana pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat.
2. Merumuskan arah, tujuan, kebijakan dan strategi pembangunan desa
3. Menyelaraskan rencana kegiatan dengan anggaran yang ada
4. Meningkatkan peran serta masyarakat di desa dalam proses pembangunan.
5. Sebagai dasar/pedoman kegiatan Pembangunan Desa Lorulun.
6. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan Desa, strategi pembangunan Desa, sasaran-sasaran setrategis yang ingin dicapai selama enam tahun ke depan.
7. Memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan Desa selama enam tahun ke depan.
8. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program Desa yang akan dibiayai oleh APBDes, APBD Kabupaten, APBD Propinsi serta APBN.
9. Sebagai bahan evaluasi serta refleksi pembangunan yang akan datang.



10. Sebagai media informasi dan juga pengukuran kinerja pemerintah Desa terkait capaian-capaian pembangunan dalam kurun waktu enam tahun ke depan.

1.5. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

1. Penyelerasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten dan Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2017-2022 serta dokumen perencanaan lainnya, maka keselarasan kebijakan pembangunan yang menyentuh dan melintasi desa Lorulun adalah sebagai berikut:

Desa Lorulun dalam Kebijakan Pengembangan Kawasan

Dari kebijakan arah pembangunan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dapat disampaikan kebutuhan keselarasan pembangunan desa – kabupaten untuk perencanaan pembangunan desa antara lain:

1. Pengembangan Desa Lorulun sebagai salah satu sentra Produksi Perkebunan dan Hortikultura
2. Pengembangan Desa Lorulun sebagai salah satu sentra produksi pertanian.
3. Pengembangan Desa Lorulujn sebagai Destinasi Wisata Pantai.
4. Pengelolaan Kapasitas Desa Lorulun dalam Mitigasi Bencana Alam Gelombang Pasang

Desa Lorulun dalam Rencana Sistem Perkotaan sebagai pusat pengembangan wilayah dan perdesaan

Berdasarkan kelompok pusat pemukiman di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Desa Lorulun termasuk dalam sistem Kota Kecamatan yang dengan dekat Ibu kota Kabupaten sebagai pusat pemukiman tersier dimana pusat



pelayanannya di tingkat lokal atau sekitar kawasan, dengan arahan pelayanan pusat secara khusus dan bersifat lokal, mengingat desa Lorulun dekat dengan Pelabuhan Udara yang berpotensi akan terjadi perkembangan yang sangat pesat dikemudian hari baik dari segi Jasa, Ekonomi, Infrastruktur dan Sumberdaya Manusia.

Desa Lorulun dalam Rencana Pengelolaan Kawasan Perdesaan

Sesuai dengan karakteristik desa dan kawasan perdesaan yang dimiliki Desa Lorulun, maka Rencana Pengelolaan Kawasan Perdesaan yang menyentuh dan atau melintasi Desa Lorulun adalah :

1. Kawasan Perdesaan Produksi Perkebunan dan Hortikultura
2. Kawasan Desa Pesisir untuk produksi pertanian
3. Kawasan Desa dan Antar Desa untuk Destinasi Wisata Pantai
4. Kawasan Desa dan Antar Desa untuk kepentingan Mitigasi Bencana Gelombang Pasang

Sampai dengan pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa ini, dokumen Rencana Strategi maupun Rencana Kerja Satuan Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar belum diperoleh untuk memperoleh informasi rinci tentang kegiatan pembangunan sektoral yang melintasi, mempengaruhi dan diperuntukkan bagi Desa Lorulun.

Oleh karena itu, disarankan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Lorulun Tahun 2020- 2024, perlu diupayakan ketersediaan data RKPД Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, Rencana Strategi maupun Rencana Kerja SKPD Kabupaten Kepulauan Tanimbar bagi Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 - 2024.



1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Dasar Hukum
	1.3. Pengertian
	1.4. Maksud dan Tujuan
	1.5. Hubungan Antar Dokumen
	1.6. Sitematika Penulisan
BAB II	2.1. Kondisi Desa
	2.2. KondisinPemerintahan Desa
BAB III	3.1. Potensi Desa
	3.2. Masalah
BAB IV	4.1. Visi dan Misi
	4.2. Tujuan dan Sasaran
BAB V	Strategi Pembangunan Desa
BAB VI	Arah Kebijakan Pembangunan Desa
BAB VII	Kebijakan Umum
BAB VIII	Program Pembangunan Desa
BAB IX	Penutup



BAB V STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

5.1. Masalah dan Potensi Desa

Berdasarkan Laporan Pengkajian Keadaan Desa Lorulun, maka masalah dan potensi yang dimiliki di Desa Lorulun adalah sebagai berikut:

5.1.1. Peta Sosial Desa;

Potensi dan masalah dari peta sosial Desa antara lain:

No	Masalah	Potensi
1	Sebagian rumah masyarakat yang tidak layak huni	Masyarakat, Batu, Pasir dan Tenaga Kerja
2	Tidak ada tempat belajar PAUD	Ada Siswa, ada Guru, Batu, Pasir, Tenaga Kerja dan Kayu
3	Belum ada gedung Posyandu	Ada Kader, Batu, Pasir dan Tenaga Kerja
4	Belum ada Pagar Posyandu	Ada Kader, Batu, Pasir dan Tenaga Kerja
5	Belum Ada Mess Desa	Ada Kader, Batu, Pasir dan Tenaga Kerja
6	Belum Adanya Kantor Desa Yang Baru	Ada Pemdes, Timbunan Tanah Putih, batu, pasir, T.Kerja, lokasi dan kayu
7	Belum adanya wadah perekonomian desa yang dapat menyediakan akses modal usaha & pengelolaan kegiatan usaha ekonomi produktif yang layak dikembangkan didesa	Kelompok usaha, dukungan pemdes, masyarakat pemanfaat
8	Belum Ada Gudang Desa	Ada batu, Pasir, Tenaga Kerja
9	Rumah Mesin Listrik	Ada Teknisi, Batu, Pasir, tenaga Kerja
10	Balai Desa yang sudah rapuh dan rusak	Ada batu, pasir, T.Kerja, lokasi dan kayu



11	Belum adanya Jalan Rabat Beton (di sebagian jalan desa)	Batu, pasir dan Tenaga Kerja
12	Sebagian Bayi dan Balita tidak Sehat dan Kurang Gizi	POSKESDES dan Kader Posyandu
13	Ruang TK yang Tidak memadai	Batu, Pasir dan Tenaga Kerja
14	Tidak ada Rumah Guru	Kayu, Batu, Pasir dan Tenaga Kerja
		Kayu, Batu, Pasir dan Tenaga Kerja
15	Sering terjadi Abrasi Pantai	Tenaga Kerja, Batu dan Pasir
16	Ruang Perpustakaan yang sudah rusak	Tenaga Kerja, Batu dan Pasir
17	Gedung PKK Belum Ada	Kader Ada, Tenaga Kerja, Batu dan Pasir
18	Gapura Desa Belum ada	Tenaga Kerja, Batu dan Pasir
19	Gedung SD sudah rusak	Kayu, Batu, Pasir dan Tenaga Kerja
20	Gedung SD sudah rusak	Kayu, Batu, Pasir dan Tenaga Kerja
21	Belum Adanya Pagar Desa	Kayu, Batu, Pasir dan Tenaga Kerja
22	Belum Adanya Tanda Batas Desa	Kayu, Batu, Pasir dan Tenaga Kerja
23	Penerangan tidak maksimal	Ada PLN, Ada Matahari
24	Air Bersih belum maksimal	Tenaga Kerja, Batu dan Pasir
25	Saluran air yang belum maksimal	Tenaga Kerja, Batu dan Pasir
26	Tranportasi desa belum ada	Pemdes, Masyarakat
27	Sarana pembuangan sampah dan Sanitasi yang belum baik	Pemdes, Masyarakat
28	Sarana pembuangan sampah dan Sanitasi yang belum baik	Pemdes, Masyarakat
29	Belum Adanya Gudang Desa	Kayu, Batu, Pasir dan Tenaga Kerja
30	Belum Adanya Tugu Desa	Tenaga Kerja, Batu dan Pasir



31	Belum Adanya jembatan penghubung	Pemdes, Masyarakat, batu, pasir dan tenaga kerja
32	Lahan Pertanian yang selalu di tumbuhi Rumput	Jambu, Kelapa dan ..
33	Armada tangkap yang terbatas untuk nelayan	Kelompok Nelayan
34	Masyarakat ada yang masih buang air sembarangan	Tenaga Kerja, Batu dan Pasir
35	Masyarakat Belum mendapat bantuan bibit tanaman umur panjang	Ada Petani, ada Lahan dan air
36	Masyarakat Belum mendapat bantuan bibit tanaman	Ada Petani, ada Lahan
37	Belum adanya Sarana Operasional Kantor	Pemerintah Desa
38	Masyarakat Belum mendapat bantuan bibit ternak	Ada Peternak
39	Masyarakat Belum mendapat bantuan bibit ternak	Ada Peternak
40	Belum Ada rumah Jabatan Kades	Pemdes, Masyarakat, batu, pasir dan tenaga kerja
41	Belum Adanya SORGA Desa	Kelompok Olahraga, Lokasi, Pasir, Batu dan Kayu
42	Sarana dan Prasarana Perikanan belum ada	Ada Nelayan
43	Belum ada obat-obatan untuk peternakan dan pertanian	Ada petani dan peternak
44	Siswa belum mendapat bantuan	Ada siswa
45	Hasil Hutan Yang Belum Dikelola dengan baik	Ada kayu, rotan, bambu, dll
46	adanya Internet tetapi tidak maksimal	lokasi, Siswa, Pemdes, Pegawai

5.1.2. Kalender Musim;

Potensi dan masalah dari kalender musim antara lain:



No		Masalah	Potensi
1		Hasil produksi menurun	Batu, Pasir, Tenaga Kerja, dukungan Petani
2		Banyak warga terserang penyakit Malaria/diare	Poskesdes dan Pemdes
3		Terjadi genangan air pada rumah masyarakat	Ada lokasi, batu, pasir, tenaga kerja
4		Terjadi penyumbatan pada Saluran Air, sehingga air mengalir tidak normal	Ada lokasi, batu, pasir, tenaga kerja
5		Pada musim hujan terjadi pengikisan pada tebing dan Pantai	Ada lokasi, batu, pasir, tenaga kerja
6		Kebakaran Lahan	Ada petani, Ada Pemdes

5.1.3. Diagram Kelembagaan:

No	Lembaga		Masalah
1	Tempat pelayanan Posyandu tidak	-	Belum Memadainya Saprass pendukung kegiatan PEMDES
		-	PEMDES belum sepenuhnya melaksanakan Tupoksinya
		-	Rendahnya alokasi dana untuk kesejahteraan PEMDES
2	BPD	-	Belum Memadainya Saprass pendukung kegiatan BPD
		-	BPD belum sepenuhnya melaksanakan Tupoksinya



		-	Rendahnya alokasi dana untuk kesejahteraan BPD
3	Lembaga Adat tidak Maksimal	-	Kegiatan Kelompok tidak jalan karena kurang kesadaran dari anggota kelompok
		-	kurang ada dukungan modal dan bantuan alat terkungan dan alat pertanian
4	Karang Taruna tidak aktif	-	Belum Memadainya Saprass pendukung Dewan Adat
		-	Dewan Adat belum sepenuhnya melaksanakan Tupoksinya
		-	Rendahnya alokasi dana untuk kesejahteraan Dewan Adat
5	PKK tidak berperan aktif	-	Belum Memadainya Saprass pendukung kegiatan PKK
		-	PKK belum sepenuhnya melaksanakan Tupoksinya
		-	Rendahnya alokasi dana untuk kesejahteraan PKK
6	Linmas	-	Linmas belum bekerja maksimal
7	Dewan Gereja dan Pemuda Gereja	-	Pengurus belum sepenuhnya melaksanakan Tupoksinya
		-	Rendahnya alokasi dana untuk kesejahteraan Pengurus
8	Tempat pelayanan Posyandu tidak Tepat		Belum ada Posyandu Tetap
9	Karang Taruna tidak aktif		Pengurus belum sepenuhnya melaksanakan Tupoksinya
10	Kelompok Pertanian berjalan tidak maksimal		kurangnya Peningkatan Kapasitas kepada Kel.tani
			Kurangnya sarana pendukung
11	Kelompok Nelayan berjalan tidak maksimal		Bantuan tidak tepat sasaran atau tidak sesuai kebutuhan nelayan
12	PBM di SMA tidak efektif		Kurang ruang belajar (2 Ruang)
			kurangnya Guru Matpel (6 Orang)
13	Siswa kesulitan mengakses Internet (SMP dan SD)		Tidak ada Komputer di sekolah SMP dan SD



14	Kehadiran Siswa di sekolah (SMA) terlambat		Transportasi Publik (Bus) sekolah tidak ada
15	Aktifitas belajar di PAUD tidak efektif		tidak ada gedung
16	Belum adanya TK Negeri		Biaya Pendidikan di TK Yayasan Tinggi/mahal
17	Berkeliaran binatang(sapi) di sekitar lingkungan sekoalh (SMP)		Belum ada Pagar sekolah
18	Siswa SMP buang air sembarangan		MCK rusak/tidak ada
19	Perpustakaan Desa tidak berjalan dengan baik		Belum adanya Insentif bagi Pengelola Perpustakaan
20	Bumdes macet		Management dan Pengawasan kurang baik
21	LKMD macet		Pengurus belum sepenuhnya melaksanakan Tupoksinya, ada yang malas-malasan
22	Linmas berjalan tidak maksimal		Anggota tidak aktif
23	Pengurus RT berjalan tidak maksimal		Insentif tidak memadai
24	Pemerintah Desa berjalan kurang maksimal		Ada camat,Kades
25	Kelompok usaha kecil Perbenkelan berjalan kurang lancar		Tidak mendapat Pelatihan dan bantuan
26	Kelompok usaha kecil Pertukangan berjalan kurang lancar		Tidak mendapat Pelatihan dan bantuan
27	Kelompok tenun berjalan tidak maksimal		Alat tenun tidak lengkap



5.1.4. Kajian Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Diagram Kelembagaan

Dengan paparan masalah berdasarkan ketiga alat kaji P3D tersebut, maka berdasarkan jumlah masalah per bidang isu dapat disampaikan sebagai berikut:

Bidang Isu	Jumlah masalah dari Peta Sosial Desa	Jumlah masalah dari Kalender Musim	Jumlah masalah dari Diagram Kelembagaan	Total Masalah
Pendidikan	2	-	-	2
Kesehatan	1	3	1	5
Lingkungan Hidup	4	4	1	8
Ekonomi	8	5	1	14
Keamanan dan Ketertiban	1	-	2	3
Kelembagaan	2	-	21	23

a. Masalah Desa sebagai pemetaan isu prioritas

Berdasarkan data tersebut, masalah paling banyak yang disampaikan masyarakat Desa adalah berturut-turut masalah Kelembagaan (23 masalah), masalah Ekonomi (14 masalah), masalah Lingkungan Hidup (8 masalah), masalah Kesehatan (5 masalah), masalah pendidikan (2 masalah) dan masalah keamanan ketertiban sebanyak 3 masalah.

Data tersebut memberikan prioritas perencanaan Desa harus memberikan perhatian pada :

1. *prioritas pertama* untuk peningkatan peran dan kapasitas kelembagaan Desa,
2. *prioritas kedua* peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat
3. *prioritas ketiga* pada pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan,
4. *prioritas keempat* pada usaha peningkatan pelayanan kesehatan
5. *prioritas kelima* pada peningkatan mutu dan kualitas pendidikan.



5.2. Strategi Program Pembangunan Desa Lorulun

Strategi Pembangunan Desa Lorulun dirumuskan berdasarkan instrumen P3D (Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa)

Pendekatan perencanaan pembangunan ini memberi strategi pembangunan Desa Lorulun yang *partisipatif*, *transformatif* dan *pro poor* (berpihak pada pengentasan kemiskinan skala desa), sehingga memberikan modal legitimasi pembangunan yang kuat, arah perubahan Desa yang terukur serta mensejahterakan warga masyarakat Desa sesuai visi dan misi pemerintah Desa, yakni Terwujudnya Masyarakat Desa Lorulun dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih Baik.

Berdasarkan hasil pengkajian keadaan Desa, maka strategi pembangunan Desa Lorulun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Desa Lorulun mempertimbangkan arah, kebijakan dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang menetapkan Desa Lorulun sebagai salah satu bagian kawasan perdesaan dengan ciri khas sebagai salah satu sentra Produksi Perkebunan dan Hortikultura, salah satu sentra produksi pertanian.
2. Pembangunan Desa Lorulun mempertimbangkan peluang dan dampak dari rencana sistem perkotaan Kota Kecamatan Wertamrian sebagai pusat pemukiman tersier dimana pusat pelayanannya di tingkat lokal atau sekitar kawasan, dengan arahan pelayanan pusat secara khusus dan bersifat lokal, sebagai pusat pelayanan jasa, ekonomi dan pariwisata, dengan rencana hirarki skala pelayanan pada pusat perdagangan, jasa dan pemasaran, pusat perhubungan dan komunikasi pusat produksi pengolahan.
3. Pembangunan Desa Lorulun mempertimbangkan aspirasi kebutuhan masyarakat terkait peningkatan pelayanan dasar, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, peningkatan peran dan fungsi aparatur pemerintah Desa dan kelembagaan masyarakat serta peningkatan pendapatan masyarakat
4. Pembangunan Desa Lorulun mempertimbangkan optimalisasi fungsi modal sosial pada kerukunan dan kerja sama antar warga Desa, jaminan keamanan dan kesejahteraan sosial, peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan non formal masyarakat Desa, penyediaan akses pada modal usaha serta pembentukan lembaga ekonomi Desa serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.



5. Pembangunan Desa Lorulun mempertimbangkan skenario transformasi Desa Lorulun yakni : Desa Tertinggal menuju Desa Berkembang pada tahun 2018; Desa Berkembang menuju desa Maju pada Desa 2020 dan Desa Maju menuju Desa Mandiri pada tahun 2020.
6. Pembangunan Desa Lorulun mempertimbangkan strategi pengentasan kemiskinan skala desa melalui : penyediaan kemudahan akses pendidikan kejuruan dan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus; pengelolaan pendidikan tambahan, sebagai upaya pelengkap pendidikan formal baik pendidikan anak usia dini maupun pendidikan keterampilan yang mendukung akses kebutuhan masyarakat, termasuk untuk anak usia sekolah yang putus sekolah maupun yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya; penyediaan kemudahan akses layanan dan tenaga kesehatan lainnya; peningkatan peran posyandu; penyediaan askes ke lahan pertanian, perkebunan baik untuk budidaya sampai pemasaran komoditi; penyediaan kemudahan akses dan jumlah layanan angkutan umum; pengelolaan limbah cair dan sampah skala Desa dan pengelolaan air bersih skala Desa.



BAB II PROFIL DESA

2.1. Sejarah Desa

Kira-kira abad ke 12 para leluhur/moyang datang dari barat pulau Yamdena, ada yang datang melewati laut dan pulau Selaru selain itu ada juga yang melewati pesisir pulau Yamdena. Perjalanan darat dimulai dari bagian barat pulau Yamdena melewati hutan sampai ke bagian Timur Pulau Yamdena. Mereka ada 5 (Lima) Orang, yang menjadi Tokoh penting antara lain :

- Makene Alor (datang melalui darat)
 - Makene Ngribal (datang melalui laut)
 - Makene Ngengbarat (datang melalui laut)
 - Makene Daingaman (datang melalui darat)
- ✓ Makene Alor (datang melalui darat) datang dan berdiam di sebuah tempat namanya **ONDORIN** sekarang lokasi Soa Mandessy
 - ✓ Makene Ngribal (Bwarnilalay) datang dan berdiam di sebuah tempat pesisir pantai kampung lama sebelah selatan
 - ✓ Makene Ngengbarat (Buarlele) datang dan berdiam dibagian tanjung kampung lama (sebuah goa)
 - ✓ Makene Waineran (Ngilamele) datang dan berdiam di sebuah tempat namanya **Ridas** sekarang lokasi SMP
 - ✓ Makene Daingaman (Ngilamele) datang dan berdiam di sebuah tempat namanya **Dalanmatan**(Tutun)

Atas prakarsa maken Alor, Maken Ngribal, Maken Ngengbarat dan Maken Waineran maka terbentuklah sebuah kampung (sekarang disebut Desa) yaitu Desa Amtufu pada abad ke -12 atas kedepakatan bersama, maka selaku pemangku Pemerintahan Desa di tetapkam Maken Ngribal selaku Mangafwayak (Mangfarete) kemudian diberi kuasa untuk mengatur sistem



pemerintahan berupa batu-batu Adat yang ditetapkan dalam keputusan LENDAN SILAI. Sejak itulah semua leluhur/moyang yang baru datang semua bergabung di Desa AMTUFU.

Kemudian pada tahun 1930, penduduk desa bertambah banyak dibandingkan lokasi pemukiman agak sempit maka atas kesepakatan bersama dibawah pimpinan Kepala Desa Paulus Korseran Sairaman Bwarnilalai desa berpindah ke lokasi desa yakni:

- Sebagian ke sebelah Utara yang kini disebut Desa Lorulun
- Sebagian ke sebelah Selatan yang kini disebut Desa Tumbur

Untuk itu, Desa Amtufu Lorulun disebut Desa Kakak dan Desa adik Desa Amtufu Tumbur, oleh karena itu secara pemerintahan masing-masing Desa mengurus Desanya, tetapi secara adat diatur bersama di Desa kakak yaitu Lorulun. Salah satu hal juga ditetapkan bahwa antara kedua Desa tidak ada batas tanah, karena wilayah Desa adalah satu yaitu petuanan Amtufu.

Tabel 1. Sejarah Pemerintahan Desa

No	Periode	Nama	Keterangan
1	Abad 12	METLOBI ANDITYAMAN YANINRESSY	Kepala Desa Ke I
2	Abad 12	KAITAMAN NGRIBAL YANINRESSY	Kepala Desa Ke II
3	Abad 13	METLOBI ANDITYAMAN YANINRESSY	Kepala Desa Ke III
4	Abad 13	KAITAMAN NGRIBAL YANINRESSY	Kepala Desa Ke IV
5	Abad 14	METLOBI ANDITYAMAN YANINRESSY	Kepala Desa Ke V
6	Abad 14	KAITAMAN NGRIBAL YANINRESSY	Kepala Desa Ke VI
7	1500-1580	METLOBI ANDITYAMAN YANINRESSY	Kepala Desa Ke VI
8	1580-1640	AMPRAS AUKWAMAN YANINRESSY	Kepala Desa Ke VII
9	1640-1810	AMEL REWEMASA	Kepala Desa Ke VIII
10	1810-1872	AKAWAMAN METERUE YANINRESSY	Kepala Desa Ke IX
11	1872-1937	PAULUS KORSERAN SAIRAMAN YANINRESSY	Kepala Desa Ke X
12	1937-1960	GREGORIUS AKAWAMAN METERUE YANINRESSY	Kepala Desa Ke XI



13	1960-1962	ODILIA AKAWENAN METERUE YANINRESSY	Kepala Desa Ke XII
14	1962-1965	ELIAS NGILAMELE	
15	1967-1999	JOHANIS. B. MANDESSY	Kepala Desa Ke XIII
16	2001-2004	JUSTINUS LONDAR	Kepala Desa Ke XIV
17	2006-2009	THOMAS SAMPONU	Kepala Desa Ke XV
18	2010-2016	FIRMINUS TORIMTUBUN	Kepala Desa Ke XVI
19	2019-2024	YOHANIS BWARLELING	Kepala Desa Ke XVII

Sumber : Data Sejarah Desa Lorulun April 2019

2.2. Kondisi Umum Desa

2.2.1. Kondisi Geografis dan Topografi

Desa Lorulun terletak kurang lebih 22 KM dari Ibu kota Kabupaten dan kurang lebih 3 KM ke Ibu Kota Kecamatan Wer Tamrian, terletak di Pesisir Timur Pulau Yamdena berada pada posisi 131°38 LS dan 7°85 BT. Desa Lorulun sebagian besar dihuni oleh masyarakat adat yang telah lama tinggal dan menetap. Batas – batas Desa Lorulun yakni :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Atubul Da
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Tumbur
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Wermatang
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Laut Arafura

Kondisi iklim di desa Lorulun dengan suhu minimum 25,4 °C dan suhu maksimum 30°C. Rata-rata suhu udara dan kelembaban 81% tiap bulan. Rata-rata tekanan udara dan kecepatan angin 7 knot tiap bulan. Curah



hujan bulan Desember sampai dengan bulan Mei rata-rata 328,1(MM) terutama dalam bulan Desember. Januari dan April. Curah hujan juni sampai dengan Agustus rata-rata 24,6(MM) terutama dalam bulan Juni dan Juli.

Sedangkan luas wilayah Desa Lorulun mencapai \pm 214.860 Ha yang terdiri dari :

- | | | |
|-------------------------------|---|----|
| a. Lahan Pemukiman | : | Ha |
| b. Lahan perkebunan/Pertanian | : | Ha |
| c. Lahan Persawahan | : | Ha |
| d. Kawasan Perkantoran Desa | : | Ha |
| c. Kawasan Hutan Lindung | : | Ha |
| d. Lain-lain | : | Ha |

2.2.2. Demografi/Kependudukan

2.2.2.1 Jumlah Penduduk

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk Desa Lorulun tercatat 520 KK atau 1.986 jiwa, seperti tergambar pada Tabel 3 berikut :

Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jiwa

NO	Desa	JUMLAH JIWA			KEPALA KELUARGA
		L	P	TOTAL	
1	Lorulun	964	1.022	1.986	520
	JUMLAH	964	1.022	1.986	520

Sumber: Data PKD Desa Lorulun April 2019



Seperti terlihat dalam tabel diatas, tercatat jumlah total penduduk Desa Lorulun sebesar 1.986 jiwa, terdiri dari laki-laki 964 jiwa dan perempuan 1.022 jiwa. Dari hasil survei data sekunder PKD bila dibandingkan dengan data administrasi desa, kemungkinan terjadi perbedaan yang disebabkan oleh telah berpindahnya domisili sebahagian penduduk untuk mencari pekerjaan di daerah lain dan juga adanya pendatang baru yang belum teridentifikasi sebagai penduduk.

Hal ini diharapkan kepada pemerintah desa untuk memperbaiki sistem administrasinya dan melakukan cek ulang terhadap keberadaan warganya tersebut. Sampai saat ini didapatkan kesimpulan sementara bahwa terjadinya selisih tersebut dikarenakan banyaknya warga Desa Lorulun yang mencari nafkah diluar wilayah desa.

Data Penduduk Berdasarkan Umur

Komposisi Penduduk menurut Umur dan Jenis Kelamin, dapat dilihat pada Tabel di Bawah ini:

Tabel 02. Rincian Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin.

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0 – 5			148
2	6 –20			396
3	21 – 40			528
4	41 - 75			529
5	76 ke atas			138

Sumber : Monografi Desa 2019



2.2.2.2. Tingkat Pendidikan

Tabel 4. Pendidikan Berdasarkan Tingkatan

No	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (Jiwa)
1	Belum Sekolah	
2	Belum/Tidak Tamat SD, SMP dan SMA	
3	Tamat TK	3
4	Tamat SD	195
5	Tamat SMP	245
6	Tamat SLTA	449
7	Tamat Perguruan Tinggi :	
	D I, D-II, D-III, D-IV	7
	S-I	69
	S II	
JUMLAH		968

Sumber: Data PKD Desa Lorulun, Mei 2019

Berdasarkan data kualitatif pada tabel tersebut, menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Lorulun kebanyakan penduduk sudah memiliki bekal pendidikan formal, terhitung sebesar 195 jiwa atau 20,14% tamat SD, 245 jiwa atau 25,30% sudah tamat SLTP, 449 jiwa atau 46,38% tamat SLTA, dan yang sempat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi (DI, DII, DIII, DIV, SI, SII) sebanyak 7 orang atau 7 % dari total penduduk serta yang tamat sekolah di TK sebanyak 3 orang atau 3 % dari total jumlah jiwa. Hal ini menggambarkan bahwa sumber daya manusia di Desa Lorulun sudah



memiliki bekal pendidikan yang cukup walaupun masih ada penduduk yang tidak memiliki bekal pendidikan formal yang sewaktu-waktu rentan terhadap kemiskinan.

2.2.2.4 Mata Pencaharian

Secara umum mata pencaharian masyarakat Desa Lorulun teridentifikasi ke dalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti: petani, PNS/TNI/Polri, pedagang, swasta/wiraswasta, buruh bangunan, dan tukang. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6
Jumlah Kepala Keluarga Menurut Mata Pencaharian Desa Lorulun
Tahun 2019

No	Mata Pencaharian	Jumlah KK
	Belum Bekerja	18
1	Petani	39
2		
3	PNS/TNI/Polri	68
4	Nelayan	21
5	Peternak	
6	Petani	



7	Pedagang	2
8	Tukang Batu / Kayu	-
9	Swasta / Wiraswasta	53
10	Pensiunan	22
	Jumlah	223

Sumber: Data PKD Desa Lorulun, April 2019

Berdasarkan tabulasi data tersebut teridentifikasi, jumlah KK Desa Lorulun sebanyak 18 KK atau 8.07% dari total KK belum memiliki mata pencaharian/belum bekeja sebanyak 39 KK atau 17,48 % dari total KK bermata pencaharian sebagai petani, sebanyak 68 KK atau 30,39 % dari total KK bermata pencaharian sebagai PNS, sebanyak 2 KK atau 8 % dari total KK bermata pencaharian sebagai pedagang, sebanyak 21 KK atau 9,41 % dari total KK bermata pencaharian sebagai Nelayan, sebanyak 22 KK atau 9,86 % dari total KK bermata pencaharian sebagai Pensiunan, dan sisanya sebanyak 53 KK atau 23,76 % dari total KK bermata pencaharian di swasta/wiraswasta. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kehidupan masyarakat Desa Lorulun masih tergantung pada kepala keluarga yang rata-rata bekerja pada usaha bidang pertanian dan selebihnya berprofesi sebagai pedagang, karyawan swasta / wirausaha. Sementara itu, kelompok penduduk yang dapat dikategorikan sebagai usia produktif masih mencari dan atau bekerja secara temporer yang belum dapat dikategorikan sebagai pekerjaan tetap.

2.2.2.5 Aspek-aspek sosial-budaya

Prespektif Budaya Masyarakat di Desa Lorulun masih sangat kental dengan budaya **Duan-Lolat** yang artinya hidup dalam ikatan persaudaraan dimana yang lain tidak bisa menyusahkan yang lain yang



dilakukan dengan ritual sumpah darah oleh para leluhur, dan juga hidup adik dan kakak, secara turun temurun telah bermukim di Lorulun Dari latar belakang budaya, dapat dilihat aspek budaya dan sosial yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Tradisi budaya ini biasanya dilakukan oleh tua-tua adat bersama Pastor dalam bentuk persembahan lagu-lagu Adat yang dirayakan pada saat hut Kampung, Injil Masuk desa dan hari Kemerdekaan RI. Masyarakat Lorulun sebagai bagian dari masyarakat adat itu sendiri yang berkembang dan banyak dipengaruhi ritual-ritual agama atau kepercayaan masyarakat.

2.3. Kondisi Pemerintahan

2.3.1. Pembagian Wilayah Desa

Desa Lorulun sebagaimana system administrasi desa secara umum, memiliki pembagian wilayah berdasarkan Rukun/RT. Selain itu dibagi dalam 4 SOA Besar yaitu :

1. **Soa Mudi Rummyaru** Terdiri dari 2 Rukun/ 2RT
2. **Soa Hordembun Melyangan** Terdiri dari 2 Rukun/ 2 RT
3. **Soa Mandessy Hurlatu** Terdiri dari 2 Rukun / 2 RT
4. **Soa Hortembun Larwembun** Terdiri dari 5 Rukun/ 3 RT

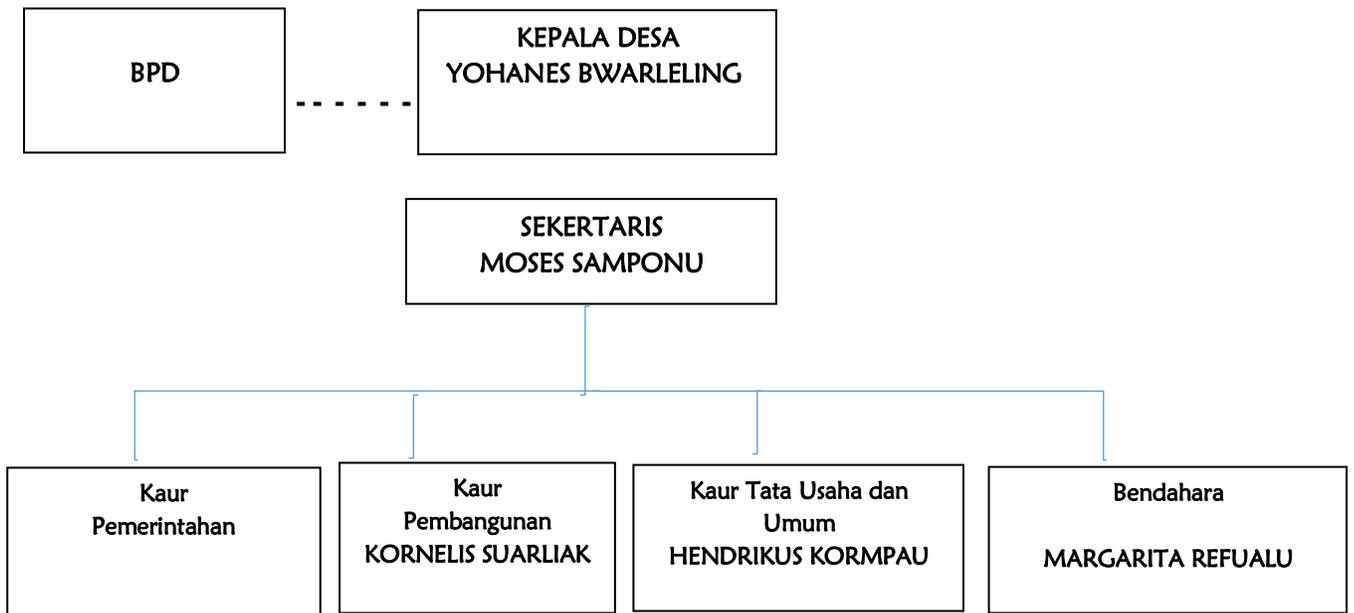
2.3.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Lorulun Kecamatan Wer Tamrian

Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015



BAGAN STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA LORULUN

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN
DESA LORULUN
KECAMATAN WER TAMRIAN**



Keterangan:

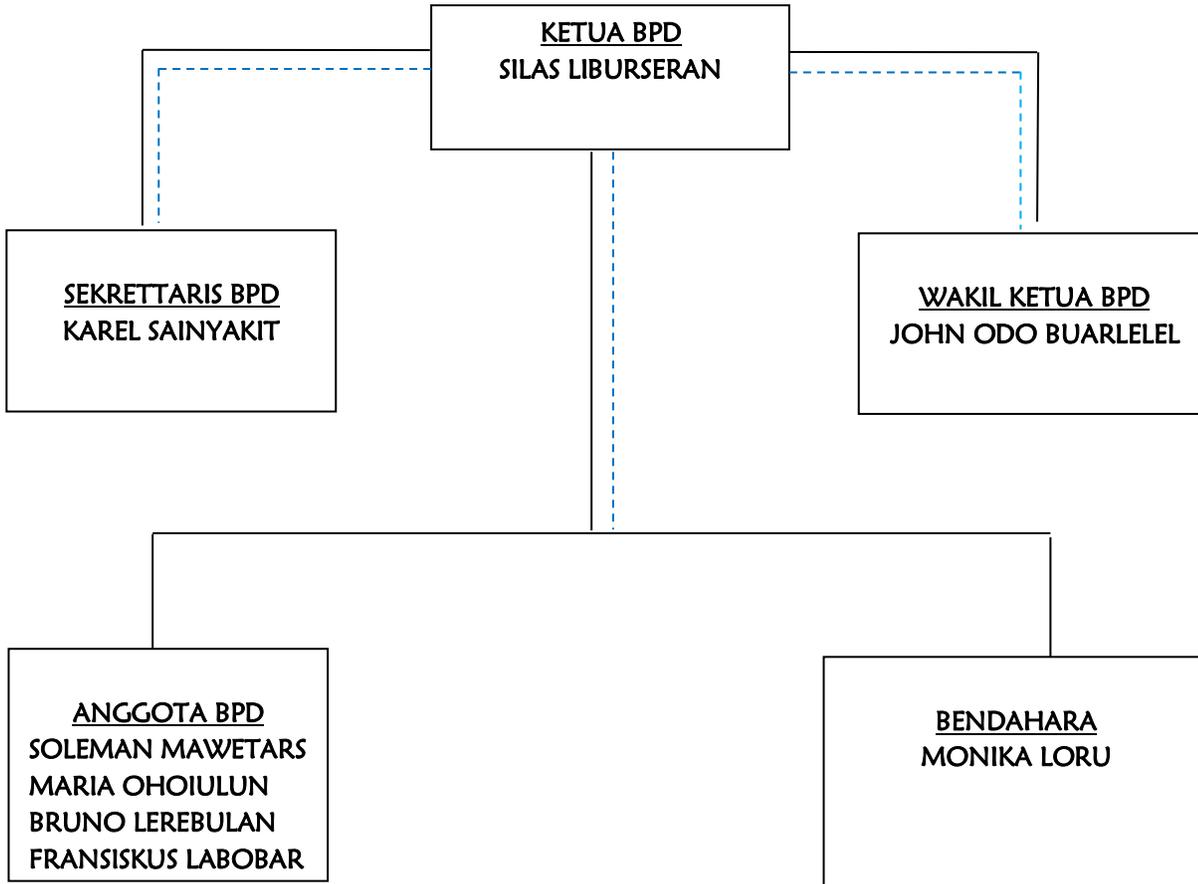
----- **Garis Kordinasi**



———— **Garis Komando/ Pemerintah**



**STRUKTUR ORGANISASI BPD
DESA LORULUN
KECAMATAN WER TAMRIAN**



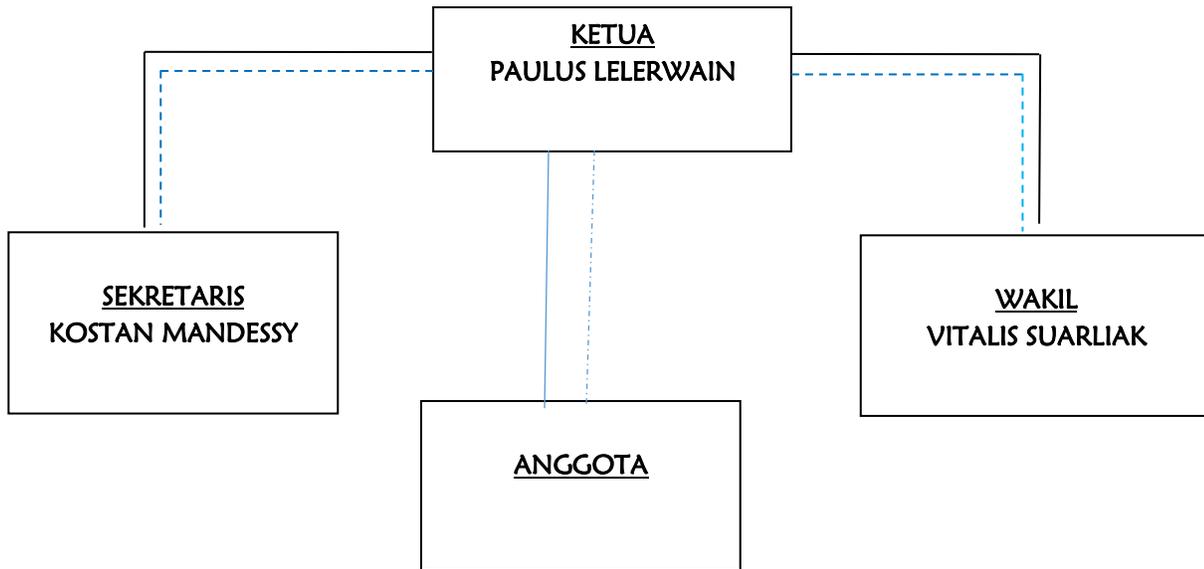
Keterangan:

----- **Garis Kordinasi**

———— **Garis Komando/ Pemerintah**



**STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA ADAT
DESA LORULUN
KECAMATAN WER TAMRIAN**



Keterangan:

----- **Garis Kordinasi**

———— **Garis Komando/ Pemerintah**



2.4. POTENSI DAN MASALAH MENDASAR YANG DIHADAPI DESA

2.4.1. POTENSI DESA

Pengkajian potensi dan masalah ini dimulai dari penjaringan masalah dan potensi yang ada di desa Lorulun dengan menggunakan empat alat kajian sebagai berikut:

1. Peta Desa.
2. Peta Rencana Pembangunan Desa Tahun 2016 -2021
3. Kelender Musim.
4. Diagram Kelembagaan.

I.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
	1	Partisipasi dan semangat kegotong-royongan masyarakat masih tetap dipupuk dan dipertahankan
	2	Tersedianya lokasi untuk kegiatan pemerintahan desa
	3	Adanya dukungan sumber daya manusia untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan
	4	Koordinasi dengan pemerintah kecamatan, kabupaten & provinsi cukup baik
	5	Adanya kelembagaan pemerintah desa, BPD, PKK, Lembaga Adat, Lembaga Pendidikan, Lembaga Kesehatan. Lembaga Keagamaan.
6	Hubungan yang harmonis antara pemerintah desa, aparat & masyarakat	
II	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
	1	Lahan pertanian & Kebun Jambu Mente yang masih produktif



2	Lahan Peternakan Masyarakat
3	Adanya kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam mengelolah usaha pertanian, perkebunan dan perikanan
4	Peluang terbukanya Usaha Ekonomi Produktif sangat besar, sehingga berpotensi untuk pembentukan & pengembangan BUMDES
5	Tersedianya tenaga kerja usia produktif untuk mengawal pembangunan desa
6	Peluang pasar pengembangan usaha pertanian cukup menjanjikan
7	Tersedianya sarana prasarana air bersih
8	Adanya kelompok usaha ekonomi produktif yang sudah berkembang di desa
9	Tersedianya sarana prasarana pendukung pendidikan dan kesehatan
10	Keinginan masyarakat untuk berusaha cukup tinggi
11	Akses dengan sangat mudah dan terjangkau sebagai target pemasaran produk usaha masyarakat
III.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa
1	Adanya pengurus Adat, aturan Adat dan Tingginya kepedulian masyarakat terhadap penerapan aturan adat dan norma yang berlaku di desa
2	Terbentuknya kader kesehatan desa
3	Adanya pengurus Karang Taruna & Organisasi kemasyarakatan lainnya
4	Adanya kemauan para kaum muda untuk mengembangkan minat dan bakat
5	Terciptanya kehidupan yang harmonis, rukun, tentram dan saling



		menghargai dikalangan masyarakat
	6	Tersedianya lokasi untuk pengembangan sarana olahraga
	7	Adanya Pengasuh untuk mengikuti kegiatan keagamaan
IV	Pemberdayaan Masyarakat Desa	
	1	Keinginan yang tinggi masyarakat untuk mengembangkan kapasitasnya dalam pengelolaan usaha ekonomi produktif
	2	Terbentuknya kelompok usaha ekonomi produktif

2.4.1. Masalah Mendasar yang Dihadapi Desa

Berdasarkan Penjaringan masalah yang dilakukan di Desa didapati masalah sebagai berikut :

I.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
	1	Belum Memadainya Saprass pendukung kegiatan Pemdes, BPD, LPM & Organisasi kemasyarakatan Desa Lorulun
	2	Kelembagaan pemerintahan desa (Pemdes, BPD, LPM,) & Organisasi kemasyarakatan belum melaksanakan tupoksinya secara maksimal
	3	Kelembagaan pemerintahan desa belum didukung dengan alokasi SILTAP dan Biaya operasional yang memadai
	4	Belum adanya penanda nama jalan dan tapal batas wilayah antar dusun.
	5	Perencanaan pembangunan di Desa Lorulun belum berjalan efektif
	6	Belum memadainya sarana penunjang kegiatan pemerintah desa sehingga pelayanan kepada masyarakat belum maksimal
	7	Belum adanya pembatas antar dusun & batas desa, sehingga menyulitkan dalam mengetahui batas wilayahnya
	8	Adanya dinamika perkembangan pembangunan & kompleksitas



		permasalahan desa, sehingga perlu ditelaah dan direncanakan tahapan penyelesaiannya sesuai aturan yang berlaku
II	Bidang Pembangunan Desa	
	1	Pada musim hujan rawan terjadinya banjir yang menyebabkan terjadinya abrasi disepanjang sungai dan terjadinya luapan air sehingga dapat mengancam lahan usaha pertanian masyarakat
	2	Terjadi banjir pada saat musim hujan sehingga harus dibangun Drainase
	3	Kondisi infrastruktur jalan (jalan desa, jalan dusun, JUT dan jalan produksi) yang belum memadai sehingga dapat menghambat aktifitas masyarakat dalam mengakses jalan tersebut
	4	Pada musim penghujan terjadinya diare dan pencemaran lingkungan akibat masih ada masyarakat yang membuang hajat bukan pada tempatnya
	5	Belum tersedianya fasilitas sekolah yang memadai untuk Anak usia Taman Kanak-Kanak&Minimnya alokasi dana insetif/honor bagi guru non PNS
	6	Potensi pariwisata belum terkelolah dengan baik (Kali)
	7	Pembangunan MCK
	8	Kondisi Sarana & Prasarana pendukung Keagamaan belum memadai
	9	Masih banyaknya masyarakat yang tergolong RTM belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan masih ada anak RTM usia sekolah yang tidak dapatmenyenyam pendidikan

	10	Masih kurangnya daya dukung & animo masyarakat dalam menciptakan alternatif usaha yang dapat menunjang pendapatan masyarakat serta kurang tersedianya peralatan modern penunjang usaha ekonomi masyarakat berakibat pada
--	----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



		tingkat pendapatan masyarakat masih rendah
	11	Belum adanya wadah perekonomian desa yang dapat menyediakan akses modal usaha & pengelolaan kegiatan usaha ekonomi produktif yang layak dikembangkan didesa
	12	Belum Adanya fasilitas memadai untuk kegiatan pesta/acara & fasilitas yang representatif untuk perpustakaan desa
	13	Masih banyak lahan masyarakat belum memiliki sertifikat
	14	Belum adanya fasilitas pekuburan umum
	15	Belum adanya fasilitas untuk menjaga keamanan desa
III.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	
	1	Kurangnya dukungan anggaran untuk kegiatan operasional kelembagaan adat
	2	Masih kurangnya proses kaderisasi pelaksana kelembagaan adat & belum tersedianya dokumentasi resmi terkait tata aturan adat yang berlaku dimasyarakat
	3	Tingginya animo masyarakat untuk mengembangkan kegiatan seni dan olahraga, namun tidak didukung dengan fasilitas yang memadai
	4	Insentif yang Kecil Untuk Linmas sedangkan jaga atau ronda malam
	5	Pengurus Orang Muda Katolik belum aktif kegiatannya hanya sebatas Ibadah
	6	Masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang hukum
	7	Belum adanya anggaran memadai untuk meningkatkan kegiatan pengembangan bakat dan minat masyarakat
	8	Belum adanya insetif & biaya operasional yang memadai untuk pembinaan kegiatan keagamaan
IV	Pemberdayaan Masyarakat Desa	



1	<p>Minimnya pengetahuan masyarakat dalam pemanfaatan berbagai potensi pengembangan ekonomi lokal sebagai salah satu alternative usaha untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.</p>
2	<p>Kurangnya pemahaman perangkat pemdes, pengurus BPD, pengurus LPM & organisasi kemasyarakatan yang ada di desa Lorulun dalam mengimplementasikan tupoksinya</p>
3	<p>Minimnya pengetahuan kelompok-kelompok usaha yang telah terbentuk didesa dalam mengembangkan kegiatan kelompoknya dan kurangnya pemahaman dalam menjalankan tupoksinya</p>
4	<p>Kurangnya pelatihan Penguatan Lembaga Adat</p>



BAB VI

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

6.1. Kebijakan Keuangan Desa

Perencanaan dan penganggaran dalam RPJMDes bersifat jangka menengah dan berbasis kinerja yang menggambarkan pencapaian sasaran atau tujuan pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan visi, misi dan strategi pembangunan yang mengindikasikan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai program yang telah ditetapkan dalam perencanaan periode 6 (enam) tahunan.

Pengelolaan keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan Kepala Pemerintahan Desa Lorulun adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan, dimana dalam melaksanakan kewenangannya, dapat dibantu oleh PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa).

Dalam pelaksanaan efisiensi alokasi, Pemerintah Desa Lorulun mengedepankan penentuan prioritas terhadap anggaran guna mencapai sasaran pembangunan daerah yang diwujudkan dengan mempertegas keterkaitan yang erat antara prioritas, program dan kegiatan pokok dengan penganggarnya. Penentuan prioritas memuat fokus dan kegiatan-kegiatan prioritas yang jelas dan terukur (serta dilengkapi dengan perhitungan biaya yang jelas) sehingga dapat lebih mencerminkan pemecahan masalah terhadap sasaran pembangunan Desa Lorulun yang ditetapkan.

Penyusunan keuangan Desa Lorulun diatur berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang dilaksanakan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun, dimana pendapatan Desa disusun menurut kelompok dan jenis, belanja Desa disusun menurut kelompok, kegiatan dan jenis, serta pembiayaan Desa disusun menurut kelompok dan jenis.



Pendapatan Desa Lorulun diharapkan dapat bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Transfer, serta Pendapatan Lain Lain, sedangkan Belanja Desa menurut kelompok dan jenis.

Pendapatan Asli Desa Lorulun perlu digali dan didaya-gunakan untuk kepentingan pembangunan Desa baik yang berasal dari hasil usaha Desa, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong serta lain-lain pendapatan asli Desa.

Dari keseluruhan sumber Dana Transfer yang diamanatkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Desa Lorulun masih membutuhkan afirmasi kebijakan penganggaran Desa bagian dari hasil pajak kabupaten dan retribusi daerah, bantuan keuangan provinsi maupun bantuan keuangan kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Belanja Desa Lorulun yang tertuang dalam RPJMDes tahun 2019-2024 terdiri dari program dan kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, serta belanja tidak terduga yang dikelompokkan pada belanja pegawai, modal serta barang dan jasa.

Pembiayaan Desa Lorulun dikelompokkan dalam penerimaan pembiayaan yang terdiri dari SILPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan serta pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

6.2. Prioritas Penggunaan Keuangan Desa Lorulun

Berdasarkan arah dan kebijakan pembangunan Desa Lorulun yang *partisipatif, transformatif dan berpihak pada pengentasan kemiskinan Desa*, maka melalui penganggaran yang berbasis kinerja, berjangka menengah serta penganggaran terpadu, yang merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Desa Lorulun berupaya untuk mewujudkan pelaksanaan tiga prinsip pengelolaan keuangan publik, yaitu; (i) Kerangka Kebijakan Jangka Menengah yang dilaksanakan secara konsisten; (ii) Alokasi pada prioritas untuk



mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas yaitu melalui penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah yang terdiri dari penerapan Prakiraan Maju, Anggaran Berbasis Kinerja, dan Anggaran Terpadu; dan (iii) Efisiensi dalam pelaksanaan dengan meminimalkan biaya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan efisiensi alokasi, pemerintah Desa Lorulun mengedepankan penentuan prioritas terhadap anggaran guna mencapai sasaran pembangunan Desa yang diwujudkan dengan mempertegas keterkaitan yang erat antara prioritas, program dan kegiatan pokok dengan penganggarnya. Penentuan prioritas memuat fokus dan kegiatan-kegiatan prioritas yang jelas dan terukur (serta dilengkapi dengan perhitungan biaya yang jelas) sehingga dapat lebih mencerminkan pemecahan masalah terhadap sasaran pembangunan Desa Lorulun yang ditetapkan.

Oleh karena itu, prioritas pengelolaan keuangan Desa Lorulun difokuskan pada :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pemerintah Desa
 - b. Program Pendataan Desa
 - c. Program Pengelolaan Informasi Desa
 - d. Pengadaan Papan dan Buku Monografi Desa
 - e. Pembuatan Peta Desa
 - f. Program Kerja Sama Antar Desa
 - g. Program Peningkatan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Desa
 - h. Program Peningkatan kualitas penyusunan RPJMdes dan RKPdes

2. Bidang Pembangunan Desa
 - a. Program Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Desa khususnya jalan produksi, jalan lingkungan, drainase lingkungan, Pembangunan Sarana Olah raga Desa;



- b. Program Pemanfaatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan khususnya air bersih skala Desa, sanitasi lingkungan, pelayanan posyandu dan sarana prasarana Puskesmas Pembantu;
 - c. Program Pembangunan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan khususnya pelayanan pendidikan usia dini, anak berkebutuhan khusus, Rumah Pintar serta dukungan sarana prasarana pendidikan Dasar Lorulun;
 - d. Program Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, sarana dan prasarana ekonomi khususnya di bidang, pertanian perkebunan. Peternakan, Perikanan dan keterampilan kelompok, dan sarana prasarana pendukung lainnya yang menciptakan dukungan perekonomian Desa;
 - e. Program Pelestarian Lingkungan Hidup, khususnya perlindungan mata air, perlindungan pantai dan terumbu karang serta peremajaan komoditas perkebunan;
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - a. Program Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa khususnya Tim Penggerak PKK, Kelompok Pemuda, Kelompok Adat dan kelompok kesenian dan budaya.
 - b. Program Penyelenggaran Keamanan dan Ketertiban Desa khususnya penanganan dampak konsumsi miras, kenakalan remaja dan pergaulan bebas,
 - c. Program Pengadaan Sarana Prasarana Olahraga dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Desa.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a. Program Pelatihan Usaha khususnya di bidang pertanian, perkebunan, Peternakan, Perikanan dan ekonomi kreatif untuk mendukung pencapaian visi dan misi.
 - b. Penyertaan modal Bumdes dan Pelatihan Manajemen Pengurus BUMDes



- c. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD khususnya terkait pengelolaan kewenangan Desa, kualitas perencanaan Desa dan pengelolaan keuangan Desa
- d. Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat khususnya kelompok ekonomi produktif, masyarakat miskin, pemuda dan perempuan.



BAB III

POTENSI DAN MASALAH

Pengkajian potensi dan masalah ini dimulai dari penjaringan masalah dan potensi yang ada di Desa Lorulun dengan menggunakan 3 (tiga) alat kajian sebagai berikut:

1. Peta Desa.
2. Kelender Musim.
3. Diagram Kelembagaan.

Proses penjaringan masalah ini dilaksanakan dalam forum Musyawarah Desa.

3.1. Potensi.

Desa Lorulun memiliki potensi yang sangat besar, baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Sampai saat ini potensi sumber daya belum benar-benar optimal diberdayakan. Hal ini terjadi dikarenakan belum teratasinya hambatan-hambatan yang ada. Berikut beberapa potensi dan hambatan yang ada :

A. Sumber daya Alam:

1. Banyaknya lahan bila dikelola dengan yang baik dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan menyerap tenaga kerja.
2. Wilayah Desa Lorulun cukup potensial untuk mengembangkan ternak Sapi atau Kambing sangat bagus karena kemudahan dalam hal makanan pokok ternak diambil dari lahan kebun warga yang ada.
3. Peternakan masih merupakan usaha sampingan bagi warga masyarakat Desa Lorulun, hal ini bisa dilihat dari jumlah keluarga yang mempunyai ternak.
4. Desa Lorulun terdapat cadangan bahan tambang galian C, seperti pasir dan batu kerikil.



5. Lokasi Desa Lorulun cukup potensial untuk dikembangkan sebagai tempat jajanan dan makanan lokal skala home Industri dan buah buahan lokal.
6. Desa Lorulun yang terletak dekat pesisir Laut Seram, yang memiliki potensi laut yang dapat di manfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Sumber Daya Manusia:

1. Jumlah penduduk yang tergolong usia produktif cukup tinggi, serta angkatan kerja yang belum dapat diandalkan oleh kerena belum adanya keterampilan;
2. Dalam pendidikan, Jumlah pendidik cukup terpenuhi;
3. Besarnya sumber daya perempuan usia produktif sebagai tenaga produktif yang belum dapat mendorong potensi industri rumah tangga;
4. Kemampuan bertani yang diturunkan orang tua kepada anak sejak dulu;
5. Hubungan yang kondusif antara Kepala Desa, Lembaga Desa dan masyarakat;
6. Adanya tenaga kesehatan, terutama di posyandu;
7. Adanya kelembagaan baik tingkat Desa, misal: BPD, PKK Desa, Posyandu, Kelompok tani, Kelompok Pengrajin / Pertukangan, dan Kelompok Pemuda;
8. Adanya sistem Gotong-royong;
9. Desa Lorulun memiliki potensi yang sangat besar, baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Sampai saat ini potensi sumber daya belum benar-benar optimal diberdayakan. Hal ini terjadi dikarenakan belum teratasinya hambatan-hambatan yang ada;
10. Mata pencarian bidang pertanian dan perkebunan tersedia dengan lahan yang ada;



3.2 Masalah.

Masalah yang dihadapi sebagai berikut:

1. Kondisi jalan setapak sepanjang 200 meter mengalami kerusakan;
2. Kondisi balai desa yang harus diperbaiki ;
3. Rusaknya jaringan air bersih di desa;
4. Kondisi Desa yang membutuhkan penerangan (lampu) jalan pada malam hari;
5. Belum adanya penanganan ternak dengan baik;
6. Minimnya pelatihan – pelatihan bagi kelompok usaha ekonomi, kelompok nelayan, kelompok tani, maupun kelompok pemuda;
7. Belum adanya kerjasama yang baik antara Pengurus PKK tingkat Kabupaten dan Kecamatan, akibatnya tidak ada kegiatan-kegiatan bermanfaat bagi masyarakat di pedesaan;
8. Kondisi gedung pos kesehatan desa yang harus di perbaiki;
9. Belum maksimalnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat karena terbatasnya persediaan obat-obatan;
10. Pada musim penghujan, banyak ternak yang terserang penyakit;
11. Pada musim hujan atau musim pancaroba banyak masyarakat terserang penyakit terutama demam, flu, dan sebagainya;
12. Belum adanya saran dan prasaran olah raga yang memadai bagi masyarakat;
13. Pada musim hujan, masyarakat mengalami kesulitan dalam menanti kendaraan penumpang yang lewat.
14. Belum terbentuknya BUMDES sebagai wadah bagi usaha-usaha milik desa.



BAB VII KEBIJAKAN UMUM

7. 1. Strategi Pencapaian

Upaya pencapaian visi pemerintah Desa Lorulun, yakni terwujudnya Masyarakat Lorulun yang Maju, Sejahtera dan Mandiri selama 6 (enam) tahun kedepan, memposisikan segenap upaya pembangunan yang perlu dipersiapkan secara bertahap, berkesinambungan dan bertumpu pada kemampuan dan kemandirian Desa sesuai tata kehidupan masyarakat adat yang berdaulat. Karena itu, dengan filosofi perencanaan yang *partisipatif, transformatif dan berpihak pada pengentasan kemiskinan*, maka tahapan pencapaian pembangunan Desa Lorulun dirumuskan sebagai berikut:

TABEL INDIKATOR DESA MEMBANGUN

Menuju Lorulun sebagai Desa Berkembang	2019 -2020	2021-2022	2023-2024
<ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 	Penyediaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa yang mampu mendukung pelayanan pemerintahan dan masyarakat	-	-
<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Desa 	Penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat,	-	-
<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan Kemasyarakatan Desa 	Revitalisasi fungsi kelembagaan masyarakat Desa	-	-
<ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan Masyarakat Desa 	Orientasi pembukaan lapangan kerja dan atau usaha baru serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga	-	-



atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk			
Menuju Lorulun sebagai Desa Maju	2019-2020	2021-2022	2023-2024
<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 	-	Kemandirian aparatur pemerintah Desa dalam mengelola kewenangan dan urusan penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat Desa	-
<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Desa 	-	Pembangunan sarana dan prasarana umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat Desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat Desa	-
<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Kemasyarakatan Desa 	-	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Desa	-
<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan Masyarakat Desa 	-	Peningkatan kuantitas dan kualitas kerja dan atau proses produksi sampai pemasaran produk serta pemenuhan kebutuhan dan atau akses modal	-
Menuju Nalaia sebagai Desa Mandiri	2019-2020	2021-2022	2023-2024
<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 	-	-	Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan baik dan bersih
<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Desa 	-	-	perluasan ekonomi dan investasi Desa, termasuk prakarsa Desa dalam membuka lapangan kerja, pada teknologi tepat guna dan investasi lembaga ekonomi Desa
<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Kemasyarakatan Desa 	-	-	Kemandirian kelembagaan masyarakat dalam pengorganisasian



		potensi Desa untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa
<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan Masyarakat Desa 	-	<p>-</p> <p>pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan Desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat dimana Desa dapat menghidupi dirinya sendiri, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital Desa secara berkelanjutan</p>

7.2. Indikator Capaian Kinerja

Berdasarkan strategi prioritas per tahapan pembangunan, maka indicator capaian keberhasilan yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

PRIORITAS PEMBANGUNAN

Tahapan Pembangunan	Strategi Prioritas	Indikator Capaian
Menuju Lorulun sebagai Desa Maju	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 2. Peningkatan akses air minum yang layak bagi masyarakat 3. Peningkatan akses air bersih untuk mandi dan mencuci bagi masyarakat Desa 4. Peningkatan kepemilikan jamban keluarga masyarakat Desa 5. Peningkatan kualitas jalan Desa, jalan lingkungan maupun jalan kabupaten yang melintasi Desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas serta dampak terhadap pelayanan pemerintah Desa 2. Rasio KK dengan akses air minum yang layak 3. Rasio KK dengan akses MCK yang layak 4. Rasio KK dengan jamban sehat 5. Pertumbuhan jalan Desa dan jalan lingkungan 6. Terlaksananya layanan SLB bagi penyandang kebutuhan



	<ol style="list-style-type: none"> 6. Penyediaan akses Sekolah Luar Biasa bagi kelompok berkebutuhan khusus 7. Pembentukan Taman Bacaan Masyarakat/Perpustakaan Desa 8. Peningkatan ketersediaan fasilitas olah raga masyarakat 9. Peningkatan akses ke pusat perdagangan 10. Penyediaan layanan perdagangan di pemukiman warga (warung dan mini-market) 11. Pengelolaan sampah berbasis Desa 12. Pengelolaan sumberdaya sungai yang berkelanjutan 13. Revitalisasi fungsi kelembagaan masyarakat Desa 	<ol style="list-style-type: none"> 7. Tersedia dan berfungsi Taman bacaan/ perpustakaan Desa 8. Jumlah ketersediaan fasilitas olah raga yang meningkat 9. Jumlah armada dan pengguna transportasi darat/laut 10. Jumlah warung dan kios Desa 11. Terlaksananya system pengelolaan sampah berskala Desa 12. Terlaksananya pengelolaan sumberdaya sungai yang berkelanjutan 13. Jumlah lembaga kemasyarakatan Desa yang direvitalisasi
<p>Menuju Lorulun sebagai Desa Maju</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemandirian aparaturn pemerintah Desa dalam mengelola kewenangan dan urusan penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat Desa 2. Pemberantasan Buta Aksara (baca, tulis dan hitung). 3. Pembentukan Kelompok PKBM/ Paket ABC 4. Penyediaan tenaga dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya 5. Peningkatan pelayanan Poskdes, Polindes dan Posyandu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kewenangan dan urusan yang dapat dilaksanakan 2. Terlaksananya kegiatan Calistung tingkat Desa 3. Terbentuknya Pokja PKBM 4. Jumlah tenaga dokter, perawat dan teaga kesehatan tingkat Desa 5. Jumlah dan kualitas pelayanan poskesdes, polindes dan poosyandu 6. Jumlah kasus KDRT dan pasca trauma yang selesai tertangani 7. Jumlah dan luas RTH Desa 8. Jumlah dan besar pemanfaat layanan kredit 9. Jumlah kelompok penerima bantuan modal dan besar bantuan



	<ol style="list-style-type: none"> 6. Penyediaan dukungan penanganan KDRT dan Pasca trauma 7. Penyediaan ruang publik Desa 8. Peningkatan akses masyarakat Desa untuk layanan kredit 9. Penyediaan akses bantuan modal usaha dan pembentukan lembaga ekonomi 10. Penyediaan sistem pengelolaan konflik antar warga 11. Pengelolaan Sistem Keamanan Lingkungan Desa 12. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Siskamling 13. Peningkatan kerja sama antar Desa 14. Peningkatan kerukunan antar umat beragama 15. Peningkatan kapasitas kelembagaan Desa 	<ol style="list-style-type: none"> modal usaha serta jumlah lembaga ekonomi Desa yang terbentuk 10. Ketersediaan system pengelolaan konflik antar warga 11. Terlaksananya sistem keamanan lingkungan Desa, 12. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Siskamling 13. Jumlah dan cakupan kerja sama antar Desa 14. Jumlah dan kegiatan bersama antar umat beragama 15. Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas bagi kelembagaan Desa
<p>Menuju Lorulunsebagai Desa Mandiri</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tatakelola pemerintah Desa yang baik dan bersih 2. Peningkatan kepesertaan jaminan sosial masyarakat desa 3. Peningkatan dan pelestarian semangat gotong royong masyarakat 4. Pestaarian bahasa lokal dan penguasaan bahasa asing 5. Peningkatan pemanfaatan jaringan komunikasi selular 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian kinerja pemerintah Desa dari BPD dan supra Desa 2. Jumlah peserta jaminan sosial masyarakat 3. Jumlah inisiatif kegiatan gotong royog masyarakat 4. Jumlah warga masyarakat pengguna bahasa lokal dan penguasaan bahasa asing 5. Jumlah pengguna jaringan komunikasi selular



- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Peningkatan pemanfaatan layanan televisi lokal, nasional dan asing | 6. Jumlah bertambah pemanfaatan layanan TV |
| 7. Penyediaan layanan kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan | 7. Jumlah pemanfaatan kedai, restoran, hotel dan penginapan |
| 8. Penyediaan layanan pos dan logistik | 8. Ketersediaan layanan pos dan logistic |
| 9. Penyediaan pelayanan jasa pariwisata dan transportasi umum reguler | 9. Ketersediaan layanan jasa pariwisata dan transportasi umum reguler |
| 10. Penyediaan layanan perbankan (umum dan swasta) | 10. Ketersediaan layanan perbankan (umum dan swasta) |
| 11. Penyediaan layanan bank perkreditan rakyat | 11. Ketersediaan layanan bank perkreditan rakyat |
| 12. Pembentukan lembaga ekonomi rakyat (koperasi dan atau BUMDes) | 12. Terbentuknya KUD dan atau BUMDES |
| 13. Kemandirian lembaga kemasyarakatan Desa dalam pengorganisasian potensi Desa | 13. Jumlah kegiatan pengembangan potensi Desa yang dikelola lembaga kemasyarakatan Desa |

7.3. Prioritas Pembangunan per Bidang Kerja Pemerintah Desa

Berdasarkan arah dan kebijakan pembangunan Desa Lorulun yang *partisipatif, transformatif dan berpihak pada pengentasan kemiskinan Desa*, maka , pemerintah Desa Lorulun mengedepankan penentuan kegiatan pembangunan guna mencapai sasaran pembangunan Desa, yang diwujudkan dengan mempertegas keterkaitan yang erat antara prioritas, program dan kegiatan pokok dengan penganggarannya. Penentuan prioritas memuat fokus dan kegiatan-kegiatan prioritas yang jelas dan terukur (serta dilengkapi dengan perhitungan biaya yang jelas) sehingga dapat lebih mencerminkan pemecahan masalah terhadap sasaran pembangunan Desa Lorulun yang ditetapkan.



Oleh karena itu, prioritas program tahunan Desa Lorulu difokuskan pada :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pemerintah Desa
 - b. Program Pendataan Desa
 - c. Program Pengelolaan Informasi Desa
 - d. Pengadaan Papan dan Buku Monografi Desa
 - e. Pembuatan Peta Desa
 - f. Program Kerja Sama Antar Desa
 - g. Program Peningkatan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Desa
 - h. Program Peningkatan kualitas penyusunan RPJMdes dan RKPdes

2. Bidang Pembangunan Desa :
 - a. Program Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Desa khususnya jalan produksi, drainase lingkungan;
 - b. Program Pemanfaatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan khususnya air bersih skala desa, sanitasi lingkungan, pelayanan posyandu dan sarana prasarana Puskesmas Pembantu;
 - c. Program Pembangunan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan khususnya pelayanan pendidikan usia dini, anak berkebutuhan khusus, Rumah Pintar serta dukungan sarana prasarana Pendidikan Dasar Lorulun;
 - d. Program Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, sarana dan prasarana ekonomi khususnya di bidang, pertanian perkebunan dan keterampilan kelompok, dan sarana prasarana pendukung lainnya yang menciptakan dukungan perekonomian Desa;
 - e. Program Pelestarian Lingkungan Hidup, khususnya perlindungan mata air, perlindungan pantai dan terumbu karang serta peremajaan komoditas perkebunan.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa:



- a. Program Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa khususnya Tim Penggerak PKK, Kelompok Pemuda, Kelompok Muhabet dan kelompok kesenian dan budaya.
 - b. Program Penyelenggaran Keamanan dan Ketertiban Desa khususnya penanganan dampak konsumsi miras, kenakalan remaja dan pergaulan bebas,
 - c. Program Pengadaan Sarana Prasarana Olahraga
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :
- a. Program Pelatihan Usaha khususnya di bidang pertanian, perkebunan dan ekonomi kreatif untuk mendukung pencapaian visi dan misi.
 - b. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD khususnya terkait pengelolaan kewenangan Desa, kualitas perencanaan Desa dan pengelolaan keuangan Desa
 - c. Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat khususnya kelompok ekonomi produktif, masyarakat miskin, pemuda dan perempuan.

Pelaksanaan program prioritas dari usulan masyarakat Desa Lorulun diatas merupakan pilihan terbaik dari pilihan-pilihan yang ada yang berdampak langsung pada pengentasan kemiskinan skala desa dan mendorong perubahan Desa Lorulun menuju Desa Mandiri dengan tambahan kriteria operasional dalam penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahunan, yaitu:

1. *Penajaman operasionalisasi pelaksanana kegiatan* melalui Proposal Kegiatan, Desain dan RAB serta waktu pelaksanaan dengan target dan biaya pelaksanaan yang rasional dan akurat serta berfokus pada dampak;
2. *Identifikasi dan pengawalan kelompok penerima manfaat prioritas* sebagai penerima manfaat dari usulan pembangunan masyarakat
3. *Pengorganisasian masyarakat dan peningkatan peran kelembagaan Desa baik* melalui peran pendamping profesional, pemerintah Desa dan kelompok peduli



4. *Dukungan dan keterlibatan aparatur pemerintah Desa* dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga terbangun pengendalian kegiatan yang berdampak hasil.
5. *Peluang dan manfaat sinergitas dan harmonisasi program kemiskinan supra Desa* untuk memberikan nilai tambah, dampak berkelanjutan (multiplier effect) dan semangat kolektif yang memperkuat posisi tawar (*bargaining position*)
6. *Peluang dan manfaat kerja sama intra dan supra Desa dalam pengentasan kemiskinan* atas prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.



BAB IV

KERANGKA PEMIKIRAN STRATEGIS RPJM DESA

4.1. VISI

Berdasarkan analisis terhadap kondisi obyektif dan potensi yang dimiliki Desa Lorulun serta dengan mempertimbangkan kesinambungan pembangunan Desa Lorulun, maka Visi Desa Lorulun tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

“ MASYARAKAT DESA LORULUN DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YANG LEBIH BAIK “

4.2. MISI

Berdasarkan Visi Desa Lorulun untuk jangka 6 (enam) tahunan, maka misi Desa Lorulun merupakan penjabaran lebih operasional terhadap visi diatas, sebagai berikut :

1. Menyediakan sarana prasarana olah raga dengan dasar pemikiran dengan tubuh yang sehat menghasilkan pikiran yang sehat;
2. Melestarikan sumber-sumber air dan penataan kembali sarana prasarana air;
3. Tata kelola pemerintahan desa lorulun yang lebih baik dan transparan;
4. Melestarikan dan menata kembali kelompok-kelompok kerja dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan dan lain sebagainya dengan pendampingan;
5. Meningkatkan mutu kehidupan masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik dan layak menuju desa maju dan mandiri.



4.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM PENCAPAIAN PEMBANGUNAN

Tujuan dan Sasaran:

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PENCAPAIAN
Misi Pertama : Menyediakan Sarana prasarana olah raga dengan dasar pemikiran dengan tubuh yang sehat menghasilkan pikiran yang sehat			
1	Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur Olah raga desa	Meningkatnya minat masyarakat di bidang olah raga	Membangun sapras Olah raga, baik itu lapangan bola kaki dan bola Volly
2	Berkurangnya risiko terserang penyakit dan masyarakat memiliki tubuh yang sehat dan pikiran yang sehat	Meningkatnya masyarakat yang memiliki tubuh yang sehat dan pikiran yang sehat	Peningkatan peran aktif masyarakat untuk semua jenjang
Misi Kedua : Melestarikan sumber-sumber air dan penataan kembali sarana prasarana air			
1	Perbaikan Sumber-sumber air bersih di Desa	Perbaikan Jaringan Air di Desa	1.Menyediakan Sapras Air Bersih di Desa 2.Pembangunan Bak Penampung Air



2	Peningkatan kualitas pelayanan air bersih di desa	Masyarakat bisa mendapatkan air bersih secara optimal setiap saat tanpa mengenal musim	Menyediakan air bersih Sampai ke rumah-rumah warga secara maksimal
Misi Ketiga : Tata kelola pemerintahan desa lorulun yang lebih baik dan transparan			
1	Peningkatan kualitas pelayanan, profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan pemerintahan desa & organisasi kemasyarakatan	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah Desa.	Menyediakan sapras kegiatan pemerintahan desa dan organisasi kemasyarakatan.
			Menerapkan standar pelayanan minimal, transparan, akuntabilitas dalam pelayanan masyarakat & pengelolaan



			keuangan desa
			Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur & organisasi kemasyarakatan
<p>Misi Keempat : Melestarikan dan menata kembali kelompok-kelompok kerja dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan dan lain sebagainya dengan pendampingan</p>			
1	Pengembangan kegiatan ekonomi produktif di Desa	Pendampingan yang kontinyu kepada kelompok usaha masyarakat di bidang pertanian, peternakan, perikanan dan lainnya	Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi, pertanian, perkebunan, Perikanan & kegiatan usaha ekonomi masyarakat.
		Meningkatnya Pendapatan Asli Desa (PADes)	Penyertaan Modal dan Peningkatan kapasitas Pengurus BUMDes
		Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Menyediakan sumber permodalan dan pemasaran produksi, pertanian, perkebunan, Pertanian & kegiatan



			usaha ekonomi masyarakat.
		Menuju Petani, peternak, nelayan dan usaha lainnya yang unggul dan kompetitif dengan penguasaan IPTEK	Menyediakan teknologi, sarana dan prasarana penunjang kegiatan pertanian, perkebunan, Perikanan, kegiatan usaha ekonomi
	Pengembangan kemitraan & peluang investasi Melalui BUMDES	Masyarakat lebih mandiri dalam berproduksi	Menyediakan regulasi / aturan yang mengatur pengembangan kegiatan ekonomi produktif masyarakat
			Menyediakan kelembagaan perekonomian desa
			Membangun kerjasama dengan pemerintah dan pihak ketiga (swasta)
Misi Kelima: Meningkatkan mutu kehidupan masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik dan layak menuju desa maju dan mandiri			
	Meningkatkan dukungan dan keterlibatan masyarakat dalam	Terwujudnya kualitas sumberdaya	Pengadaan Sarana dan Prasarana pelayanan Dasar di desa



	penyediaan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih terjangkau, bermutu, merata dan murah serta pelayanan sosial dasar lainnya.	manusia di Desa yang maju dan mandiri	
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	--

4.4. KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

4.4.1. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

4.4.1.1	Rehab & Pengadaan Prasarana Kantor Desa	Desa
4.4.1.2	Pemb. & pengadaan Saprass Balai Desa	Desa
4.4.1.3	Pengadaan barang inventaris pemerintahan desa	Desa
4.4.1.4	Pembangunan pagar permanen kantor & balai desa	Desa
4.4.1.5	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Desa	Desa
4.4.1.6	Pemb. & pengadaan Saprass Kantor BPD	Desa
4.4.1.7	Pengadaan Monografi Desa	Desa
4.4.1.8	Pengadaan Alat-alat Studio/ Audio	Desa
4.4.1.9	Pemb. & Pengadaan Saprass sanggar PKK	Desa
4.4.1.10	Pengadaan Saprass Rujab Guru/ Rumah Dinas	Desa



4.4.1.11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Genset Desa	Desa
4.4.1.12	Pengadaan Peralatan Kantor Desa	Desa
4.4.1.13	Papan nama kantor desa & PKK	Desa
4.4.1.14	Pengadaan Infocus Desa	Desa
4.4.1.15	Pengadaan Internet Desa	Desa
4.4.1.16	Pengadaan alat komunikasi Pemerintah Desa (HT)	Desa
4.4.1.17	Pengadaan Lampu Jalan / Lorong	Desa
4.4.1.18	Pengadaan Papan Nama Jalan dan Lorong	Desa
4.4.1.19	Renovasi tugu pusat Desa	Desa
4.4.1.20	Dana kesejahteraan Aparat Pemdes, BPD, PKK, RT/RW, dan Linmas	Desa
4.4.1.21	Operasional Pemdes, BPD, PKK, RT/RW dan Linmas	Desa
4.4.1.22	Penyusunan Perenc. pembangunan Desa	Desa
4.4.1.23	Pengadaan Laptop dan Printer	Desa
4.4.1.24	Pembuatan Perdes	Desa
4.4.1.25	Pembuatan Pos Kamling	Desa
4.4.1.26	Baju Dinas Aparat Pemdes, BPD, PKK, RT/RW, Linmas	Desa
4.4.1.27	Pengadaan AC Kantor Desa	Desa
4.4.1.28	Pengadaan AC Balai Desa	Desa
		Desa



		Desa
--	--	------

4.4.2. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa

4.4.2.1	Pembangunan MCK	Desa
4.4.2.2	Pembangunan Jalan Desa	Desa
4.4.2.3	Pembangunan Gedung PAUD	Desa
4.4.2.4	Pembuatan Pagar PAUD	Desa
4.4.2.5	Pembangunan Rumah Layak Huni Masyarakat	Desa
4.4.2.6	Rehab Rumah Tidak Layak Huni Masyarakat	Desa
4.4.2.7	Pembangunan Drainase	Desa
4.4.2.8	Pembangunan & Peningkatan Jalan Produksi/ jalan Tani	Desa
4.4.2.9	Pembuatan talud	Desa
4.4.2.10	Pembangunan Gapura dan tanda batas desa	Desa
4.4.2.11	Pembangunan Rumah Pastori	Desa
4.4.2.12	Pengadaan Mesin air/alkon Desa	Desa
4.4.2.13	Penyambungan listrik gratis bagi RTM	Desa
4.4.2.14	Pengadaan Kendaraan Angkutan Sampah	Desa
4.4.2.15	Pembuatan tempat sampah	Desa
4.4.2.16	Pengadaan Mesin sensor	Desa
4.4.2.17	Pengadaan Mobil Truck Desa	Desa
4.4.2.18	Pembuatan jalan Desa Lorulun – Lurang	Desa



4.4.2.19	Pembuatan sumur gali masyarakat	Desa
4.4.2.20	Perpipaan air bersih	Desa
4.4.2.21	Pengadaan Sumur bor	Desa
4.4.2.22	Pengadaan Mesin pemotong Rumput	Desa
4.4.2.23	Pengadaan Solar cell	Desa
4.4.2.24	Pem.gedung & Pengadaan Prasarana posyandu	Desa
4.4.2.25	Insentif bagi kader posyandu & dukun terlatih	Desa
4.4.2.26	Penimbunan halaman SD & TK	Desa
4.4.2.27	Pembangunan pagar, mobiler & alat bermain TK	Desa
4.4.2.28	Pengadaan Mesin Cetak Batako	Desa
4.4.2.29	Rehab gedung perpustakaan desa	Desa
4.4.2.30	Pengadaan Buku Perpustakaan Desa	Desa

Lanjutan

4.4.2.31	Honor Bagi Guru Non PNS	Desa
4.4.2.32	Beasiswa bagi anak RTM usia sekolah	Desa
4.4.2.33	Kelengkapan sekolah bagi anak RTM	Desa
4.4.2.34	Pengadaan Profil Tank Desa	Desa
4.4.2.35	Pengadaan Sarana dan Prasarana Listrik Desa	Desa
4.4.2.36	Pengadaan Alat Handsprayer	Desa
4.4.2.37	Pengadaan Mesin Molen Desa	Desa
4.4.2.38	Pengadaan Pakan Ayam	Desa



4.4.2.39	Pengadaan bibit pertanian	Desa
4.4.2.40	Pengadaan Pupuk & Obat-obatan Pertanian	Desa
4.4.2.41	Pengelolaan lahan tidur produktif	Desa
4.4.2.42	Pengadaan bibit gaharu, pala super	Desa
4.4.2.43	Pengadaan bibit Ayam Petelur	Desa
4.4.2.44	Pengadaan mesin parut kelapa	Desa
4.4.2.45	Pengadaan Bibit babi Pedaging	Desa
4.4.2.46	Pengadaan bibit Kambing	Desa
4.4.2.47	Pengadaan bibit sapi	Desa
4.4.2.48	Bantuan Permodalan (BUMDES)	Desa
4.4.2.49	Pendirian & Pembentukan BUMDES	Desa
4.4.2.50	Pengadaan Bagan	Desa
4.4.2.51	pengadaan sarana dan prasarana perikanan	Desa
4.4.2.52	Pengadaan Mesin Traktor	Desa
4.4.2.53	Pengadaan Mesin Rontok padi	Desa
4.4.2.54	Pengadaan Mesin Parut Kelapa	Desa
4.4.2.55	Pengadaan Mesin Jagung	Desa
4.4.2.56	Pensertifikatan Lahan Masyarakat & Aset Desa	Desa

4.4.3. Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan Desa

4.4.3.1	Pembinaan Administrasi PKK (Papan data)	Desa
4.4.3.2	Pembinaan anak dan remaja	Desa



4.4.3.3	Penyediaan insentif guru PAUD dan TK	Desa
4.4.3.4	Bantuan Ke Gereja	Desa
4.4.3.5	Penyediaan Insentif Kader Posyandu dan Bidan Desa	Desa
4.4.3.6	Penyediaan Insentif Pengurus Kelembagaan Adat	Desa
4.4.3.7	Pembinaan kelembagaan adat	Desa
4.4.3.8	Pengadaan Peralatan kegiatan Kesenian	Desa
4.4.3.9	Pengadaan Peralatan Kegiatan Olahraga	Desa
4.4.3.10	Pembangunan lapangan Futsal	Desa
4.4.3.11	Pembangunan Lapangan Volly	Desa
4.4.3.12	Penimbunan Lapangan Futsal	Desa

4.4.4 Kegiatan Pemberdayaan Desa

4.4.4.1	Diklat bagi Kepala Desa & Aparat Pemdes	Desa
4.4.4.2	Diklat bagi pengurus BPD	Desa
4.4.4.3	Pelatihan Peny. Perencanaan Desa & Perdes	Desa
4.4.4.4	Pelatihan Perikanan Tangkap Air Laut	Desa
4.4.4.5	Pelatihan Kelompok UEP	Desa
4.4.4.6	Pelatihan Kader Teknik Desa	Desa
4.4.4.7	Pelatihan Pembuatan Kue	Desa
4.4.4.8	Pelatihan bagi pengurus kelembagaan Adat	Desa
4.4.4.9	Pelatihan bagi pengurus PKK	Desa
4.4.4.10	Pelatihan Keterampilan Pemuda Desa	Desa



4.4.4.11	Pelatihan dan sosialisasi BUMDes	Desa
4.4.4.12	Diklat petugas keamanan (LINMAS)	Desa
4.4.4.13	Pelatihan Kewirausahaan	Desa
4.4.4.14	Pelatihan Perternakan	Desa
4.4.4.15	Pelatihan keterampilan bagi generasi muda	Desa
4.4.4.16	Pelatihan Kelompok Tani	Desa
4.4.4.15	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Desa
4.4.4.17	Pemberian Makanan Tambahan	Desa

Dengan paparan masalah berdasarkan ketiga alat kaji P3D, maka berdasarkan jumlah masalah per bidang itu dapat disampaikan sebagai berikut:

Bidang Isu	Jumlah masalah dari Peta Sosial Desa	Jumlah masalah dari Kalender Musim	Jumlah masalah dari Diagram Kelembagaan	Total Masalah
Pendidikan	7	-	-	7
Kesehatan	6	1	1	8
Lingkungan Hidup	10	4	-	14
Ekonomi	8	-	1	9
Keamanan dan	-	-	1	1



Ketertiban				
Kelembagaan	12	-	6	18

a. Masalah Desa sebagai pemetaan isu prioritas

Berdasarkan data tersebut, masalah paling banyak yang disampaikan masyarakat Desa adalah berturut-turut masalah Lingkungan Hidup (14 masalah), masalah Ekonomi (7 masalah), masalah Kesehatan (8 masalah), masalah Pendidikan (7 masalah), masalah Kelembagaan (18 masalah) dan masalah keamanan ketertiban sebanyak (1 masalah).

Data tersebut memberikan prioritas perencanaan Desa harus memberikan perhatian pada :

1. *prioritas pertama* untuk peningkatan peran dan kapasitas kelembagaan Desa,
2. *prioritas kedua* pada pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan
3. *prioritas ketiga* peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat
4. *prioritas keempat* pada usaha peningkatan pelayanan kesehatan
5. *prioritas kelima* pada peningkatan mutu dan kualitas pendidikan.
6. *Prioritas keenam* untuk peningkatan peran dan kapasitas kelembagaan Desa,
7. *prioritas ketujuh* untuk peningkatan ketertiban dan keamanan

b. Potensi Desa sebagai Basis Modal Perencanaan Desa



Berdasarkan data potensi dari ketiga alat kaji P3D tersebut, maka setelah dikelompokkan berdasarkan kategori dan intensitas diidentifikasi, dapat disampaikan kategori potensi Desa LORULUN adalah sebagai berikut :

Kategori Potensi	Peta Sosial Desa	Kalender Musim	Diagram Kelembagaan	Total
Sumber daya alam	5	1	-	6
Sumber daya manusia	6	1	-	7
Sumber daya sosial	3	-	-	3
Sumber daya ekonomi	2	-	-	2
Sumberdaya pembangunan	9	-	-	9
Sumberdaya Kelembagaan	-	-	9	9

Dari data tersebut, maka kategori potensi yang dimiliki masyarakat Desa LORULUN paling banyak berturut-turut adalah sumber daya



Pembangunan (9 kali diidentifikasi), sumberdaya kelembagaan (9 kali), sumberdaya alam (6 kali), sumberdaya manusia (7 kali), sumberdaya sosial (3 kali) dan sumberdaya ekonomi (2 kali).

Data tersebut menjelaskan kebijakan pemanfaatan potensi Desa untuk pembangunan Desa LORULUN ada yaitu:

1. **prioritas pertama** adalah pemanfaatan dan optimalisasi fungsi sumberdaya pembangunan
2. **prioritas kedua** adalah pemanfaatan dan peningkatan peran kelembagaan masyarakat,
3. **prioritas ketiga** adalah pemanfaatan dan peningkatan partisipasi masyarakat, dan peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam
4. **prioritas keempat** pada pemanfaatan dan peningkatan sumberdaya sosial
5. **prioritas kelima** pada penggalian dan perluasan skala serta investasi potensi sumberdaya ekonomi masyarakat

4.4.3. Program Pembangunan Desa Lorulun

Strategi Pembangunan Desa Lorulun dirumuskan berdasarkan instrumen P3D (Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa)

Pendekatan perencanaan pembangunan ini memberi strategi pembangunan Desa LORULUN yang *partisipatif, transformatif* dan *pro poor* (berpihak pada pengentasan kemiskinan skala desa), sehingga memberikan modal legitimasi pembangunan yang kuat, arah perubahan Desa yang terukur serta mensejahterakan warga masyarakat Desa sesuai visi dan misi pemerintah Desa, yakni Terwujudnya Desa Lorulun yang Sejahtera, Berbudaya dan Berintelek.

Berdasarkan hasil pengkajian keadaan Desa, maka strategi pembangunan Desa Lorulun 2019-2024 adalah sebagai berikut :



1. Pembangunan Desa Lorulun mempertimbangkan arah, kebijakan dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang menetapkan Desa Lorulun sebagai salah satu bagian kawasan perdesaan dengan ciri khas sebagai salah satu sentra Produksi Perikanan dan Peternakan, salah satu sentra produksi pertanian.
2. Pembangunan Desa Lorulun mempertimbangkan peluang dan dampak dari rencana sistem perkotaan Kota Kecamatan sebagai pusat pemukiman tersier dimana pusat pelayanannya di tingkat lokal atau sekitar kawasan, dengan arahan pelayanan pusat secara khusus dan bersifat lokal, sebagai pusat pelayanan jasa, ekonomi dan pariwisata, dengan rencana hirarki skala pelayanan pada pusat perdagangan, jasa dan pemasaran, pusat perhubungan dan komunikasi pusat produksi pengolahan.
3. Pembangunan Desa Lorulun mempertimbangkan aspirasi kebutuhan masyarakat terkait peningkatan pelayanan dasar, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, peningkatan peran dan fungsi aparatur pemerintah Desa dan kelembagaan masyarakat serta peningkatan pendapatan masyarakat
4. Pembangunan Desa Lorulun mempertimbangkan optimalisasi fungsi modal sosial pada kerukunan dan kerja sama antar warga Desa, jaminan keamanan dan kesejahteraan sosial, peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan non formal masyarakat Desa, penyediaan akses pada modal usaha serta pembentukan lembaga ekonomi Desa serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Pembangunan Desa Lorulun mempertimbangkan skenario transformasi Desa LORULUN yakni : Desa Tertinggal menuju Desa



Berkembang pada tahun 2019; Desa Berkembang menuju desa Maju pada Desa 2021.

6. Pembangunan Desa Lorulun mempertimbangkan strategi pengentasan kemiskinan skala desa melalui : penyediaan kemudahan akses pendidikan kejuruan dan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus; pengelolaan pendidikan tambahan, sebagai upaya pelengkap pendidikan formal baik pendidikan anak usia dini maupun pendidikan keterampilan yang mendukung akses kebutuhan masyarakat, termasuk untuk anak usia sekolah yang putus sekolah maupun yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya; penyediaan kemudahan akses layanan dan penambahan jumlah tenaga kesehatan terutama dokter, dokter gigi, perawat dan tenaga kesehatan lainnya; peningkatan peran posyandu; penyediaan akses ke lahan pertanian, perkebunan baik untuk budidaya sampai pemasaran komoditi; penyediaan kemudahan akses dan jumlah layanan angkutan umum; pengelolaan limbah cair dan sampah skala Desa dan pengelolaan air bersih skala Desa.

Menuju LORULUN sebagai Desa Maju	2019-2020	2021-2022	2023-2024
<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 	-	Kemandirian aparatur pemerintah Desa dalam mengelola kewenangan dan urusan penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat Desa	-
<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Desa 	-	Pembangunan sarana dan prasarana umum dan sosial dasar	-



		baik pendidikan dan kesehatan masyarakat Desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat Desa	
<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Kemasyarakatan Desa 	-	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Desa	-
<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan Masyarakat Desa 	-	Peningkatan kuantitas dan kualitas kerja dan atau proses produksi sampai pemasaran produk serta pemenuhan kebutuhan dan atau akses modal	-



Menuju Desa Lorulun sebagai Desa Mandiri	2019-2020	2021-2022	2023-2024
• Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	-	-	Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan baik dan bersih
• Pembangunan Desa	-	-	perluasan ekonomi dan investasi Desa, termasuk prakarsa Desa dalam membuka lapangan kerja, pada teknologi tepat guna dan investasi lembaga ekonomi Desa
• Pembinaan Kemasyarakatan Desa	-	-	Kemandirian kelembagaan masyarakat dalam pengorganisasian potensi Desa untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa
• Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	-	pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan Desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat dimana Desa dapat menghidupi dirinya sendiri, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital Desa secara berkelanjutan

a. Indikator Capaian Kinerja

Berdasarkan strategi prioritas per tahapan pembangunan, maka indicator capaian keberhasilan yang akan digunakan adalah sebagai berikut:



Tahapan Pembangunan	Strategi Prioritas	Indikator Capaian
Menuju Lorulun sebagai Desa Maju	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 2. Peningkatan akses air minum yang layak bagi masyarakat 3. Peningkatan akses air bersih untuk mandi dan mencuci bagi masyarakat Desa 4. Peningkatan kepemilikan jamban keluarga masyarakat Desa 5. Peningkatan kualitas jalan Desa, jalan lingkungan maupun jalan kabupaten yang melintasi Desa 6. Penyediaan akses Sekolah Luar Biasa bagi kelompok berkebutuhan khusus 7. Pembentukan Taman Bacaan Masyarakat/Perpustakaan Desa 8. Peningkatan ketersediaan fasilitas olah raga masyarakat 9. Peningkatan akses ke pusat perdagangan 10. Penyediaan layanan perdagangan di pemukiman warga (warung dan mini-market) 11. Pengelolaan sampah berbasis Desa 12. Pengelolaan sumberdaya sungai yang berkelanjutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas serta dampak terhadap pelayanan pemerintah Desa 2. Rasio KK dengan akses air minum yang layak 3. Rasio KK dengan akses MCK yang layak 4. Rasio KK dengan jamban sehat 5. Pertumbuhan jalan Desa dan jalan lingkungan 6. Terlaksananya layanan SLB bagi penyandang kebutuhan 7. Tersedia dan berfungsi Taman bacaan/perpustakaan Desa 8. Jumlah ketersediaan fasilitas olah raga yang meningkat 9. Jumlah armada dan pengguna transportasi darat/laut 10. Jumlah warung dan kios Desa 11. Terlaksananya system pengelolaan sampah berskala Desa 12. Terlaksananya pengelolaan sumberdaya



	13. Revitalisasi fungsi kelembagaan masyarakat Desa	sungai yang berkelanjutan 13. Jumlah lembaga kemasyarakatan Desa yang direvitalisasi
Menuju Lorulun sebagai Desa Maju	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemandirian aparatur pemerintah Desa dalam mengelola kewenangan dan urusan penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat Desa 2. Pemberantasan Buta Aksara (baca, tulis dan hitung), 3. Pembentukan Kelompok PKBM/ Paket ABC 4. Penyediaan tenaga dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya 5. Peningkatan pelayanan Poskdes, Polindes dan Posyandu 6. Penyediaan dukungan penanganan KDRT dan Pasca trauma 7. Penyediaan ruang publik Desa 8. Peningkatan akses masyarakat Desa untuk layanan kredit 9. Penyediaan akses bantuan modal usaha dan pembentukan lembaga ekonomi 10. Penyediaan sistem pengelolaan konflik antar warga 11. Pengelolaan Sistem 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kewenangan dan urusan yang dapat dilaksanakan 2. Terlaksananya kegiatan Calistung tingkat Desa 3. Terbentuknya Pokja PKBM 4. Jumlah tenaga dokter, perawat dan teaga kesehatan tingkat Desa 5. Jumlah dan kualitas pelayanan Puskesmas dan poosyandu 6. Jumlah kasus KDRT dan pasca trauma yang selesai tertangani 7. Jumlah dan luas RTH Desa 8. Jumlah dan besar pemanfaat layanan kredit 9. Jumlah kelompok penerima bantuan modal dan besar bantuan modal usaha serta jumlah lembaga ekonomi Desa yang terbentuk 10. Ketersediaan system pengelolaan konflik antar warga 11. Terlaksananya sistem keamanan lingkungan Desa, 12. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Siskamling



	<p>Keamanan Lingkungan Desa</p> <p>12. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Siskamling</p> <p>13. Peningkatan kerja sama antar Desa</p> <p>14. Peningkatan kerukunan antar umat beragama</p> <p>15. Peningkatan kapasitas kelembagaan Desa</p>	<p>13. Jumlah dan cakupan kerja sama antar Desa</p> <p>14. Jumlah dan kegiatan bersama antar umat beragama</p> <p>15. Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas bagi kelembagaan Desa</p>
<p>Menuju Desa Lorulun sebagai Desa Mandiri</p>	<p>1. Tatakelola pemerintah Desa yang baik dan bersih</p> <p>2. Peningkatan kepesertaan jaminan sosial masyarakat desa</p> <p>3. Peningkatan dan pelestarian semangat gotong royong masyarakat</p> <p>4. Pelestarian bahasa lokal dan penguasaan bahasa asing</p> <p>5. Peningkatan pemanfaatan jaringan komunikasi selular</p> <p>6. Peningkatan pemanfaatan layanan televisi lokal, nasional dan asing</p> <p>7. Penyediaan layanan kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan</p> <p>8. Penyediaan layanan pos dan logistik</p> <p>9. Penyediaan pelayanan jasa pariwisata dan transportasi umum reguler</p>	<p>1. Penilaian kinerja pemerintah Desa dari BPD dan supra Desa</p> <p>2. Jumlah peserta jaminan sosial masyarakat</p> <p>3. Jumlah inisiatif kegiatan gotong royog masyarakat</p> <p>4. Jumlah warga masyarakat pengguna bahasa lokal dan penguasaan bahasa asing</p> <p>5. Jumlah pengguna jaringan komunikasi selular</p> <p>6. Jumlah bertambah pemanfaatan layanan TV</p> <p>7. Jumlah pemanfaatan kedai, restoran, hotel dan penginapan</p> <p>8. Ketersediaan layanan pos dan logistic</p> <p>9. Ketersediaan layanan jasa pariwisata dan transportasi umum regular</p>



	10. Penyediaan layanan perbankan (umum dan swasta) 11. Penyediaan layanan bank perkreditan rakyat 12. Pembentukan lembaga ekonomi rakyat (koperasi dan atau BUMDes) 13. Kemandirian lembaga kemasyarakatan Desa dalam pengorganisasian potensi Desa	10. Ketersediaan layanan perbankan (umum dan swasta) 11. Ketersediaan layanan bank perkreditan rakyat 12. Terbentuknya BUMDES 13. Jumlah kegiatan pengembangan potensi Desa yang dikelola lembaga kemasyarakatan Desa
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b . Prioritas Pembangunan per Bidang Kerja Pemerintah Desa

Berdasarkan arah dan kebijakan pembangunan Desa Lorulun yang *partisipatif, transformatif dan berpihak pada pengentasan kemiskinan Desa*, maka , pemerintah Desa Lorulun mengedepankan penentuan kegiatan pembangunan guna mencapai sasaran pembangunan Desa, yang diwujudkan dengan mempertegaskan keterkaitan yang erat antara prioritas, program dan kegiatan pokok dengan penganggarnya. Penentuan prioritas memuat fokus dan kegiatan-kegiatan prioritas yang jelas dan terukur (serta dilengkapi dengan perhitungan biaya yang jelas) sehingga dapat lebih mencerminkan pemecahan masalah terhadap sasaran pembangunan Desa Lorulun yang ditetapkan.

Oleh karena itu, prioritas program tahunan Desa Lorulun difokuskan pada :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pemerintah Desa
 - b. Program Pendataan Desa



- c. Program Pengelolaan Informasi Desa
 - d. Pengadaan Papan dan Buku Monografi Desa
 - e. Pembuatan Peta Desa
 - f. Program Kerja Sama Antar Desa
 - g. Program Peningkatan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Desa
 - h. Program Peningkatan kualitas penyusunan RPJMdes dan RKPdes
2. Bidang Pembangunan Desa :
- a. Program Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Desa khususnya jalan produksi, drainase lingkungan;
 - b. Program Pemanfaatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan khususnya air bersih skala desa, sanitasi lingkungan, pelayanan posyandu dan sarana prasarana Puskesmas Pembantu;
 - c. Program Pembangunan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan khususnya pelayanan pendidikan usia dini, anak berkebutuhan khusus, Rumah Pintar serta dukungan sarana prasarana Pendidikan Dasar Lorulun;
 - d. Program Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, sarana dan prasarana ekonomi khususnya di bidang, pertanian perkebunan dan keterampilan kelompok, dan sarana prasarana pendukung lainnya yang menciptakan dukungan perekonomian Desa;
 - e. Program Pelestarian Lingkungan Hidup, khususnya perlindungan mata air, perlindungan pantai dan terumbu karang serta peremajaan komoditas perkebunan.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa:



- a. Program Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa khususnya Tim Penggerak PKK, Kelompok Pemuda, dan kelompok kesenian dan budaya.
 - b. Program Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Desa khususnya penanganan dampak konsumsi miras, kenakalan remaja dan pergaulan bebas,
 - c. Program Pengadaan Sarana Prasarana Olahraga
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :
- a. Program Pelatihan Usaha khususnya di bidang pertanian, perkebunan dan ekonomi kreatif untuk mendukung pencapaian visi dan misi.
 - b. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD khususnya terkait pengelolaan kewenangan Desa, kualitas perencanaan Desa dan pengelolaan keuangan Desa
 - c. Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat khususnya kelompok ekonomi produktif, masyarakat miskin, pemuda dan perempuan.

Pelaksanaan program prioritas dari usulan masyarakat Desa Lorulun diatas merupakan pilihan terbaik dari pilihan-pilihan yang ada yang berdampak langsung pada pengentasan kemiskinan skala desa dan mendorong perubahan Desa Lorulun menuju Desa Mandiri dengan tambahan kriteria operasional dalam penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahunan, yaitu:

1. *Penajaman operasionalisasi pelaksanaan kegiatan* melalui Proposal Kegiatan, Desain dan RAB serta waktu pelaksanaan dengan target dan biaya pelaksanaan yang rasional dan akurat serta berfokus pada dampak;



2. *Identifikasi dan pengawalan kelompok penerima manfaat prioritas sebagai penerima manfaat dari usulan pembangunan masyarakat*
3. *Pengorganisasian masyarakat dan peningkatan peran kelembagaan Desa baik melalui peran pendamping profesional, pemerintah Desa dan kelompok peduli*
4. *Dukungan dan keterlibatan aparatur pemerintah Desa dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga terbangun pengendalian kegiatan yang berdampak hasil.*
5. *Peluang dan manfaat sinergitas dan harmonisasi program kemiskinan supra Desa untuk memberikan nilai tambah, dampak berkelanjutan (multiplier effect) dan semangat kolektif yang memperkuat posisi tawar (bargaining position)*
6. *Peluang dan manfaat kerja sama intra dan supra Desa dalam pengentasan kemiskinan atas prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.*

Berdasarkan pengkajian keadaan Desa Lorulun, maka program pembangunan Desa Lorulun selama 6 tahun dari Tahun 2019 sampai dengan 2024, antara lain :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

- a. Program Penataan Fungsi Aparatur Pemerintah Desa
- b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pemerintah Desa;
- c. Program Pendaya-gunaan Produk Hukum Desa
- d. Program Pendataan Desa;
- e. Program Pengelolaan Informasi Desa
- f. Program Peningkatan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Desa.



2. Bidang Pembangunan Desa:

- a. Program Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Desa, khususnya, drainase lingkungan, talud pantai, pemeliharaan dan pemugaran rumah rakyat dan pembangunan jaringan komunikasi;
- b. Program Pemanfaatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan, khususnya air bersih skala Desa, sanitasi lingkungan, pelayanan posyandu ;
- c. Program Pembangunan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya pelayanan pendidikan usia dini, serta dukungan sarana prasarana untuk PAUD;
- d. Program Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, sarana dan prasarana ekonomi khususnya di bidang perikanan, pertanian perkebunan dan keterampilan kelompok pemuda, dan sarana prasarana kelompok Nelayan;
- e. Program Pelestarian Lingkungan Hidup, khususnya penghijauan di pesisir pantai dan di dalam desa.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa:

- a. Program Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa khususnya Tim Penggerak PKK, Kelompok Pemuda, BPD dan PEMDES;
- b. Program Penyelenggaran Keamanan dan Ketertiban Desa khususnya penanganan dampak konsumsi miras, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), judi, kenakalan remaja dan pergaulan bebas;
- c. Program Pengadaan Sarana Prasarana Olahraga.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:



- a. Program Pelatihan Usaha khususnya di bidang pertanian, kelautan dan ekonomi kreatif untuk mendukung wisata bahari;
- b. Program Kampanye Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
- c. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Saniri khususnya terkait pengelolaan kewenangan Desa, kualitas perencanaan Desa dan pengelolaan keuangan Desa
- d. Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat khususnya kelompok ekonomi produktif, masyarakat miskin, nelayan, petani, pemuda dan perempuan.

Keseluruhan program tersebut akan di Desain berbentuk kegiatan yang selanjutnya akan dituangkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des) setiap tahunnya sesuai kondisi dan perkembangan akan kebutuhan masyarakat Desa Lorulun.



BAB VIII

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

8.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Lokasi	Volume		Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan					2019	2020	2021	2022	2023	2024	Jlh (Rp)	Sumber DANA	Swakelola		Kerjasama	
																	Antar Desa	Pihak III		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	1	Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa	12	bln	Aparatur Pemerintah Desa (Kades)	√	√	√	√	√	√	ADD	√				
		2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa	12	bln	Aparatur Pemerintah Desa (Perangkat Desa)	√	√	√	√	√	√	ADD	√				
		3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	12	bln	Aparatur Pemerintah Desa (Perangkat Desa)	√	√	√	√	√	√	ADD	√				
		4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut,	Desa	1	Pkt	Pemdes (RT,RW)	√	√	√	√	√	√	ADD	√				



			listrik/telpon, dll)														
5			Penyediaan Tunjangan BPD	Desa	12	bln	BPD	√	√	√	√	√	√		ADD	√	
6			Penyediaan Operasional BPD (ATK, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, listrik/telpon, dll)	Desa	1	Pkt	BPD		√						ADD	√	
7			Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa	12	bln	RT, RW	√	√	√	√	√	√		ADD	√	
8		Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	Desa	1	Pkt	Pemdes dan BPD	√	√	√	√	√	√		APBD II(ADD)	√	
9			Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa	1	Pkt	Pemdes dan Masyarakat	√	√	√	√	√	√		APBD II(ADD)	√	
10			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa	1	Pkt	Pemdes dan Masyarakat		√	√					APBD II(ADD)	√	
11			Pembangunan Mess desa	Desa	3	Ruangan	Tamu Desa						√		APBD II(ADD)	√	



12	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)	Desa	1	Pkt	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD II(ADD)	√			
13		Penyusunan/Pendaan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)	Desa	1	Pkt	Pemes dan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD II(ADD)	√		
14		Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Desa	1	Pkt	Pemdes	√	√	√	√	√	√	√	√	√	APBN(DDS)	√		
15		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Desa	1	Pkt	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD II(ADD)	√		
16		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa	1	Pkt	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD II(ADD)	√		
																	√		
17	Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pr a-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	Desa	1	Pkt	Pemdes, BPD, Dan lembaga lainnya serta masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	APBN(DD)	√		

RPJMDes 2019-2024



18	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	Desa	1	Pkt	Pemdes, BPD, Dan lembaga lainnya serta masyarakat	√	√	√	√	√	√		APBD II(ADD)	√		
19	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dll)	Desa	1	Pkt	Pemdes, BPD, Dan lembaga lainnya serta masyarakat	√	√	√	√	√	√		APBD II(ADD)	√		
20	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	Desa	1	Pkt	Pemdes, BPD, Dan lembaga lainnya serta masyarakat	√	√	√	√	√	√					
21	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Desa	1	Pkt	Pemdes, BPD, Dan lembaga lainnya serta masyarakat	√	√	√	√	√	√					
22	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes Tata Ruang, Perdes Pungutan Desa, Perdes dll)	Desa	1	Pkt	Pemdes, BPD, Dan lembaga lainnya serta masyarakat	√	√	√	√	√	√					
23	Pembentukan atau pemekaran Desa	Desa	1	Pkt	Desa					√	√					

RPJMDes 2019-2024



	29		Penyuluhan Pertanahan	Desa	1	Pkt	Masyarakat		√						APBD II(ADD)	√			
	30		Penentuan/Penega san/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa	Desa	1	Pkt	Desa					√			APBD II(ADD)	√			
Jumlah Per Bidang 1														-					



8.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

No					Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan				
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan				2019	2020	2021	2022	2023	2024	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama			
																	Antar Desa	Pihak III		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
2	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	Desa	1 paket	Pengurus PAUD/TK, Siswa-siswi PAUD/TK	√	√	√	√	√	√		DDS	√				
				Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	Desa	1 paket	Pengurus PAUD/TK, Siswa-siswi PAUD/TK	√	√	√	√	√	√		APBN/DDS	√				
				Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat dan anak putus sekolah	Desa	1 Paket	Anak-anak Putus Sekolah		√	√	√	√	√		APBD II	√				
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	Desa	1 paket	Masyarakat		√	√	√	√	√		APBD	√				



5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK Non-Formal Milik Desa	Desa	1	Paket	Pengurus PAUD/TK, Siswa-siswi PAUD/TK	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	APBN/DDS	√		
7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**	Desa	1	Paket	Masyarakat												APBN/DDS	√		
8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)	Desa	1	Paket	Masyarakat												DDS	√		
9	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar milik Desa	Desa	1	Paket	Sanggar Seni Desa												DDS	√		
10	Pengadaan Bus Sekolah	Desa	1	buah	Siswa-siswi SMA												APBD II			√
11	Pembangunan atau Penambahan Ruang Belajar	SMA	2	Ruangan	Siswa-siswi SMA												APBD I			√
12	Pengadaan Internet dan Fasilitas	SD, SMP	2	Paket	Siswa-siswi SD dan SMP												APBD II			√



			Pendukung lainnya di sekolah															
		13	Kursus Bahasa Inggris untuk anak sekolah dan kaum muda	Desa	1	paket	Siswa-Siswi SD-SMA	√	√	√	√	√						
		14	Dukungan Pendidikan bagi Mahasiswa Tingkat Akhir		1	paket	Mahasiswa	√	√	√	√	√						
		15	Dukungan Pendidikan bagi Siswa-siswi Berprestasi	Desa	1	paket	Siswa-siswi Berprestasi	√	√	√	√	√		APBN/DDS	√			
		16	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Desa	1	Paket	Kader Posyandu, Masyarakat	√	√	√	√	√		APBN/DDS	√			
		17	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	Desa	1	Paket	Kader Posyandu, Masyarakat	√	√	√	√	√		APBN/DDS	√			
		18	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa	1	Paket	Bayi dan Balita	√	√	√	√	√		APBN/DDS	√			



19	Pemerintahan	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Desa							√	√	√		APBN/DDS	√				
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu	Desa	1	Unit	Masyarakat				√					APBN/DDS	√			
	21	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Desa	Desa	± 1600	M	Masyarakat	√	√	√	√	√	√		APBN/DDS	√			
			Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Desa	± 500	M	Masyarakat				√	√				APBN/DDS	√		
			Pembangunan Jalan Usaha Tani	Desa			Masyarakat				√	√	√			APBD II/DDS	√		√
			Pembangunan Jembatan Milik Desa	RT 1	1	buah	Masyarakat				√					APBN/DDS	√		
			Pembangunan Talud Penahan Ombak (Break Water)	Desa	1300	M	Masyarakat				√	√	√			APBN/DDS	√		√
			Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase,	Desa				Masyarakat	√	√	√	√	√	√			APBN/DDS	√	



			Prasarana Jalan lain)															
	27		Pemeliharaan Gedung/Prasara a Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Desa	1	Unit	Pemdes, BPD, Lembaga lainnya dan Masyarakat					√	√				APBN/DDS	√
	28		Pembukaan Lahan Baru untuk Tempat Pemakaman Umum Milik Desa	Desa	1	Paket	Masyarakat						√	√			DDS	√
	29		Pemeliharaan Embung Milik Desa	Desa	1	Unit							√	√			APBN/DDS	√
	30	Kawasan Permukiman	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Re hab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa	± 1 5 0	unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√					
	31		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air)	Desa	4	Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√					
	32		Pengadaan Sarana Prasaran Air Bersih di desa (pipanisasi, dll)	Desa	1	Paket	Masyarakat		√	√								



			Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Desa	1	Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√				
	34		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban /MCK	Desa			Masyarakat	√	√	√	√	√	√				
	35		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah dan insentif petugas sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**	Desa	9	Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√				
	36	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Hutan Milik Desa	Desa	1	paket	Masyarakat			√			√				
	37		Pengelolaan/konservasi Lingkungan Hidup Desa	Desa	1	paket	Masyarakat		√	√	√	√	√				
	38		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Desa	1	paket	Masyarakat		√	√	√	√	√				



	39	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	Desa	1	paket	Masyarakat	√				√							
	40		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	Desa	1	paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√					
	41	Pariwisata	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Desa	1	paket	Masyarakat	√	√										
Jumlah Per Bidang II													-						



8.2. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan				2019	2020	2021	2022	2023	2024	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	1	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol di)	Desa	Ls	Linmas	√	√	√	√	√	√		APBD/ADD	√			
		2		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	Desa	Ls	Linmas				√					APBD/ADD	√		
		3		Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah)	Desa	Ls	Linmas	√	√	√	√	√	√			APBD/ADD	√		



			daerah, dll) Skala Lokal Desa														
	4		Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Desa	Ls	Masyarakat			√	√				APBD/ADD	√		
	5		Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat	Desa	Ls	Masyarakat	√	√	√	√	√	√		APBD/ADD	√		
	6		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	Desa	Ls	Masyarakat	√	√	√	√	√	√		APBD/ADD	√		
	7	Kebudayaan dan Keagamaan	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Desa	Ls	Sanggar Seni dan Budaya	√	√	√	√	√	√		APBD/ADD	√		
	8		Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Desa	Ls	Masyarakat	√	√	√	√	√	√		APBD/ADD	√		
	9		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan	Desa	Ls	Masyarakat	√	√	√	√	√	√		APBD/ADD	√		



		Kepemudaan dan Olah Raga	(perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa																	
			10	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	Desa	Ls	Masyarakat	√					√			APBD/ADD	√			
			11	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Desa	Ls	Pemuda	√	√	√	√	√	√			APBD/ADD	√			
			12	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa	Desa	Ls	Pemuda	√	√	√	√	√	√			APBD/ADD	√			
13	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	Desa	Ls	Pemuda	√	√	√	√	√	√			APBD/ADD	√						

RPJMDes 2019-2024



			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	Desa	Ls	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD/ADD	√			
	14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	Desa	Ls	Masyarakat		√								APBD/ADD	√			
	15		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	Desa	Ls	Anak-anak Berbakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD/ADD	√			
	16	Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan Lembaga Adat	Desa	Ls	Lembaga Adat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD/ADD	√			
	17		Pembinaan LKMD/LPM/LPM D	Desa	Ls	LKMD, LPMD, LPM	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD/ADD	√		
	18		Pembinaan PKK	Desa	Ls	Pengurus PKK	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD/ADD	√		
	19		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa	Ls	Lembaga Kemasyarakatan lainnya	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD/ADD	√		
Jumlah Per Bidang III															-					



8.4. Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Lokasi	Volume	Sasaran / Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan				2019	2020	2021	2022	2023	2024	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama	
																	Antar Desa	Pihak III
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1	Kelautan dan Perikanan	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Nelayan(Nelayan Pancing, Nelayan Panah dan Nelayan Jaring)	Desa	Ls	Nelayan	√							APBN/DDS	√		
		2		Bantuan Perikanan (Pengadaan Saprass Perikanan)untuk Nelayan Pancing, Nelayan Panah dan Nelayan Jaring	Desa	Ls	Nelayan		√		√			APBN/DDS	√			
		3	Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, Kacang, bawang, sayur dll)	Desa	Ls	Petani	√	√	√	√	√	√		APBN/DDS	√		



		4	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)	Desa	Ls	Peternak	√	√	√	√	√	√	√	√	√	APBN/DDS	√			
				5	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Desa	Ls	Petani dan Peternak	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	APBN/DDS	√
		6	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan kapasitas kepala Desa	Desa	Ls	Kepala Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	APBN/DDS			
		7		Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Desa	Ls	Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	APBN/DDS			
		8		Peningkatan kapasitas BPD	Desa	Ls	BPD	√	√	√	√	√	√	√	√	√	APBN/DDS			
		9																		
		10	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa	Ls	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	APBN/DDS			
		11		Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa	Ls	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	APBN/DDS			
		12		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	Desa	Ls	Kaum Difabel		√		√		√				APBN/DDS			



	13	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	Desa	Ls	Pelaku UMKM	√	√	√		APBN/DDS				
	14		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	Desa	Ls	Pelaku UMKM	√	√	√	√	√	APBN/DDS			
	15		Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian	Desa	Ls	Pelaku Ekonomi Non Pertanian	√	√	√			APBN/DDS			
	16	Dukungan Penanaman Modal	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	Desa	Ls	BUMDES	√	√	√	√	√	APBN/DD S			
	17		Penyertaan Modal Bumdes	Desa	Ls	BUMDES	√	√	√	√	√	APBN/DDS			
	18		Pembangunan Gedung Bumdes	Desa	Ls	BUMDES		√	√			APBN/DDS			
	19	Perdagangan dan Perindustrian	Pembentukan/Fasili tasi/Pelatihan/Pend ampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, perbengkelan dll) **	Desa	Ls	Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	√	√	√	√	√	APBN/DD S			
	Jumlah Per Bidang IV											-			



JUMLAH TOTAL

-

Mengetahui :
Kepala Desa

Lorulun, 2019
Disusun oleh:
Tim Penyelarasan RPJM Desa

JOHANIS BWARLELING

MOSES SAMPONU



BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Lorulun Tahun 2019-2024 disusun sebagai pedoman penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lorulun dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desaselama 6 tahun kedepan.

Penyusunan RPJMDes ini juga dapat menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan Desa Lorulun dalam mengelola kepentingan bersama dalam desa, lintas desa dan antar kawasan, serta terpadu dan searah dengan pembangunan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Lorulun Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2019 – 2024 ditentukan oleh dukungan yang utuh seluruh aparatur Desa, BPD, kelembagaan sosial masyarakat dan masyarakat Desa Lorulun, termasuk pemanfaatan peluang kerjasama baik dengan kalangan perguruan tinggi dan dunia usaha demi kesejahteraan dan kemajuan Desa Lorulun menuju Masyarakat Desa lorulun dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Lebih Baik.

Lampiran 1

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA YANG MASUK KE DESA

DESA : LORULUN
 KECAMATAN : WER TAMRIAN
 KABUPATEN : KEPULAUAN TANIMBAR
 PROVINSI : MALUKU

No	Asal Program/ Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Prakiraan Pagu Dana (Rp.)	Prakiraan Pelaksana
1	Dari Pemerintah Pusat			
2	Dari Pemerintah Daerah Provinsi			
3	Dari Pemerintah Daerah Kabupaten			
4	Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD Kabupaten/ Kota			

Desa Lorulun, 30 April 2019
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

MOSES SAMPONU

Lampiran 3

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DESA : LORULUN
 KECAMATAN : WER TAMRIAN
 KABUPATEN : KEPULAUAN TANIMBAR
 PROVINSI : MALUKU

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	964	orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	1022	orang
	c. Jumlah keluarga	520	KK
	d. Jumlah keluarga Miskin	130	KK
2	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Perikanan, perkebunan	33/100	KK
	b. Pertukangan/kuli bangunan	44/44	KK
	c. Pertanian	831	Orang
	d. Pedagang kecil	32	KK
	e. Jasa		KK
	f. PNS/TNI/POLRI	68	KK
	g. Karyawan/Wiraswasta	53	KK
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan S-1 keatas	69	orang
	b. Lulusan SMA/SMK	449	orang
	c. Lulusan SMP	245	orang
	d. Lulusan SD	195	orang
	e. Belum - Tidak tamat SD/ tidak sekolah		orang
4	Tingkat Kesejahteraan		
	Prasejahtera		KK
	Prasejahtera I		KK
	Prasejahtera II		KK
	Prasejahtera III		KK
	Prasejahtera III Plus		KK

Mengetahui
 Kepala Desa Lorulun

Lorulun, 9 April 2019
 Ketua Tim Penyelarasan RPJM Desa

YOHANES BWARLELING

MOSES SAMPONU

Lampiran 4

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DESA : LORULUN
 KECAMATAN : WER TAMRIAN
 KABUPATEN : KEPULAUAN TANIMBAR
 PROVINSI : MALUKU

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset prasarana umum		
	a. Jalan Provinsi	3300	km
	b. Jembatan	3	unit
	c. Deke	10	unit
2	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung Paud		unit
	b. Gedung TK	1	unit
	c. Gedung SD	2	unit
	d. Gedung SLTP	1	unit
	d. Gedung SLTA	1	unit
3	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu		unit
	b. Puskesmas pembantu	1	unit
	c. MCK Umum		unit
	d. Sarana Air Bersih	2	unit
4	Aset prasarana ekonomi		
	a. Pasar desa	1	
	b. Tempat Pelelangan Ikan		
	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok nelayan	3	klp
	b. Jumlah kelompok usaha yang sehat		klp
5	Aset berupa modal		
	a. Total aset produktif		
	b. Total pinjaman di masyarakat		
6	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah Usaha		Org
	b. Jumlah kelompok usaha Peternakan		Klp
7	Aset berupa modal		
	a. Total aset produktif		
	b. Total pinjaman di masyarakat		

Mengetahui
Kepala Desa

Lorulun, 9 April 2019
Ketua Tim Penyelarasan RPJM

YOHANES BWARLELING

MOSES SAMPONU

DAFTAR MASALAH, POTENSI & ALTERNATIF TINDAKAN DARI ALAT KAJI : SKETSA DESA

No	Masalah	Potensi	Alternatif Tindakan	
1	Sebagian rumah masyarakat yang tidak layak huni	Masyarakat, Batu, Pasir dan Tenaga Kerja	-	Perbaikan atau rehab Rumah Tidak Layak Huni
			-	Pembangunan kembali dari awal Rumah Tidak Layak Huni
2	Tidak ada tempat belajar PAUD	Ada Siswa, ada Guru, Batu, Pasir, Tenaga Kerja dan Kayu	-	Pembangunan 1 Unit Gedung PAUD
				Pembuatan Pagar PAUD
			-	Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD
3	Belum ada gedung Posyandu	Ada Kader, Batu, Pasir dan Tenaga Kerja	-	Pembangunan Gedung Posyandu
4	Belum ada Pagar Posyandu	Ada Kader, Batu, Pasir dan Tenaga Kerja	-	Pembuatan Pagar Posyandu
			-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu
5	Belum Ada Mess Desa	Ada Kader, Batu, Pasir dan Tenaga Kerja	-	Pembangunan Mess Desa
6	Belum Adanya Kantor Desa Yang Baru	Ada Pemdes, Timbunan Tanah Putih, batu, pasir, T.Kerja, lokasi dan kayu	-	Pembangunan Gedung Kantor Desa
			-	Pembuatan Pagar Kantor Desa
			-	Pembuatan Papan Nama Kantor Desa
7	Belum adanya wadah perekonomian desa yang dapat menyediakan akses modal usaha & pengelolaan kegiatan usaha ekonomi produktif yang layak dikembangkan didesa	Kelompok usaha, dukungan pemdes, masyarakat pemanfaat	-	Pembentukan dan pengembangan BUMDes
			-	Penguatan Permodalan BUMDes
			-	Pembangunan Gedung BUMDes
8	Belum Ada Gudang Desa	Ada batu, Pasir, Tenaga Kerja		Pembangunan gudang
9	Rumah Mesin Listrik	Ada Teknisi, Batu, Pasir, tenaga Kerja	-	Pemberian modal usaha
10	Balai Desa yang sudah rapuh dan rusak	Ada batu, pasir, T.Kerja, lokasi dan kayu	-	Renovasi Gedung Balai Desa
			-	Pembangunan Pagar balai Desa
11	Belum adanya Jalan Rabat Beton (di sebagian jalan desa)	Batu, pasir dan Tenaga Kerja	-	Pembuatan dan pengecoran Jalan Rabat Beton
			-	
12	Sebagian Bayi dan Balita tidak Sehat dan Kurang Gizi	POSKESDES dan Kader Posyandu	-	Pemberian Makanan Tambahan Secara Rutin
			-	Pemberian Imunisasi Lengkap bagi Bayi dan Balita
			-	Pemberian Vitamin A, B dan C secara rutin

13	Ruang TK yang Tidak memadai	Batu, Pasir dan Tenaga Kerja		Penambahan volume gedung
			-	Renovasi gedung TK
14	Tidak ada Rumah Guru	Kayu, Batu, Pasir dan Tenaga Kerja	-	Pembangunan Rumah Guru
		Kayu, Batu, Pasir dan Tenaga Kerja	-	Rehab Rumah Guru
15	Sering terjadi Abrasi Pantai	Tenaga Kerja, Batu dan Pasir	-	Pembangunan Talud Pantai dan Kali
16	Ruang Perpustakaan yang sudah rusak	Tenaga Kerja, Batu dan Pasir	-	Renovasi gedung Perpustakaan
17	Gedung PKK Belum Ada	Kader Ada, Tenaga Kerja, Batu dan Pasir	-	Pembangunan Gedung PKK
18	Gapura Desa Belum ada	Tenaga Kerja, Batu dan Pasir		Pembangunan Gapura Desa
19	Gedung SD sudah rusak	Kayu, Batu, Pasir dan Tenaga Kerja	-	Rehab Gedung SD
20	Gedung SD sudah rusak	Kayu, Batu, Pasir dan Tenaga Kerja	-	Pembuatan Pagar SD
21	Belum Adanya Pagar Desa	Kayu, Batu, Pasir dan Tenaga Kerja	-	Pembangunan Pagar Desa
22	Belum Adanya Tanda Batas Desa	Kayu, Batu, Pasir dan Tenaga Kerja	-	Pembangunan Patok Beton
23	Penerangan tidak maksimal	Ada PLN, Ada Matahari	-	Pengadaan Sarana dan prasarana listrik Desa
			-	Pengadaan Solar cell
24	Air Bersih belum maksimal	Tenaga Kerja, Batu dan Pasir	-	Pengadaan jaringan Air/Pipanisasi
25	Saluran air yang belum maksimal	Tenaga Kerja, Batu dan Pasir	-	Pembuatan Drainase
26	Tranportasi desa belum ada	Pemdes, Masyarakat	-	Pengadaan mobil Desa
27	Sarana pembuangan sampah dan Sanitasi yang belum baik	Pemdes, Masyarakat	-	Pengadaan Bak sampah
28	Sarana pembuangan sampah dan Sanitasi yang belum baik	Pemdes, Masyarakat	-	Pengadaan Transportasi sampah
			-	Pengadaan Mobil/Gerobak sampah
29	Belum Adanya Gudang Desa	Kayu, Batu, Pasir dan Tenaga Kerja	-	Pembangunan Gudang Desa
30	Belum Adanya Tugu Desa	Tenaga Kerja, Batu dan Pasir	-	Pembangunan Tugu Desa

31	Belum Adanya jembatan penghubung	Pemdes, Masyarakat,batu, pasir dan tenag kerja	-	Pembangunan Jembatan
32	Lahan Pertanian yang selalu di tumbuh Rumput	Jambu, Kelapa dan ..	-	Pengadaan Mesin Potong Rumput
33	Armada tangkap yang terbatas untuk nelayan	Kelompok Nelayan	-	Pengadaan Ketinting, bagan dan Alat Tangkap
34	Masyarakat ada yang masih buang air sembarangan	Tenaga Kerja, Batu dan Pasir	-	Pembangunan Jamban/MCK di Desa
35	Masyarakat Belum mendapat bantuan bibit tanaman umur panjang	Ada Petani, ada Lahan dan air	-	Pengadaan Kelapa Hibrida
			-	pengadaan bibit jambu mente
			-	Pengadaan anakan coklat
36	Masyarakat Belum mendapat bantuan bibit tanaman	Ada Petani, ada Lahan	-	Pengadaan bibit Padi Merah
			-	Pengadaan bibit Kacang-kacangan
			-	Pengadaan bibit sayur-sayuran
37	Belum adanya Sarana Operasional Kantor	Pemerintah Desa	-	Pengadaan Laptop
			-	Pengadaan Print
38	Masyarakat Belum mendapat bantuan bibit ternak	Ada Peternak	-	Pengadaan bibit
			-	Pengadaan bibit sapi
39	Masyarakat Belum mendapat bantuan bibit ternak	Ada Peternak	-	Pengadaan bibit kambing benggala
			-	Pengadaan bibit ayam petelur, ayam potong, ayam kampung dan pakan Ayam
40	Belum Ada rumah Jabatan Kades	Pemdes, Masyarakat,batu, pasir dan tenag kerja	-	Pembangunan rumah jabatan Kades
41	Belum Adanya SORGA Desa	Kelompok Olahraga, Lokasi, Pasir, Batu dan Kayu	-	Pembangunan Lapangan Volly dan Lapangan Futsal
42	Sarana dan Prasarana Perikanan belum ada	Ada Nelayan	-	Pengadaan sarana dan prasarana perikanan
43	Belum ada obat-obatan untuk peternakan dan pertanian	Ada petani dan peternak	-	Pengadaan obat-obatan
44	Siswa belum mendapat bantuan	Ada siswa	-	Pemberian bantuan beasiswa
45	Hasil Hutan Yang Belum Dikelola dengan baik	Ada kayu, rotan, bambu, dll	-	Pendirian usaha kerajinan/mebel
46	adanya Internet tetapi tidak maksimal	lokasi, Siswa, Pemdes, Pegawai	-	Perbaikan jaringan Internet Desa

DAFTAR MASALAH, POTENSI & ALTERNATIF TINDAKAN DARI ALAT KAJI : KALENDER MUSIM

No	Masalah	Potensi	Alternatif Tindakan
1	Hasil produksi menurun	Batu, Pasir, Tenaga Kerja, dukungan Petani	- Perpipaan air bersih
			- Pembuatan bendungan Mini (Embung)
			- Pembuatan sumur gali masyarakat
2	Banyak warga terserang penyakit Malaria/diare	Poskesdes dan Pemdes	- Pembuatan Pos Bimbingan Terpadu (BINDU)
			- Peyemprotan Nyamuk Malaria
			- Pengadaan kelambu buat Masyarakat
3	Terjadi genangan air pada rumah masyarakat	Ada lokasi, batu, pasir, tenaga kerja	- Pembangunan Drainase di desa
			- Penimbunan halaman rumah warga
4	Terjadi penyumbatan pada Saluran Air, sehingga air mengalir tidak normal	Ada lokasi, batu, pasir, tenaga kerja	- Penambahan Volume Drainase
			- Menurunkan Elavasi Drainase
5	Pada musim hujan terjadi pengikisan pada tebing dan Pantai	Ada lokasi, batu, pasir, tenaga kerja	- Pembuatan Talud Penahan Tanah (TPT)
			- Pembuatan Break Water
6	Kebakaran Lahan	Ada petani, Ada Pemdes	- Penyuluhan tentang Dampak Kebakaran Hutan

DAFTAR MASALAH, POTENSI & ALTERNATIF TINDAKAN DARI ALAT KAJI : DIAGRAM KELEMBAGAAN

No	Lembaga	Masalah	Potensi	Alternatif Tindakan
1	Tempat pelayanan Posyandu tidak	- Belum Memadainya Saprass pendukung kegiatan PEMDES	Ada SK Perangkat, lokasi kantor, SDM yg mau bekerja	- Rehab & pengadaan saprass kantor & balai desa
		- PEMDES belum sepenuhnya melaksanakan Tupoksinya		- Diklat & Studi Banding bagi Kepala desa & perangkatnya
		- Rendahnya alokasi dana untuk kesejahteraan PEMDES		- Penyediaan dana kesejahteraan & operasional PEMDES
2	BPD	- Belum Memadainya Saprass pendukung kegiatan BPD	Ada SK BPD, lokasi kantor, SDM yg mau bekerja	- Rehabilitasi & pengadaan saprass kantor BPD
		- BPD belum sepenuhnya melaksanakan Tupoksinya		- Diklat & Studi Banding bagi Pengurus BPD
		- Rendahnya alokasi dana untuk kesejahteraan BPD		- Penyediaan dana kesejahteraan & operasional BPD
3	Lembaga Adat tidak Maksimal	- Kegiatan Kelompok tidak jalan karena kurangnya kesadaran dari anggota kelompok	Ada SK, Ada Sumber Informan & Ada Tenaga	- Penyusunan aturan, tata kelola & mekanisme kerja pengurus Adat
		- kurang ada dukungan modal dan bantuan alat terkungan dan alat		- Penyediaan insentif & operasional pengurus Adat
4	Karang Taruna tidak aktif	- Belum Memadainya Saprass pendukung Dewan Adat	Ada SK Dewan Adat, SDM yg mau bekerja	- Rehabilitasi & pengadaan saprass kantor LPM
		- Dewan Adat belum sepenuhnya melaksanakan Tupoksinya		- Pelatihan bagi Pengurus Dewan
		- Rendahnya alokasi dana untuk kesejahteraan Dewan Adat		- Penyediaan dana kesejahteraan & operasional LPM
5	PKK tidak berperan aktif	- Belum Memadainya Saprass pendukung kegiatan PKK	Ada Pengurus, ada Pokja, ada Dasa wisma	- Rehabilitasi & pengadaan saprass sanggar PKK
		- PKK belum sepenuhnya melaksanakan Tupoksinya		- Pelatihan bagi Pengurus PKK
		- Rendahnya alokasi dana untuk kesejahteraan PKK		- Penyediaan dana kesejahteraan & operasional PKK
6	Linmas	- Linmas belum bekerja maksimal	Ada SK pengurus	- Pelatihan dan Pendidikan Linmas
7	Dewan Gereja dan Pemuda Gereja	- Pengurus belum sepenuhnya melaksanakan Tupoksinya	Ada SK pengurus	- Pelatihan bagi Pengurus OMK dan Pengurus Dewan Gereja
		- Rendahnya alokasi dana untuk kesejahteraan Pengurus	Ada SK pengurus	- Penyediaan dana kesejahteraan & operasional K. Taruna
8	Tempat pelayanan Posyandu tidak Tepat	- Belum ada Posyandu Tetap	Ada Pemdes, kader, ada batu, pasir, tenaga kerja	- Pembangunan Posyandu
9	Karang Taruna tidak aktif	- Pengurus belum sepenuhnya melaksanakan Tupoksinya	Ada Karang Taruna, ada Pemuda, Perempuan ada SDM	- Pembentukan Pengurus baru

10	Kelompok Pertanian berjalan tidak maksimal		kurangnya Peningkatan Kapasitas kepada Kel.tani	Ada Kelompok Tani	-	Pelatihan kepada kelompok tani
			Kurangnya sarana pendukung		-	Pengadaan sarana Pendukung
11	Kelompok Nelayan berjalan tidak maksimal		Bantuan tidak tepat sasaran atau tidak sesuai kebutuhan nelayan	Ada Kelompok Nelayan		Pengadaan bantuan sesuai kebutuhan
12	PBM di SMA tidak efektif		Kurang ruang belajar (2 Ruang)	Ada Pemda,Pemdes,	-	Koordinai dengan Pemda
			kurangnya Guru Matpel (6 Orang)		-	Pembangunan Ruang belajar
						Pengadaan Guru
13	Siswa kesulitan mengakses Internet (SMP dan SD)		Tidak ada Komputer di sekolah SMP dan SD	Ada guru/siswa	-	Pengadaan komputer
14	Kenadiran Siswa di sekolah (SMA) terlambat		Transportasi Publik (Bus) sekolah tidak ada	Ada Pemda,Pemdes,	-	Pengadaan Bus sekolah
15	Aktifitas belajar di PAUD tidak efektif		tidak ada gedung	Ada Pemdes ada batu,pair,tenaga kerja		Pembangunan gedung PAUD
16	Belum adanya TK Negeri		Biaya Pendidikan di TK Yayasan Tinggi/mahal	Ada lahan,Tutor ada Pemdes, batu,pair,tenaga kerja		Pembangunan TK Negeri
17	Perkembangan binatang(sapi) di sekitar lingkungan sekoalh (Belum ada Pagar sekolah	Ada Pemda,Pemdes, ada batu,pair,tenaga kerja		Pembangunan Pagar
18	Siswa SMP buang air sembarangan		MCK rusak/tidak ada	Ada Pemda,Pemdes, ada batu,pair,tenaga kerja		Pembangunan MCK
19	tidak berjalan dengan baik		Belum adanya Insentif bagi Pengelola Perpustakaan	Ada Pengurus Perpustakaan Desa		Pemberian insentif
20	Bumdes macet		Management dan Pengawasan kurang baik	Ada Pemdes dan Ada Pengurus		Pelatihan kepada pengurus.
21	LKMD macet		Pengurus belum sepenuhnya melaksanakan Tupoksinya, ada yang malas-malasan	Ada Pemdes,Pengurus		Pelatihan kepada pengurus.
22	Linmas berjalan tidak maksimal		Anggota tidak aktif	Ada Pemdes,Pengurus		Pembinaan
23	Pengurus RT berjalan tidak maksimal		Insentif tidak memadai	Ada Pemdes,Pengurus RT		Perbaiki insentif

24	Pemerintah Desa berjalan kurang maksimal		Ada camat,Kades	Tupoksi tidak Jelas		Peningkatan Kapasitas dan Studi Banding
25	Kelompok usaha kecil Perbenkelan berjalan kurang lancar		Tidak mendapat Pelatihan dan bantuan	Ada Pemdes, Ada Kelompok		Pelatihan Kelompok
						Pemberian Bantuan Saprass Pendukung
26	Kelompok usaha kecil Pertukangan berjalan kurang lancar		Tidak mendapat Pelatihan dan bantuan	Ada Pemdes, Ada Kelompok		Pelatihan Kelompok
						Pemberian Bantuan Saprass Pendukung
27	Kelompok tenun berjalan tidak maksimal		Alat tenun tidak lengkap	Ada Pemdes, Ada Kelompok		Pengadaan alat tenun

PENGELOMPOKAN MASALAH

NO	BIDANG	MASALAH	POTENSI	SUB BIDANG
1	PENYELENGGARAAN	1 Kantor desa/Mes	Ada Pemdes,batu,pasir,tenaga kerja	Sarana Prasarana
	PEMERINTAHAN DESA	2 Balai Pertemuan sudah rapu dan tidak kuat	Ada Pemdes, batu,pasir,tenaga kerja	Sarana Prasarana
			masyarakat	
		3 Tempat pemakamam Umum tidak layak(TPU)	Ada lahan,batu,pasir,kayu,	Kawasan Pemukiman
			Tanaga kerja	
		4 Batas wilaya desa yang belum jelas	Ada Pemdes	
		5 Belum ada regulasi yang mengatur tentang	Ada regulasi	Tatap Praja Pemerintahan
		6 pentingnya dokumen kependudukan		Pencatatan sipil,Statestik dan
				Kearsipan
		7 Adminitrasi desa belum terkafer dengan baik	Ada Pemdes,	Adminitrasi Kependudukan,
		8 Pengarsipan yang belum teratur	Ada Pemdes	Pencatatan sipil,Statestik dan
				Kearsipan
		9 Desa tidak memiliki data kependudukan	Ada Pemdes,masyarakat	Adminitrasi Kependudukan,
		yang jelas dan terupdate		Pencatatan sipil,Statestik dan
		10 Infentaris desa belum tertata dengan baik		Kearsipan
		aset desa		perencanaan ,keuangan,laporan
		11 Penggalian aspirasi dari keterwakilan belum	Ada masyarakat,ada Pemdes	
		menjadi kebutuhan masyarakat dengan baik		
		12 Akses internet desa belum maksimal	Ada Internet desa	Tatap Praja Pemerintahan
		13 Sebagian masyarakat belum memiliki	Ada Pemdes,ada lahan	
		sertifikat		
		14 Pencemaran udara	Ada lahan	
		15 Tidak ada perencanaan pengembangan desa	Ada lahan ,ada pemdes	Kawasan Pemukiman
			Tanaga kerja	
		16 BPD berjalan tidak maksimal	Ada BPD	
2	PELAKSANAAN	1 Mayarakat yang tinggal di pinggiran	Ada Pemdes,batu,pair	Pemukiman
	PEMBANGUNAN DESA	sungai tidak nyaman	dan tenaga kerja	
		2 Kekurangan air bersi pada musim kemarau	ada sumber air,batu,pasir	Pemukiman
			dan tenaga kerja	
		3 Perumahan warga tergenang air	ada batu,pair,tenaga kerja	Pemukiman
		4 Musim hujan terjadi pecek pada	ada batu,pair,tenaga kerja	Pekerjaan umum dan
		beberapa rumah		Penataan ruang
		5 Terjadi pengikisan pantai (abrasi)	ada batu,pair,tenaga kerja	Kawasan Pemukiman

2	PELAKSANAAN	6	Sebagian rumah warga yang tidak layak huni	Ada batu,pasir,kayu,tenaga kerja	Kawasan Pemukiman
	PEMBANGUNAN DESA				
		7	Banyak warga yang masi buang air sebarangan	ada batu,pair,tenaga kerja	Kawasan Pemukiman
		8	Tempat pelayanan pos yantu tidak tetap	Ada lahan,batu,pasir,tenaga kerja	Kesehatan
		9	lambatnya pelayanan medikal	Ada lahan,	kesehatan
		10	Aktifitas belajar Paud tidak efektif	Ada siswa ,guru	Pendidikan
		11	Sarana Prasaarana Paud tidak memadai		
		12	Biaya pendidikan dasar tinggi (TK)	Ada Pemdes,Guru , lahan	Pendidikan
		13	Proses belajar mengajar di SMA tidak efektif	Ada lahan ,guru,siswa	Pendidikan
		14	Kehadiran siswa SMA di sekolah terlambat setiap hari	Ada Pemdes,ada Pemda	Pendidikan
		15	Siswa SD,SMP kesulitan mengakses Internet	Ada Siswa ,ada guru	Pendidikan
		16	Perpustakaan milik desa tiadak beroperasi denagn baik	Ada Pemdes,ada pengelola	Pendidikan
		17	Berkeliaran binatang di areal sekolah SMP	Ada Pemda,Pemdes batu,pasir dll.	Pendidikan
		18	Siswa SMP masi buang air sembarangan	Ada batu,pasir,tenaga kerja	Pendidikan
		19	Kurangnya perhatian kepada siswa berprestasi	Ada pemdes	Pendidikan
		20	Mahasiswa tingkat akhir kesulitan biaya	Ada Pendes,ada mahasiswa	Pendidikan
		21	Kemampuan ketrampilan bernahasa inggris kurang bagi siswa SD,SMP,SMA,kaum muda	Ada LSM,guru , kursus bhs.inggris	Pendidikan
		22	Masyarakat miskin belum mendapat pelayanan maksimal	Ada Pemdes,masyarakat miskin	Kesehatan
		23	Kurangnya asupan gisi bagi bungil,balita,lansia	Ada kader, bungil,balita dan lansia	
		24	Banyak anak yang putus sekolah	ada pemdes,anak putus skolah,skolah	
		25	Lingkungan pemukiman warga yang masi kotor	Ada Pemdes,Batu,pasir dll	
		26	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang PHBS		
		27	Desa belum memiliki Embun	Ada Pemda ,Pendes	Keperjaan umum dan Penataan ruang
		28	Terjadi Pencemaran air	Ada Pemdes,ada lahan,sumber air	Kehutanan dan lingkungan hidup
		29	belum adanya konserfasi hutan	Ada LSM, ada pemdes	Kehutanan dan lingkungan hidup
		30	Tempat wisata belum dikelola dengan baik	Ada Pemdes	Pariwisata
		31	Situs bersejarah belum di kelolah	Ada Pemdes,situs budaya	Pariwisata
		32	Rambu jalan sudah rusak	Ada Pemdes	
3	PEMBINAAN	1	Pemahaman masyarakat tentang hukum masih kurang	Ada Pemdes,masyarakat miskin	Ketentraman,Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
	KEMASYARAKATAN				

		2	Belum ada sanggar seni di desa	Ada Pemdes,masyarakat,	
		3	Terkikisnya buadaya panas pela	Ada Pemdes,Lemb.adat,desa pela.	Kebudayaan dan keagamaan
3	PEMBINAAN	4	Lingkungan Rumah adat tidak nyaman	Ada Pemdes, batu,pasir kayu,Tk	Kebudayaan dan keagamaan
	KEMASYARAKATAN	5	Kurang perhatian terhadap lokasi wisata kampung lama	Ada Pemdes ,ada lokasi kampung tua	Kebudayaan dan keagamaan
		6	Sarana gereja belum memadai (pembuatan)	Ada Pemdes,DPS,Umat.	
		7	Pasifnya pemuda di desa	Ada Pemdes	Kepemudaan/Olahraga
		8	Lapangan bola kaki tidak memadai	Ada Pemdes,ada lahan,batu,pasir	Kepemudaan/Olahraga
		9	LKMD pasif	Ada Pemdes, LKMD	Kelembagaan masyarakat
		10	PKK tidak aktif	Ada Pemdes,Pengurus,pokja,	Kelembagaan masyarakat
		11	WKRI	dasa wisma	
		12	BPD berjalan tidak maksimal	Ada BPD	
		13	RT/RW berjalan tidak maksimal	Ada RT/RW,Pengurus	
		14	Kurangnya kemampuan ibu-ibu dalam berorganisasi.		
4	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	1	Kelompok nelayan pancing belum maksimal	Ada kelompok nelayan.	Kelautan dan perikanan
		2	Kelompok nelayan panah belum maksimal	Ada kelompok nelayan.	Kelautan dan perikanan
		3	Kelompok nelayan jaring belum maksimal	Ada kelompok nelayan.	Kelautan dan perikanan
		4	Sarpras tidak memadai bagi kel.N.Pancing	Ada kelompok nelayan.	Kelautan dan perikanan
		5	Sarpras tdk memadai bagi kel.N.panah	Ada kelompok nelayan.	Kelautan dan perikanan
		6	Sarpras tdk memadai bagi kel.N.jaring	Ada kelompok nelayan.	Kelautan dan perikanan
		7	Sarpras tidak memadai (nelayan)	Ada kelompok nelayan.	Kelautan dan perikanan
		8	Masi kurangnya kemampuan sebagai nelayan	Ada kelompok nelayan.	Kelautan dan perikanan
		9	kelompok tani padi ladang tidak maksimal	Ada kelompok tani	Pertanian dan peternakan
		10	Kelompok tani kacang hijau tidak maksimal	Ada kelompok tani	Pertanian dan peternakan
		11	Kelompok tani bawangmera tidak maksimal	Ada kelompok tani	Pertanian dan peternakan
		12	Kelompok tani kacang tanah tidak maksimal	Ada kelompok tani	Pertanian dan peternakan
		13	Kelompok sayur (Holtikultura) tidak maksimal	Ada kelompok tani	Pertanian dan peternakan
				Ada kel.tani	Pertanian dan peternakan
		14	Sarpras tidak memdai	Ada kel.tani	Pertanian dan peternakan
		15	Produksi pertanian menurun	Ada lahan ,air,	Pertanian dan peternakan
		16	Kelompok ternak babi tidak maksimal	Ada kelompok,lahan	Pertanian dan peternakan
		20	Pemdes belum bisa menjalankan tuposi dengan baik	Ada pemdes	Peningkatan kapasitas aparatus desa
		21	BPD belum bisa menjalankan tupopsi dengan baik	Ada BPD	Peningkatan kapasitas aparatus desa
		22	Perangkat desa belum menjalankan tupopsi dengan baik	Ada Perangkat	Peningkatan kapasitas aparatus desa
		23	Stafdesa belum menjalankan tupopsi dgn baik	Ada staf	Peningkatan kapasitas aparatus desa
		24	Keluarga tidak harmonis	Ada keluarga	Pemberdayaan perempuan

					Perlindungan anak /keluarga
4	PEMBERDAYAAN	25	Koperasi macet	Ada Pengurus,	Koperasi/usaha mikro kecil
	MASYARAKAT DESA				dan UMKM
		26	Kelompok perbengkelan tidak maksimal	ada kel.perbengkelan	Perdagangan dan perindustrian
		27	Kelompok mebel tidak maksimal	ada kel.mebel	Perdagangan dan perindustrian
		28	Bumdes macet	Ada Pengurus,	Dukungan penanaman modal
		29	Kemampuan kel. Perbengkelan terbatas	ada kel.perbengkelan	Perdagangan dan perindustrian
		30	Kemampuan kel.mebel terbatas	ada kel.mebel	Perdagangan dan perindustrian
		31	Kemampuan Pengurus bumdes terbatas	Ada Pengurus,	Perdagangan dan perindustrian
		32	Kelompok tenun desa dan SMA amtuvu		

Lampiran 10

Penentuan Peringkat Masalah

NO	BIDANG	MASALAH	DIRASAKAN OLEH BANYAK ORANG	SANGAT PARAH DAN MENDESAK	MENGHAMBAT PENINGKATAN PENDAPATAN	SERING TERJADI	TERSEDIA POTENSI UNTUK MEMECAHKAN	JUMLAH NILAI	PERINGKAT
1	Penyelenggaraan Pemerintahan	Kantor desa tidak memadai lagi untuk digunakan	5	5	5	5	5	25	1
2		Balai Pertemuan sudah rapu dan tidak kuat	5	5	4	4	5	23	
3		Tempat pemakam Umum tidak layak (TPU)	5	5	2	5	4	21	
4		Batas wilayah desa yang belum jelas	5	2	3	3	5	18	
5		Belum ada regulasi yang mengatur tentang bahan galian c di desa	5	3	5	4	5	22	
6		masyarakat belum mengerti pentingnya dokumen kependudukan	5	5	3	5	5	23	
7		Desa tidak memiliki data kependudukan yang jelas dan terupdate	5	5	1	5	4	20	
8		Infentaris desa atau Asaet desa belum tertata dengan baik	3	4	4	3	4	18	
9		Penggalian aspirasi dari keterwakilan belum menjadi kebutuhan masyarakat dengan baik	5	3	3	3	3	17	
10		Akses internet desa belum maksimal	5	5	5	5	5	25	
11		Sebagian masyarakat belum memiliki sertifikat tanah	5	4	3	2	3	17	
12		Pencemaran udara yang sering terjadi akibat kotoran ternak	3	4	2	5	4	18	
13		Tidak ada perencanaan pengembangan desa	2	3	3	4	3	15	
14		BPD berjalan tidak maksimal	5	3	4	4	4	20	
15		Tidak ada Pemekaran RT	3	4	3	3	3	16	
16		Belum Ada Mess Desa	2	2	3	4	3	14	
17		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5	5	5	5	4	24	

18	Penyelenggaraan Pemerintahan	Belum lengkap Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	5	5	5	4	4	23	
19		Belum pernah dibuat Penyuluhan Pertanahan kepada masyarakat	3	3	2	2	2	12	
20		Jalan dan lorong masih gelap pada saat malam hari	4	4	3	2	3	16	
21		Tugu desa yang sudah mulai rusak karena faktor usia tugu	3	3	4	3	3	16	
22		Tingkat kesejahteraan Pemdes, BPD, PKK, RT/RW dan Linmas serta kader desa memperhatikan	5	5	5	3	4	22	
23		operasional Pemdes Belum begitu baik						0	
24		Perencanaan desa yang belum baik						0	
25		Pelayanan administrasi belum maksimal						0	
26		Peraturan desa menyangkut hak asal-usul dan Kewenangan lokal belum diterapkan						0	
27		Keamanan masyarakat belum maksimal						0	
28		Aparat Pemdes, BPD, PKK, RT/RW, Linmas tidak berseragam dinas						0	
29		Kepanasan di ruang kantor desa						0	
30		Kepanasan di Balai Desa						0	
31		Pelaksanaan Pembangunan Desa	Mayarakat yang tinggal di pinggir sungai tidak nyaman	5	5	5	3	5	23
32	Kekurangan air bersih pada musim kemarau							0	
33	Perumahan warga tergenang air		5	5	5	5	5	25	2
34	Musim hujan terjadi pecek pada beberapa rumah		4	3	3	4	5	19	27
35	Terjadi pengikisan pantai (abrasi)		3	3	1	2	5	14	28
36	Sebagian rumah warga yang tidak layak huni							0	
37	Banyak warga yang masi buang air sebarangan		5	5	5	5	5	25	
38			5	5	5	5	5	25	2

39	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Tempat pelayanan posyandu tidak tetap	5	5	5	5	5	25	3	
40		lambatnya pelayanan medis						0		
41		Aktifitas belajar Paud tidak efektif	5	5	5	5	5	25		
42		Sarana Prasarana Paud tidak memadai	5	5	5	5	5	25		
43		Biaya pendidikan dasar tinggi di (TK Melati)	5	5	5	5	5	25	4	
44		Kurangnya Sarpras Pendidikan SMA	5	5	1	4	5	20	26	
45		Kehadiran siswa SMA di sekolah terlambat setiap hari	5	5	5	5	5	25	5	
46		Siswa SD,SMP kesulitan mengakses Internet	5	5	5	5	5	25		
47		Perpustakaan milik desa tidak beroperasi dengan baik	5	5	5	5	5	25		
48		Berkeliaran binatang (sapi) di areal sekolah SMP						0		
49		Siswa SMP masi buang air sembarangan	5	5	5	5	5	25		
50		Kurangnya perhatian kepada siswa berprestasi	5	5	4	4	5	23	22	
51		Mahasiswa tingkat akhir kesulitan biaya			5			5		
52		Kemampuan ketrampilan berbahasa inggris kurang bagi siswa SD,SMP,SMA,kaum muda	5	5		5	5	25		
53		Masyarakat miskin belum mendapat pelayanan maksimal (BPJS Kesehatan)	5	5	5	5	5	25		
54		Kurangnya asupan gisi bagi bungil,balita,lansia	5	5	5	5	5	25		
55		Banyak anak yang putus sekolah	5	5	5	5	5	25		
56		Lingkungan pemukiman warga yang masih kotor	5	5				10	30	
57								0		
58		Kurangnya kesadaran masyarakat tentang PHBS						0		
59		Desa belum memiliki Embung	5	5	5	5	5	25		
60		Terjadi Pencemaran air	5	5		5	5	20	24	
61		Belum adanya konservasi hutan	5	5	5	5	5	25		
62		Pelaksanaan Pembangunan Desa	Tempat wisata belum dikelola dengan baik						0	
63			Rambu jalan sudah rusak	5	5	5	5	5	25	

64		Belum ada Pagar beton di desa						0		
65	Pembinaan Kemasyarakatan	Pemahaman masyarakat tentang hukum masih kurang						0		
66		Belum ada sanggar seni di desa	4	5	2	4	5	20		
67		Terkikisnya budaya panas pela							0	
68		Lingkungan Rumah adat tidak nyaman	5	5	5	4	5	24	5	
69		Kurang perhatian terhadap lokasi wisata kampung lama	5	3	1	2	5	16	15	
70		Sarana gereja belum memadai	5	4	1	4	5	19	10	
71		Pasifnya pemuda di desa	5	5	5	5	5	25		
72		Lapangan bola kaki tidak memadai							0	
73		LKMD pasif	5	5	1	4	5	20	8	
74		PKK tidak aktif							0	
75		WKRI	5	5	3	5	5	23	6	
76		BPD berjalan tidak maksimal							0	
77		RT/RW berjalan tidak maksimal							0	
78		Kurangnya kemampuan ibu-ibu dalam berorganisasi.							0	
79		Desa lorulun termasuk desa rawan bencana							0	
80		Pemerintah desa kurang memahami bantuan hukum bagi yangtersangkut masalah							0	
81		Masyarakat banyak terjerat kasus hukum							0	
82	Linmas tidak maksimal							0		
83	Group Kesenian tidak maksimal							0		
85	Pemberdayaan Masyarakat	Kelompok nelayan pancing belum maksimal	2	3	3	1	5	14		
86		Kelompok nelayan panah belum maksimal	2	3	3	1	5	14		
87		Kelompok nelayan jaring belum maksimal	2	3	3	1	5	14		
88		Sarpras tidak memadai bagi kel.N.Pancing	1	2	3	2	5	13		
89		Sarpras tdk memadai bagi kel.N.panah	1	2	3	2	5	13		
90		Sarpras tdk memadai bagi kel.N jaring	1	2	3	2	5	13		
91		Sarpras tidak memadai (nelayan) pancing	1	2	3	2	5	13		

92	Masi kurangnya kemampuan sebagai nelayan	4	5	3	2	5	19
93	kelompok tani padi ladang tidak maksimal	5	5	5	5	5	25
94	Kelompok tani kacang hijau tidak maksimal	5	5	5	5	5	25
95	Kelompok tani bawang merah tidak maksimal	5	4	4	4	5	22
96	Kelompok tani kacang tanah tidak maksimal	5	4	4	4	5	22
97	Kelompok sayur (Holtikultura) tidak maksimal	5	5	5	5	5	25
98	Sarpras Pertanian tidak memadai Produksi pertanian menurun						0
99	Kelompok ternak babi tidak maksimal						0
100	Pemdes belum bisa menjalankan tupoksi dengan baik						0
101	BPD belum bisa menjalankan tupoksi dengan baik						0
102	Keluarga tidak harmonis						0
103	Koperasi macet						0
104	Kelompok perbengkelan tidak maksimal						0
105	Kelompok mebel tidak maksimal						0
106	Bumdes macet						0
107	Kelompok tenun desa dan SMA amtuvu	5	5	5	5	5	25
108	Bumdes tidak maksimal dalam pengelolaan	5	5	5	5	5	25
109	Perempuan tidak bisa melaukan kerja-kerja Pemberdayaan baik	5	5	5	5	5	25
110	Masih Ada kekerasan terhadap anak	5	5	5	5	5	25
111	Penyandang Difabel (penyandang disabilitas) kurang diperhatikan	4	4	4	4	4	20

Pemberdayaan Masyarakat

KAJIAN TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH

NO	BIDANG	MASALAH	PENYEBAB	POTENSI	ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAH MASALAH	TINDAKAN YANG LAYAK
1	2	3	4	5	6	7
1	Pemerintahan Desa	Kantor desa tidak memadai lagi untuk digunakan	Belum Ada Gedung Kantor Desa yang baru	Pemdes, Perangkat lengkap, Adanya SDM,	Pembangunan Gedung	Pembangunan gedung baru
2	Pemerintahan Desa	Balai Pertemuan sudah rapu dan tidak kuat	Belum ada Gedung dan Saprass Balai Desa yang baru	Kayu, Batu, Pasir Swadaya tenaga	Pembangunan Gedung	Pembangunan gedung balai desa yang baru
3	Pemerintahan Desa	Tempat pemakam Umum tidak layak (TPU)	Sudah penuh dan tidak nyaman lagi	Perangkat lengkap, Adanya SDM,	Pembukaan lahan baru	Pembukaan lahan baru Untuk TPU
4	Pemerintahan Desa	Batas wilayah desa yang belum jelas	Belum Adanya Mediasi Konflik Pertanahan	Ada Kecamatan, Ada Pertanahan	Mediasi penentuan batas Wilayah	Mediasi penentuan batas Wilayah
5	Pemerintahan Desa	Belum ada regulasi yang mengatur tentang bahan galian c di desa	Belum adanya regulasi yang mengatur dalam bentuk Perdes	Ada Pemdes, Ada BPD ada Pemilik Lahan	Pembuatan Perdes	Pembuatan Perdes Bahan Galian C
6	Pemerintahan Desa	masyarakat belum mengerti pentingnya dokumen kependudukan	masyarakat banyak belum memiliki Dokumen kependudukan	Ada Pemdes, RT/RW	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan
7	Pemerintahan Desa	Desa tidak memiliki data kependudukan yang jelas dan terupdate	Belum ada Monografi Desa yang terbaru	PEMDES	Pengadaan	Pengadaan Monografi Desa
8	Pemerintahan Desa	Infentaris desa atau Aset desa belum tertata dengan baik	Belum didata Menggunakan Aplikasi SIPADE	PEMDES, Adanya SDM	Pendataan	Pendataan Aset Desa dengan Aplikasi Sipade
9	Pemerintahan Desa	Penggalian aspirasi dari keterwakilan belum menjadi kebutuhan masyarakat dengan baik	Penyaluran Aspirasi tidak dikawal dengan baik	Ada BPD	Mengawal Ususlan Masyarakat dalam perencanaan Desa	Mengawal Ususlan Masyarakat dalam perencanaan Desa
10	Pemerintahan Desa	Akses internet desa belum maksimal	Teknisi Internet domisli di luar daerah sehingga membutuhkan anggaran untuk mendatangkan teknisi	Pemdes, Masyarakat, teknisi	Mendatangkan teknisi dari dalam	Mendatangkan teknisi dari dalam
11	Pemerintahan Desa	Sebagian masyarakat belum memiliki sertifikat tanah	Belum ada Prona	Ada PEMDES, ada Pertanahan	Pembuatan Sertifikat	Pembuatan Sertifikat
12	Pemerintahan Desa	Pencemaran udara yang sering terjadi akibat kotoran ternak	Belum Adanya Perdes tentang Tata Ruang	PEMDES, BPD	Pembuatan Perdes	Pembuatan Perdes
13	Pemerintahan Desa	Tidak ada perencanaan pengembangan	Belum Ada Perencanaan Pemekaran Dusun	Ada PEMDES	Pemekaran Dusun	Pemekaran Dusun
14	Pemerintahan Desa	BPD berjalan tidak maksimal	Belum ada Internet Desa	Ada Pemdes, Operator	Pengadaan Internet	Pengadaan Internet Desa
15	Pemerintahan Desa	Tidak ada Pemekaran RT	Belum Usulan Pekemaran RT	PEMDES, BPD	Pemekaran RT	Pemekaran RT

16	Pemerintahan Desa	Belum Ada Mess Desa	Tamu dari luar daerah sering menginap di rumah Perangkat Desa	Ada Pemdes, Batu, Pasir tenaga kerja	Pembangunan Mess	Pembangunan Mess Desa
17	Pemerintahan Desa	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Belum semua mendapatkan kartu BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	Ada Pemdes	Pembuatan Kartu BPJS	Pembuatan Kartu BPJS
18	Pemerintahan Desa	Belum lengkap Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut,	terkendala biaya	Ada Pemdes	Pengadaannya dilakukan secara bertahap	Pengadaannya dilakukan secara bertahap
19	Pemerintahan Desa	Belum pernah dibuat Penyuluhan Pertanahan kepada masyarakat	Konflik tanah sering terjadi diantara sesama warga	Ada pemdes, Pertanahan	Penyuluhan	Penyuluhan tentang pertanahan
20	Pemerintahan Desa	Jalan dan lorong masih gelap pada saat malam hari	Belum adaLampu Jalan / Lorong	Ada Pemdes, ada Masyarakat	Pengadaan Lampu	Pengadaan Lampu Jalan / Lorong
21	Pemerintahan Desa	Tugu desa yang sudah mulai rusak karena faktor usia tugu	belum ada Renovasi tugu pusat Desa	Kayu, Batu, Pasir Swadaya tenaga	Renovasi	Renovasi tugu pusat Desa
22	Pemerintahan Desa	Tingkat kesejahteraan Pemdes, BPD, PKK, RT/RW dan Linmas serta kader desa memperhatikan	Dana kesejahteraan Aparat Pemdes, BPD, PKK, RT/RW, dan Linmas serta kader desa yang sedikit	Pemdes, BPD, PKK, RT/RW, dan Linmas serta kader desa	Penambahan Siltap dan tunjangan	penambahan Dana kesejahteraan Aparat Pemdes, BPD, PKK, RT/RW, dan Linmas
23	Pemerintahan Desa	operasional Pemdes Belum begitu baik	belum ada bantuan Operasional Pemdes, BPD, PKK, RT/RW dan Linmas serta kader desa	Pemdes, BPD, PKK, RT/RW, dan Linmas serta kader desa	Penambahan Operasional	Penambahan Operasional Pemdes, BPD, PKK, RT/RW dan Linmas
24	Pemerintahan Desa	Perencanaan desa yang belum baik	Belum ada dokumen Perenc. pembangunan Desa	Ada Pemdes, BPD & Pendamping Profesional	Penyusunan dokumen	Penyusunan Perenc. pembangunan Desa
25	Pemerintahan Desa	Pelayanan administrasi belum maksimal	Belum ada Laptop dan Printer	Ada Sekdes, Operator Desa	Pengadaan	Pengadaan Laptop dan Printer
26	Pemerintahan Desa	Peraturan desa menyangkut hak asal-usul dan Kewenangan lokal belum diterapkan	Belum ada Perdes	Ada Pemdes dan BPD	Pembuatan	Pembuatan Perdes
27	Pemerintahan Desa	Keamanan masyarakat belum maksimal	Belum ada Pos Kamling desa	Kayu, Batu, Pasir Swadaya tenaga	Pembangunan	Pembangunan Pos Kamling
28	Pemerintahan Desa	Aparat Pemdes, BPD, PKK, RT/RW, Linmas tidak berseragam dinas	Belum ada Baju Dinas Aparat Pemdes, BPD, PKK, RT/RW, Linmas	Pemdes, BPD, PKK, RT/RW, dan Linmas serta kader desa	Pengadaan	Pengadaan Baju Dinas Aparat Pemdes, BPD, PKK, RT/RW, Linmas
29	Pemerintahan Desa	Kepanasan di ruang kantor desa	Belum ada AC Kantor Desa	Ada Pemdes	Pengadaan	Pengadaan AC Kantor Desa
30	Pemerintahan Desa	Kepanasan di Balai Desa	Belum ada AC Balai Desa	Ada Pemdes	Pengadaan	Pengadaan AC Balai Desa

31	Pembangunan Desa	Mayarakat yang tinggal di pinggiran sungai tidak nyaman	Karena terjadi pengikisan Tanah	Kayu, Batu, Pasir Swadaya tenaga	Pembangunan TPT	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT)
32	Pembangunan Desa	Kekurangan air bersih pada musim kemarau	Instalasi jaringan air kurang baik	ada sumber air, batu, pasir dan tenaga kerja	Pembangunan Bak Penampung	Pembangunan Gedung PAUD
33	Pembangunan Desa				Pemasangan/ penyambungan	Pemasangan/ penyambungan Jaringan air
34	Pembangunan Desa	Perumahan warga tergenang air	belum adanya drainase	Kayu, Batu, Pasir Swadaya tenaga	Pembuatan Drainase	Pembuatan Drainase
35	Pembangunan Desa	Musim hujan terjadi pecek pada beberapa rumah	Belum Ada jalan rabat beton	ada batu, pasir, tenaga kerja	Pembangunan jalan	Pembangunan jalan rabat beton
36	Pembangunan Desa	Terjadi pengikisan pantai (abrasi)	Talud pantai yang sudah rusak	ada batu, pasir, tenaga kerja	Pembangunan talud	Pembangunan talud
37	Pembangunan Desa	Sebagian rumah warga yang tidak layak	Masih terlihat kebocoran pada atap, dinding dan lantai	ada batu, pasir, tenaga kerja	Pembangunan dan Peningkatan	Pembangunan & Peningkatan Rumah warga
38	Pembangunan Desa	Banyak warga yang masih buang air sembarangan	Belum ada jamban pada rumah warga	ada batu, pasir, tenaga kerja	Pembangunan jamban	Pembangunan jamban
39	Pembangunan Desa	Tempat pelayanan posyandu tidak tetap	Belum ada gedung & Prasarana posyandu	Kayu, Batu, Pasir Swadaya tenaga dan lahan	Pembangunan Gedung	Pembangunan Gedung Posyandu
40	Pembangunan Desa	lambatnya pelayanan medis				
41	Pembangunan Desa	Aktifitas belajar Paud tidak efektif	Belum ada gedung PAUD	Kayu, Batu, Pasir Swadaya tenaga dan lahan	Pembangunan Gedung	Pembangunan Gedung PAUD
42	Pembangunan Desa	Sarana Prasarana Paud tidak memadai	Belum ada Saprass Pendukung pembelajaran	Ada Guru, ada Siswa	Pengadaan Saprass	Pengadaan Saprass PAUD
43	Pembangunan Desa	Biaya pendidikan dasar tinggi di (TK Mel)	Belum Ada TK lain dan yang ada TK Swasta	Ada Guru, ada Siswa	Pendirian TK oleh Pemdes	Pendirian TK oleh Pemdes
44	Pembangunan Desa	Kurangnya Sarpras Pendidikan SMA	Belum ada ruangan untuk belajar	Ada Pemda, Ada lahan, batu, pasir, tenaga kerja	Pembangunan ruangan	Pembangunan ruangan belajar
45	Pembangunan Desa	Kehadiran siswa SMA di sekolah terlambat setiap hari	Belum Ada Mobil siswa	Ada Pemda, Ada siswa	Pengadaan Mobil	Pengadaan Mobil Angkutan siswa
46	Pembangunan Desa	Siswa SD, SMP kesulitan mengakses In	Belum ada internet di Sekolah	Ada siswa, guru	Pengadaan jaringan internet	Pengadaan jaringan internet
47	Pembangunan Desa	Perpustakaan milik desa tidak beroperasi dengan baik	Belum ada insentif untuk pengelola	Ada Pengelola	Pemberian Insentif	Pemberian Insentif
48	Pembangunan Desa	Berkeliaran binatang (sapi) di areal sekolah SMP	Belum ada pagar	Ada lahan, guru, siswa	Pembuatan pagar	Pembuatan pagar sekolah
49	Pembangunan Desa	Siswa SMP masih buang air sembarangan	Belum ada MCK	Ada Pemdes, ada Pemda	Pembuatan MCK	Pembuatan MCK
50	Pembangunan Desa	Kurangnya perhatian kepada siswa berprestasi	Belum mendapat beasiswa	Ada siswa	Pemberian beasiswa	Pemberian beasiswa
51	Pembangunan Desa	Mahasiswa tingkat akhir kesulitan biaya	Belum mendapat beasiswa	ada mahasiswa	Pemberian beasiswa	Pemberian beasiswa

52	Pembangunan Desa	Kemampuan ketrampilan berbahasa inggris kurang bagi siswa SD,SMP,SMA,kaum muda	Belum ada kursus bagi siswa dan masyarakat	Ada Pemdes,ada tutor, siswa, ada	Pemberian kursus	Pemberian kursus bahasa inggris
53	Pembangunan Desa	Masyarakat miskin belum mendapat pelayanan maksimal (BPJS Kesehatan)	Belum Ada BPJS Untuk Masyarakat miskin	Ada Pemda,Pemdes, masyarakat m	Pemberian BPJS	Pemberian BPJS Kesehatan
54	Pembangunan Desa	Kurangnya asupan gisi bagi bungil,balita,lansia	Belum Ada pemberian Vitamin dan makanan tambahan yang sesuai dengan potensi desa	Ada pemdes, ada potensi Desa (hasil pertanian padi merah)	Pemberian makanan tambahan dan vitamin	Pemberian makanan tambahan dan vitamin
55	Pembangunan Desa	Banyak anak yang putus sekolah	Belum Ada pelatihan kerja bagi anak putus sekolah	Ada Pemdes,ada pelatih	Pelatihan kerja bagi anak putus sekolah	Pelatihan kerja bagi anak putus sekolah
56	Pembangunan Desa	Lingkungan pemukiman warga yang masih kotor	Belum Ada bak sampah atau tempat pembuangan sanapah sementara	ada lahan, Kayu, ada batu, pasir, dinas Kebersihan	Pembuatan tempat sampah/bak sampah	Pembuatan tempat sampah/bak sampah
57	Pembangunan Desa				Penyuluhan tentang kebersihan	Penyuluhan tentang kebersihan
58	Pembangunan Desa	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang PHBS	Masyarakat masih sembarangan dalam menjaga kesehatan dan kebersihan diri dan lingkungan	Ada Pemdes,Puskesmas, Dinas Kesehatan	Sosialisasi PHBS	Sosialisasi PHBS
59	Pembangunan Desa	Desa belum memiliki Embung	Belum ada pengairan yang baik ke lahan pertanian dan peternakan	Ada petani, peternak	Pembangunan Embung	Pembangunan Embung
60	Pembangunan Desa				Peembersihan kolam mata iar	Peembersihan kolam mata iar
61	Pembangunan Desa	Terjadi Pencemaran air	Warga membuang sampah dikolam mata air	Ada Pemdes,ada lahan,sumber air	Sosialisasi tentang air bersih	Sosialisasi tentang air bersih
62	Pembangunan Desa	belum adanya konservasi hutan	belum ada penanaman pohon di sepadan kali	ada pemdes,Dinas lingkungan Hid	Penanaman pohon	Penanaman pohon
63	Pembangunan Desa	Tempat wisata belum dikolola dengan t	belum gasebo dan sapras lainnya	Ada Pemdes,Batu,pasir, tempat wisata	Pembangunan tempat wisata	Pembangunan tempat wisata
64	Pembangunan Desa	Rambu jalan sudah rusak	sudah termakan usia	Ada Pemdes	Pembuatan rambu jalan	Pembuatan rambu jalan
65	Pembangunan Desa	Belum ada Pagar beton di desa	binatang masih berkeliaran sembarangan	Ada Pemdes, Kayu, ada batu, pasir	Pembangunan Pagar Desa	Pembangunan Pagar Desa
66	Pembinaan Masyarakat	Pemahaman masyarakat tentang hukum masih kurang	Belum Sosialisasi tentang hukum	Ada Pemdes,masyarakat, Babimkamtibmas	Sosialisasi tentang hukum	Sosialisasi tentang hukum
67	Pembinaan Masyarakat	Belum ada sanggar seni di desa	belum ada pembentukan sanggar seni	Ada Pemdes, Anak-anak penari, pelatih seni	Pembentukan sanggar di desa	Pembentukan sanggar di desa
68	Pembinaan Masyarakat	Terkikisnya budaya panas pela	Belum ada kegiatan adat panas pela beberapa tahun	Ada Pemdes,Lemb.adat,desa pela.	Melakukan kegiatan panas pela	Melakukan kegiatan panas pela
69	Pembinaan Masyarakat	Lingkungan Rumah adat tidak nyaman	Belum ada pagar disekitar rumah adat	Ada Pemdes, batu,pasir kayu,T	Pembuatan pagar	Pembuatan pagar
70	Pembinaan Masyarakat	Kurang perhatian terhadap lokasi wisata kampung lama	Belum Ada Renovasi	Ada Pemdes ,ada lokasi kampu	Pemugaran/renovasi	Pemugaran/renovasi

71	Pembinaan Masyarakat	Sarana gereja belum memadai	Belum ada bantuan ke gereja	Ada Pemdes,DPS,Umat.	Pembinaan	Pembinaan kelembagaan adat
72	Pembinaan Masyarakat	Pasifnya pemuda di desa	Belum Ada peningkatan kapasitas/pelatihan	Ada Pemdes, Ada pemuda, karang taruna	Pelatihan kepada pemuda	Pelatihan kepada pemuda
73	Pembinaan Masyarakat	Lapangan bola kaki tidak memadai	Belum Ada Lapangan Bola kaki yang sesuai Standar	Ada Pemdes,ada lahan,batu,pasir	Pembangunan lapangan	Pembangunan Lapangan Bola K
74	Pembinaan Masyarakat	LKMD pasif	Belum bisa menjalankan tupok	Ada Pemdes, LKMD	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
75	Pembinaan Masyarakat	PKK tidak aktif	Belum bisa menjalankan tupok	Ada Pemdes,Pengurus,pokja,dasa wisma	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa
76	Pembinaan Masyarakat	WKRI	Belum bisa menjalankan tupok	Ada Ibu-ibu WKRI	Peningkatan kapasitas Lembaga Keagamaan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Keagamaan
77	Pembinaan Masyarakat	BPD berjalan tidak maksimal	Belum bisa menjalankan tupok	Ada BPD	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
78	Pembinaan Masyarakat	RT/RW berjalan tidak maksimal	Belum bisa menjalankan tupok	Ada RT/RW,Pengurus	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
79	Pembinaan Masyarakat	Kurangnya kemampuan ibu-ibu dalam berorganisasi.	Belum Ada peningkatan kapasitas/pelatihan	Ada Kelompok Ibu-ibu di Desa	Peningkatan Kapasitas Kelompok Ibu-ibu	Peningkatan Kapasitas Kelompok Ibu-ibu
80	Pembinaan Masyarakat	Desa lorulun termasuk desa rawan bencana	Belum ada Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Ada Pemdes, Masyarakat, BPBD	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
81	Pembinaan Masyarakat	Pemerintah desa kurang memahami bantuan hukum bagi	Belum ada pelatihan tentang bantuan hukum	Ada Pemdes	Pelatihahn tentang Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa	Pelatihahn tentang Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa
82	Pembinaan Masyarakat	Masyarakat banyak terjerat kasus hukum	Belum ada pelatihan tentang bantuan hukum dan perlindungan masyarakat	Ada masyarakat	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan
83	Pembinaan Masyarakat	Linmas tidak maksimal	Linmas tidak tahu Tupoksinya	Ada Linmas	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh
84	Pembinaan Masyarakat	Group Kesenian tidak maksimal	Belum ada pembinaan kepada group kesenian	Ada Group Kesenian	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
85	Pemberdayaan Masyarakat	Kelompok nelayan pancing belum maksimal	Belum Ada Pelatihan Kelompok Nelayan Pancing	Ada Kelompok Nelayan	Pelatihan Kelompok Nelayan Pancing Panah	Pelatihan Kelompok Nelayan Pancing Panah
86	Pemberdayaan Masyarakat	Kelompok nelayan panah belum maksimal	Belum Ada Pelatihan Kelompok Nelayan Panah	Ada Kelompok Nelayan	Pelatihan Kelompok Nelayan Pancing Panah	Pelatihan Kelompok Nelayan Pancing Panah
87	Pemberdayaan Masyarakat	Kelompok nelayan jaring belum maksimal	Belum Ada Pelatihan Kelompok Jaring Panah	Ada Kelompok Nelayan	Pelatihan Kelompok Nelayan Jaring	Pelatihan Kelompok Nelayan Jaring
88	Pemberdayaan Masyarakat	Sarpras tidak memadai bagi kel.N.Pancing	Belum Ada bantuan Sarpras perikanan	Ada Kelompok Nelayan	Pengadaan Sarpras Perikanan	Pengadaan Sarpras Perikanan

89	Pemberdayaan Masyarakat	Sarpras tdk memadai bagi kel.N.panah	Belum Ada bantuan Sapras perikanan	Ada Kelompok Nelayan	Pengadaan Sapras Perikanan	Pengadaan Sapras Perikanan
90	Pemberdayaan Masyarakat	Sarpras tdk memadai bagi kel.N jaring	Belum Ada bantuan Sapras perikanan	Ada Kelompok Nelayan	Pengadaan Sapras Perikanan	Pengadaan Sapras Perikanan
91	Pemberdayaan Masyarakat	Sarpras tidak memadai (nelayan) pancing	Belum Ada bantuan Sapras perikanan	Ada Kelompok Nelayan	Pengadaan Sapras Perikanan	Pelatihan Pembuatan Kue
92	Pemberdayaan Masyarakat	Masi kurangnya kemampuan sebagai nelayan	Belum Ada Pelatihan/Peningkatan kapasitas nelayan	Ada Kelompok Nelayan	Pelatihan Kader	Pelatihan/Peningkatan kapasitas nelayan
93	Pemberdayaan Masyarakat	kelompok tani padi ladang tidak maksimal	Belum Ada Pelatihan bagi kelompok tani	Ada Kelompok Tani Padi Ladang	Pelatihan Kelompok Tani	Pelatihan Kelompok Tani Padi Ladang
94	Pemberdayaan Masyarakat	Kelompok tani kacang hijau tidak maksimal	Belum Ada Pelatihan bagi kelompok tani	Ada Kelompok Tani Kacang Hijau	Pelatihan Kelompok Tani	Pelatihan Kelompok Tani Kacang Hijau
95	Pemberdayaan Masyarakat	Kelompok tani bawang merah tidak maksimal	Belum Ada Pelatihan bagi kelompok tani	Ada Kelompok Tani Bawang Merah	Pelatihan Kelompok Tani	Pelatihan Kelompok Tani Bawang Merah
96	Pemberdayaan Masyarakat	kelompok tani kacang tanah tidak maksimal	Belum Ada Pelatihan bagi kelompok tani	Ada kelompok Tani kacang Tanah	Pelatihan Kelompok Tani	Pelatihan kelompok Tani Kacang Tanah
97	Pemberdayaan Masyarakat	Kelompok sayur (Holtikultura) tidak maksimal	Belum Ada Pelatihan bagi kelompok tani	Ada Kelompok Tani Sayur	Pelatihan Kelompok Tani	Pelatihan Kelompok Tani Sayur
98	Pemberdayaan Masyarakat	Sarpras Pertanian tidak memadai Produksi pertanian menurun	Belum Ada bantuan sapras pertanian	Ada Kelompok Tani	Pengadaan Sapras Pertanian	Pengadaan Sapras Pertanian
99	Pemberdayaan Masyarakat	Kelompok ternak babi tidak maksimal	Belum Ada Pelatihan Peternakan	Ada Peternak	Pelatihan	Pelatihan Peternakan
100	Pemberdayaan Masyarakat	Pemdes belum bisa menjalankan tupoksi dengan baik	Belum ada Peningkatan Kapasitas	Ada Pemdes	Magang/ Studi banding	Magang/ Studi banding
101	Pemberdayaan Masyarakat				Peningkatan Kapasitas	Peningkatan Kapasitas
102	Pemberdayaan Masyarakat	BPD belum bisa menjalankan tupoksi dengan baik	Belum ada Peningkatan Kapasitas	Ada BPD	Magang/ Studi banding	Magang/ Studi banding
103	Pemberdayaan Masyarakat				Peningkatan Kapasitas	Peningkatan Kapasitas
104	Pemberdayaan Masyarakat	Keluarga tidak harmonis	Banyak Perselingkuhan dan Belum Ada Pelatihan untuk Keluarga	Ada Pemdes, BKKBN	Pelatihan untuk Keluarga	Pelatihan untuk Keluarga
105	Pemberdayaan Masyarakat	Koperasi macet	Belum ada Peningkatan Kapasitas	Ada Pengurus Koperasi	Pelatihan Manajemen	Pelatihan Manajemen
106	Pemberdayaan Masyarakat	Kelompok perbengkelan tidak maksimal	Belum ada Peningkatan Kapasitas dan Bantuan Sapras	Ada Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (Bengkel)	Pelatihan	Pelatihan Perbengkelan
107	Pemberdayaan Masyarakat				Bantuan Sapras	Bantuan Sapras Perbengkelan
108	Pemberdayaan Masyarakat	Kelompok mebel tidak maksimal	Belum ada Peningkatan Kapasitas dan Bantuan Sapras	Ada Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (Bengkel)	Pelatihan	Pelatihan Pertukangan Kayu
109	Pemberdayaan Masyarakat				Bantuan Sapras	Bantuan Sapras Pertukangan Kayu

110	Pemberdayaan Masyarakat	Bumdes macet	Belum adanya Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	Ada Pengurus Bumdes	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
111	Pemberdayaan Masyarakat				Penyertaan Modal Bumdes	Penyertaan Modal Bumdes
112	Pemberdayaan Masyarakat	kelompok tenun desa dan SMA amtuvu	Belum Ada Pelatihan kelompok Tenun	Ada Kelompok Tenun	Pelatihan	Pelatihan Kelompok Tenun
113	Pemberdayaan Masyarakat	Bumdes tidak maksimal dalam pengelolaan	Belum ada Gedung Bumdes Gedung Bumdes	Ada Pengurus Bumdes	Pembangunan Gedung BUMDe	Pembangunan Gedung BUMDes
114	Pemberdayaan Masyarakat	Perempuan tidak bisa melaukan kerja-kerja Pemberdayaan baik dalam keluarga maupun	Belum ada Pelatihan/Penyuluhan Pemberdavaan Perempuan	Ada Kelompok Perempuan	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
115	Pemberdayaan Masyarakat	Masih Ada kekerasan terhadap anak	Belum adanya Pelatihan/Penyuluhan	Ada Anak-anak dibawah umur	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
116	Pemberdayaan Masyarakat	Penyandang Difabel (penyandang disabilitas) kurang diperhatikan	Belum ada bantuan untuk kaum difabel	ada Kaum difabel	Pemberian bantuan	Pemberian bantuan kepada kaum difabel

PENENTUAN PERINGKAT TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH

NO	BIDANG	MASALAH	ALTERNATIF TINDAKAN	DUKUNGAN PEMENUHAN KEBUTUHAN ORANG BANYAK	DUKUNGAN PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT	DUKUNGAN POTENSI MENGATASI MASALAH	DUKUNGAN KEDAULATAN PANGAN	DUKUNGAN KEDAULATAN ENERGI	DUKUNGAN PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN	DUKUNGAN PARIWISATA DAN INDUSTRI	JUMLAH NILAI	PERINGKAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	8	9	
1	Pemerintahan Desa	Kantor desa tidak memadai lagi untuk digunakan	Pembangunan gedung baru						5		5	1	
2		Balai Pertemuan sudah rapu dan tidak kuat	Pembangunan gedung balai desa yang baru						4		4	10	
3		Tempat pemakam Umum tidak layak (TPU)	Pembukaan lahan baru Untuk TPU						3			3	41
4		Batas wilayah desa yang belum jelas	Mediasi penentuan batas Wilayah						1			1	70
5		mengatur tentang bahan galian C di desa	Pembuatan Perdes Bahan Galian C						4			4	11
6		pentingnya dokumen kependudukan	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan						3			3	42
7		Kependudukan yang jelas dan terupdate	Pengadaan Monografi Desa						2			2	28
8		Infentaris desa atau Aset desa belum tertata dengan baik	Pendataan Aset Desa dengan Aplikasi Sipade						2			2	29
9		keterwakilan belum menjadi kebutuhan masyarakat dengan baik	Mengawal Usulan Masyarakat dalam perencanaan Desa						3			3	43
10		Akses internet desa belum maksimal	Mendatangkan teknisi dari dalam						3			3	54
11		Sebagian masyarakat belum memiliki sertifikat tanah	Pembuatan Sertifikat						4			4	21
12		Pencemaran udara yang sering terjadi akibat kotoran ternak	Pembuatan Perdes						2			2	71
13		Tidak ada perencanaan pengembangan	Pemekaran Dusun						1			1	95
14		BPD berjalan tidak maksimal	Pengadaan Internet Desa						1			1	96
15		Tidak ada Pemekaran RT	Pemekaran RT						2			2	72
16		Belum Ada Mess Desa	Pembangunan Mess Desa						1			1	88
17		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Pembuatan Kartu BPJS						3			3	55
18		Belum lengkap Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Pengadaannya dilakukan secara bertahap						5			5	7

19		Belum pernah dibuat Penyuluhan Pertanahan kepada masyarakat	Penyuluhan tentang pertanahan						5		5	4
20		Jalan dan lorong masih gelap pada saat malam hari	Pengadaan Lampu Jalan / Lorong						4		4	12
21		Tugu desa yang sudah mulai rusak karena faktor usia tugu	Renovasi tugu pusat Desa						2		2	56
22		PKK, RT/RW dan Linmas serta kader desa memperhatikan	penambahan Dana Kesejahteraan Aparat Pemdes, PPD, PKK, RT/RW dan Linmas						2		2	73
23		operasional Pemdes Belum begitu baik	Penambahan Operasional Pemdes, BPD, PKK, RT/RW dan Linmas						2		2	74
24		Perencanaan desa yang belum baik	Penyusunan Perenc. pembangunan Desa						5		5	13
25	Pemerintahan Desa	Pelayanan administrasi belum maksimal	Pengadaan Laptop dan Printer						1		1	75
26		Peraturan desa menyangkut hak asal-usul dan Kewenangan lokal belum ditetapkan	Pembuatan Perdes						2		2	60
27		Keamanan masyarakat belum maksimal	Pembangunan Pos Kamling								0	
28		Aparat Pemdes, BPD, PKK, RT/RW, Linmas tidak berseragam dinas	Pengadaan Baju Dinas Aparat Pemdes, BPD, PKK, RT/RW, Linmas								0	
29		Kepanasan di ruang kantor desa	Pengadaan AC Kantor Desa								0	
30		Kepanasan di Balai Desa	Pengadaan AC Balai Desa								0	
31		Mayarakat yang tinggal di pinggir sungai tidak nyaman	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT)						3		3	44
32		Kekurangan air bersih pada musim kemarau	Pembangunan Gedung PAUD						5		5	14
33	Pemasangan/ penyambungan Jaringan air							4		4	15	
34		Perumahan warga tergenang air	Pembuatan Drainase						2		2	76
35		Musim hujan terjadi pecek pada beberapa rumah	Pembangunan jalan rabat beton						5		5	8
36		Terjadi pengikisan pantai (abrasi)	Pembangunan talud						5		5	22
37	Pembangunan Desa	Sebagian rumah warga yang tidak layak huni	Pembangunan & Peningkatan Rumah warga						5		5	5
38		Banyak warga yang masi buang air sebarangan	Pembangunan jamban						5		5	2
39		Tempat pelayanan posyandu tidak tetap	Pembangunan Gedung Posyandu						2		2	61
40		lambatnya pelayanan medis							4		4	45
41		Aktifitas belajar Paud tidak efektif	Pembangunan Gedung PAUD						4		4	23
42		Sarana Prasarana Paud tidak memadai	Pengadaan Sapras PAUD						3		3	30
43		Biaya pendidikan dasar tinggi di (TK Melati)	Pendirian TK oleh Pemdes						3		3	62

44	Pembangunan Desa	Kurangnya Sarpras Pendidikan SMA	Pembangunan ruangan belajar					4		4	57	
45		Kehadiran siswa SMA di sekolah terlambat setiap hari	Pengadaan Mobil Angkutan siswa					3		3	58	
46		Siswa SD,SMP kesulitan mengakses Internet	Pengadaan jaringan internet					1		1	97	
47		Perpustakaan milik desa tidak beroperasi dengan baik	Pemberian Insentif					1		1	77	
48		Berkeliraran binatang (sapi) di areal sekolah SMP	Pembuatan pagar sekolah					2		2	31	
49		Siswa SMP masi buang air sembarangan	Pembuatan MCK					2		2	63	
50		Kurangnya perhatian kepada siswa berprestasi	Pemberian beasiswa					4		4	24	
51		Mahasiswa tingkat akhir kesulitan biaya	Pemberian beasiswa					3		3	46	
52		berbahasa inggris kurang bagi siswa SD,SMP,SMA,kaum muda	Pemberian kursus bahasa inggris					1		1	102	
53		mendapat pelayanan maksimal (BPJS Kesehatan)	Pemberian BPJS Kesehatan					4		4	64	
54		Kurangnya asupan gizi bagi bungil,balita,lansia	Pemberian makanan tambahan dan vitamin					4		4	16	
55		Banyak anak yang putus sekolah	Pelatihan kerja bagi anak putus sekolah					5		5	17	
56		Lingkungan pemukiman warga yang masih kotor	Pembuatan tempat sampah/bak sampah					2		2	78	
57			Penyuluhan tentang kebersihan					1		1	89	
58		Kurangnya kesadaran masyarakat tentang PHBS	Sosialisasi PHBS					1		1	98	
59		Desa belum memiliki Embung	Pembangunan Embung					1		1	90	
60		Terjadi Pencemaran air	Peembersihan kolam mata air					1		1	79	
61			Sosialisasi tentang air bersih					2		2	32	
62		belum adanya konservasi hutan	Penanaman pohon					3		3	65	
63		Tempat wisata belum dikelola dengan baik	Pembangunan tempat wisata					1		1	99	
64		Rambu jalan sudah rusak	Pembuatan rambu jalan					1		1	103	
65		Belum ada Pagar beton di desa	Pembangunan Pagar Desa					2		2	80	
66		Pembinaan Masyarakat	Pemahaman masyarakat tentang hukum masih kurang	Sosialisasi tentang hukum					3		3	5
67			Belum ada sanggar seni di desa	Pembentukan sanggar di desa					3		3	34
68			Terkikisnya budaya panas pela	Melakukan kegiatan panas pela					5		5	3

69	Pembinaan Masyarakat	Lingkungan Rumah adat tidak nyaman	Pembuatan pagar					3		3	35
70		Kurang perhatian terhadap lokasi wisata kampung lama	Pemugaran/renovasi					4		4	6
71		Sarana gereja belum memadai	Pembinaan kelembagaan adat							0	
72		Pasifnya pemuda di desa	Pelatihan kepada pemuda							0	
73		Lapangan bola kaki tidak memadai	Pembangunan Lapangan Bola Kaki							0	
74		LKMD pasif	Lembaga Kemasyarakatan Desa							0	
75		PKK tidak aktif	Lembaga Kemasyarakatan Desa							0	
76		WKRI	Peningkatan Kapasitas Lembaga Keagamaan							0	
77		BPD berjalan tidak maksimal	Lembaga Kemasyarakatan Desa							0	
78		RT/RW berjalan tidak maksimal	Lembaga Kemasyarakatan Desa							0	
79		Kurangnya kemampuan ibu-ibu dalam berorganisasi.	Peningkatan Kapasitas Kelompok Ibu-ibu					3		3	36
80		Desa lorulun termasuk desa rawan bencana	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap					3		3	37
81		Pemerintah desa kurang memahami bantuan hukum	Pelatihn tentang Bantuan Hukum Untuk Aparatur					2		2	86
82		Masyarakat banyak terjerat kasus hukum	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat					3		3	50
83		Linmas tidak maksimal	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas					3		3	18
84	Group Kesenian tidak maksimal	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan					3		3	67	
85	Pemberdayaan Masyarakat	Kelompok nelayan pancing belum maksimal	Pelatihan Kelompok Nelayan Pancing Panah					4		4	9
86		Kelompok nelayan panah belum maksimal	Pelatihan Kelompok Nelayan Pancing Panah					2		2	51
87		Kelompok nelayan jaring belum maksimal	Pelatihan Kelompok Nelayan Jaring					3		3	25
88		Sarpras tidak memadai bagi kel.N.Pancing	Pengadaan Sarpras Perikanan					2		2	93
89		Sarpras tdk memadai bagi kel.N.panah	Pengadaan Sarpras Perikanan					2		2	94
90		Sarpras tdk memadai bagi kel.N jaring	Pengadaan Sarpras Perikanan					2		2	68
91		Sarpras tidak memadai (nelayan) pancing	Pelatihan Pembuatan Kue					1		1	110
92	Masi kurangnya kemampuan sebagai nelayan	Pelatihan/Peningkatan kapasitas nelayan					3		3	26	
93	Pemberdayaan Masyarakat	kelompok tani padi ladang tidak maksimal	Pelatihan Kelompok Tani Padi Ladang					3		3	19

**RANCANGAN RPJM DESA
TAHUN : 2019-2024**

DESA : LORULUN
KECAMATAN : WERTAMRIAN

KABUPATE : KEPULAUAN TANIMBAR
PROVINSI : MALUKU

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Lokasi	Volume		Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan					
	3	Sub Bidang	4	Jenis Kegiatan					6	7	8	2019	2020	2021	2022	2023	2024	15	16	17	Kerjasama	
																					18	19
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	1	Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	5	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa	12	bln	Aparatur Pemerintah Desa (Kades)	√	√	√	√	√	√		ADD	√					
	2		5	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa	12	bln	Aparatur Pemerintah Desa (Perangkat Desa)	√	√	√	√	√	√		ADD	√					
	3		5	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	12	bln	Aparatur Pemerintah Desa (Perangkat Desa)	√	√	√	√	√	√		ADD	√					
	4		5	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	Desa	1	Pkt	Pemdes (RT,RW)	√	√	√	√	√	√		ADD	√					
	5		5	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa	12	bln	BPD	√	√	√	√	√	√		ADD	√					
	6		5	Penyediaan Operasional BPD (ATK, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, listrik/telpon, dll)	Desa	1	Pkt	BPD		√							ADD	√				
	7		5	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa	12	bln	RT, RW	√	√	√	√	√	√		ADD	√					
	8	dan Prasarana Pemerintahan Desa	5	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	Desa	1	Paket	Pemdes dan BPD	√	√	√	√	√	√		APBD II(ADD)	√					
	9	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	5	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa	1	Paket	Pemdes dan Masyarakat	√	√	√	√	√	√		APBD II(ADD)	√					
	10		5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa	1	Paket	Pemdes dan Masyarakat		√	√					APBD II(ADD)	√					
	11		5	Pembangunan Mess desa	Desa	3	Ruang	Tamu Desa					√			APBD II(ADD)	√					
	12	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan	5	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)	Desa	1	Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√		APBD II(ADD)	√					

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	13	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)	Desa	1	Paket	Pemdes dan Masyarakat	√	√	√	√	√	√		APBD II(ADD)	√		
	14		Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Desa	1	Paket	Pemdes	√	√	√	√	√	√		APBN(DDS)	√		
	15		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Desa	1	Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√		APBD II(ADD)	√		
	16		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa	1	Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√		APBD II(ADD)	√		
																√		
	17	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	Desa	1	Paket	Pemdes, BPD, Dan lembaga lainnya serta masyarakat	√	√	√	√	√	√		APBN(DD)	√		
	18		Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	Desa	1	Paket	Pemdes, BPD, Dan lembaga lainnya serta masyarakat	√	√	√	√	√	√		APBD II(ADD)	√		
	19		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes,dll)	Desa	1	Paket	Pemdes, BPD, Dan lembaga lainnya serta masyarakat	√	√	√	√	√	√		APBD II(ADD)	√		

PENY PEM DESA	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	20	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	Desa	1	Paket	Pemdes, BPD, Dan lembaga lainnya serta masyarakat	√	√	√	√	√	√						
		21	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Desa	1	Paket	Pemdes, BPD, Dan lembaga lainnya serta masyarakat	√	√	√	√	√	√						
		22	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes Tata Ruang, Perdes Pungutan Desa, Perdes dll)	Desa	1	Paket	Pemdes, BPD, Dan lembaga lainnya serta masyarakat	√	√	√	√	√	√						
		23	Pembentukan atau pemekeran Desa	Desa	1	Paket	Desa					√	√						
		24	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	Desa	1	Paket	Kepala Desa	√	√	√	√	√	√		APBD II(ADD)	√			
		25	Pengembangan Sistem Informasi Desa (Papan Pengumuman, Baliho, Internet Desa, Web Site Desa dan Media Sosial Desa)	Desa	1	Paket	Desa	√	√	√	√	√	√		APBD II(ADD)	√			
	26																		
	Pertanahan	27	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	Desa	1	Paket	Desa			√					APBD II(ADD)				
		28	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	Desa	1	Paket	Masyarakat				√				APBD II(ADD)				
		29	Mediasi Konflik Pertanahan	Desa	1	Paket	Desa		√	√	√				APBD II(ADD)				
		30	Penyuluhan Pertanahan	Desa	1	Paket	Masyarakat		√						APBD II(ADD)	√			
31		Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa	Desa	1	Paket	Desa						√		APBD II(ADD)	√				
Jumlah Per Bidang 1														-					

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	2019				2020	2021	2022	2023	2024	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama		
																Antar Desa	Pihak III	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	#	#	15	16	17	18	19
		1	Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	Desa	1 paket	Pengurus PAUD/TK, Siswa-siswi PAUD/TK	√	√	√	√	√	√		DDS	√		
		2		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, Gedung, dst)	Desa	1 paket	Pengurus PAUD/TK, Siswa-siswi PAUD/TK	√	√	√	√	√	√		APBN/DDS	√		
		3		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat dan anak putus sekolah	Desa	1 Paket	Anak-anak Putus Sekolah		√	√	√	√	√		APBD II	√		
		4		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	Desa	1 paket	Masyarakat		√	√	√	√	√		APBD	√		
		5		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK Non-Formal Milik Desa	Desa	1 Paket	Pengurus PAUD/TK, Siswa-siswi PAUD/TK	√	√	√	√	√	√		APBN/DDS	√		
		6		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**	Desa	1 Paket	Masyarakat		√	√					APBN/DDS	√		
		7		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)	Desa	1 Paket	Masyarakat		√	√	√	√	√		DDS	√		
		8		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar milik Desa	Desa	1 Paket	Sanggar Seni Desa		√	√	√	√	√		DDS	√		
		9		Pengadaan Bus Sekolah	Desa	1 buah	Siswa-siswi SMA		√						APBD II			√
		10		Pembangunan atau Penambahan Ruang Belajar	SMA	2 Ruanga	Siswa-siswi SMA		√						APBD I			√
		11		Pengadaan Internet dan Fasilitas Pendukung lainnya di sekolah	SD, SMP	2 Paket	Siswa-siswi SD dan SMP		√						APBD II			√
		12		Kursus Bahasa Inggris untuk anak sekolah dan kaum muda	Desa	1 paket	Siswa-Siswi SD-SMA		√	√	√	√	√		DDS	√		
		13		Dukungan Pendidikan bagi Mahasiswa		1 paket	Mahasiswa		√	√	√	√	√					
		14		Dukungan Pendidikan bagi Siswa-siswi Berprestasi	Desa	1 paket	Siswa-siswi Berprestasi		√	√	√	√	√		APBN/DDS	√		

15	KESEHATAN	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Desa	1	Paket	Kader Posyandu, Masyarakat	√	√	√	√	√	√		APBN/DDS	√		
16		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	Desa	1	Paket	Kader Posyandu, Masyarakat	√	√	√	√	√	√		APBN/DDS	√		
17		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa	1	Paket	Bayi dan Balita	√	√	√	√	√	√		APBN/DDS	√		
18		Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Desa							√	√	√		APBN/DDS	√		
19		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu	Desa	1	Unit	Masyarakat			√					APBN/DDS	√		
20	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Desa	Desa	± 1600	M	Masyarakat	√	√	√	√	√	√		APBN/DDS	√		
21		Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Desa	± 500	M	Masyarakat				√	√			APBN/DDS	√		
22		Pembangunan Jalan Usaha Tani	Desa				Masyarakat				√	√	√	APBD II/DDS	√		√
23		Pembangunan Jembatan Milik Desa	RT 1	1	buah	Masyarakat				√				APBN/DDS	√		
24	Pembangunan Talud Penahan Ombak (Break Water)	Desa	1300	M		Masyarakat				√	√	√		APBN/DDS	√		√
25	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	Desa			Masyarakat	√	√	√	√	√	√		APBN/DDS	√		
26		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Desa	1	Unit	Pemdes, BPD, Lembaga lainnya dan Masyarakat			√		√			APBN/DDS	√		
27		Pembukaan Lahan Baru untuk Tempat Pemakaman Umum Milik Desa	Desa	1	Paket	Masyarakat					√	√		DDS	√		
28		Pemeliharaan Embung Milik Desa	Desa	1	Unit						√	√		APBN/DDS	√		
29	Kawasan Permukiman	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa	± 150	unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√		APBN/DDS	√		
30		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air)	Desa	4	Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√		APBN/DDS	√		
31		Pengadaan Sarana Prasarana Air Bersih di desa (pianisasi, dll)	Desa	1	Paket	Masyarakat		√	√					APBN/DDS	√		

32	Kawasan Permukiman	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Desa	1	Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√		APBN/DDS	√		
33		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban /MCK	Desa			Masyarakat	√	√	√	√	√	√		APBN/DDS	√		
34		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah dan insentif petugas sampah	Desa	9	Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√		APBN/DDS	√		
35	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Hutan Milik Desa	Desa	1	paket	Masyarakat			√			√		APBN/DDS	√		
36		Pengelolaan/ konservasi Lingkungan Hidup Desa	Desa	1	paket	Masyarakat		√	√	√	√	√		APBN/DDS	√		
37		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Desa	1	paket	Masyarakat		√	√	√	√	√		APBN/DDS	√		
38	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	Desa	1	paket	Masyarakat		√				√		APBN/DDS	√		
39	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	Desa	1	paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√		APBN/DDS	√		
40	Pariwisata	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Desa	1	paket	Masyarakat		√	√					APBN/DDS	√		
Jumlah Per Bidang II														-			

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	2019				2020	2021	2022	2023	2024	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama			
																Antar Desa	Pihak III		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	#	#	15	16	17	18	19	
KEMASYARAKATAN		1	Ketertarikan, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol di)	Desa	Ls	Linmas	√	√	√	√	√	√		APBD/ADD	√			
		2	Ketertarikan, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah	Desa	Ls	Linmas				√				APBD/ADD	√			
		3		Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa	Desa	Ls	Linmas	√	√	√	√	√	√		APBD/ADD	√			
		4		Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Desa	Ls	Masyarakat			√	√				APBD/ADD	√			
		5		Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat	Desa	Ls	Masyarakat	√	√	√	√	√	√		APBD/ADD	√			
		6		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	Desa	Ls	Masyarakat	√	√	√	√	√	√		APBD/ADD	√			
															APBD/ADD	√			
		7	Kebudayaan dan Keagamaan	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Desa	Ls	Sanggar Seni dan Budaya	√	√	√	√	√	√		APBD/ADD	√			
		8		Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Desa	Ls	Masyarakat	√	√	√	√	√	√		APBD/ADD	√			
	9	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa		Desa	Ls	Masyarakat	√	√	√	√	√	√		APBD/ADD	√				

3	PEMBINAAN KEM	10	Kebudayaan dan Keagamaan	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	Desa	Ls	Masyarakat	√								APBD/ADD	√				
		11	Pemuda dan Olah Raga	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Desa	Ls	Pemuda	√	√	√	√	√	√				APBD/ADD	√			
		12		Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa	Desa	Ls	Pemuda	√	√	√	√	√	√				APBD/ADD	√			
		13		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	Desa	Ls	Pemuda	√	√	√	√	√	√				APBD/ADD	√			
		14		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	Desa	Ls	Masyarakat	√	√	√	√	√	√				APBD/ADD	√			
		15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah	Desa	Ls	Masyarakat		√									APBD/ADD	√		
		16		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	Desa	Ls	Anak-anak Berbakat	√	√	√	√	√	√					APBD/ADD	√		
		17	Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan Lembaga Adat	Desa	Ls	Lembaga Adat	√	√	√	√	√	√				APBD/ADD	√			
		19		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa	Ls	LKMD, LPMD, LPM	√	√	√	√	√	√				APBD/ADD	√			
				Pembinaan PKK	Desa	Ls	Pengurus PKK	√	√	√	√	√	√				APBD/ADD	√			
		20		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa	Ls	Lembaga Kemasyarakatan lainnya	√	√	√	√	√	√				APBD/ADD	√			
		Jumlah Per Bidang III																-			

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan					Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	2019				2020	2021	2022	2023	2024	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama	
																Antar Desa	Pihak III
1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	15	16	17	18	19	

SYARAKAT	1	Kelautan dan Perikanan	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Nelayan(Nelayan Pancing, Nelayan Panah dan Nelayan Jaring)	Desa	Ls	Nelayan	√							APBN/DDS	√		
	2		Bantuan Perikanan (Pengadaan Saprass Perikanan)untuk Nelayan Pancing, Nelayan Panah dan Nelayan Jaring	Desa	Ls	Nelayan		√		√					APBN/DDS	√	
	3	n dan Peternakan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, Kacang, bawang	Desa	Ls	Petani	√	√	√	√	√	√		APBN/DDS	√		
	4		Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)	Desa	Ls	Peternak	√	√	√	√	√	√		APBN/DDS	√		

4	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Pemberdayaan Masyarakat	5	Pertanian	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Desa	Ls	Petani dan Peternak	√	√	√	√	√	√	√	APBN/DDS	√				
			6	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan kapasitas kepala Desa	Desa	Ls	Kepala Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	APBN/DDS	√			
			7		Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Desa	Ls	Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	APBN/DDS	√		
			8		Peningkatan kapasitas BPD	Desa	Ls	BPD	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
			9																		
			10	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa	Ls	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	APBN/DDS	√		
			11		Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa	Ls	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	APBN/DDS	√		
			12		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	Desa	Ls	Kaum Difabel		√		√		√				APBN/DDS	√		
			13	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	Desa	Ls	Pelaku UMKM		√		√		√				APBN/DDS	√		
	14	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	Desa		Ls	Pelaku UMKM		√		√		√				APBN/DDS	√				
	15	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	Desa		Ls	Pelaku Ekonomi Non Pertanian		√		√		√				APBN/DDS	√				
	16	Dukungan Penanaman Modal	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	Desa	Ls	BUMDES	√	√	√	√	√	√	√	√	√	APBN/DDS	√				
	17		Penyertaan Modal Bumdes	Desa	Ls	BUMDES	√	√	√	√	√	√	√	√	√	APBN/DDS	√				
	18		Pembangunan Gedung Bumdes	Desa	Ls	BUMDES			√	√						APBN/DDS	√				
	19	Perdagangan dan Perindustrian	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, perbengkelan dll) **	Desa	Ls	Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	√	√	√	√	√	√	√	√	√	APBN/DDS	√				
	Jumlah Per Bidang IV																-				
	JUMLAH TOTAL																-				

Mengetahui :
Kepala Desa

Lorulun, 2019
Disusun oleh:
Tim Penyelarasan RPJM Desa

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)

TAHUN : 2019

DESA : lorulun
 KECAMATAN : Wertamrianm
 KABUPATEN : Kepulauan Tanmbar
 PROVINSI : MALUKU

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan	
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasam a Antar	Kerjasam a Pihak		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.	Penghasilan dan tunjangan pemerintah Desa	Desa UHAK	14 org	pemdes	Jan-Des	234.440.000	ADD/PAD	√				
		b.	Operasional Pemerintah Desa (ATK & Biaya Ranan)	Desa UHAK	1 tahun	pemdes	Jan-Des	142.729.994	ADD	√				
		c.	Operasional BPD	Desa UHAK	9 orang	BPD	Jan-Des	13.565.402	ADD	√				
		d.	Musyawarah Desa	Desa UHAK	1 tahun	BPD	Jan-Des	3.970.000	ADD	√				
		e.	Perencanaan Pembangunan Desa	Desa UHAK	1 bulan			5.000.000	DDS	√				
		f.	Pembayaran Insentif	Desa UHAK	1 tahun			1.200.000	DDS	√				
		g.												
		h.												
Jumlah Per Bidang 1								400.905.396		√				
2	Pembangunan Desa	a.	Pembangunan Gedung PAUD	Desa UHAK	1 Unit	Masyarakat		180.920.000	DD	√				
		b.	Renovasi Rumah Sehat Untuk Fakir Miskin	Desa UHAK	... unit	Masyarakat		208.105.000	DD	√				
		c.	Pembangunan Mess Desa	Desa UHAK	1 Unit	Masyarakat		200.575.000	DD	√				
		d.	Pembangunan Drainase	Desa UHAK M	Masyarakat		62.177.000	DD	√				
		e.												
								651.777.000						
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a.	Pembinaan PKK Desa	Desa UHAK	1 Paket	PKK		43.535.000	ADD	√				
		b.	Pembinaan PAUD (Intensif Guru PAUD)	Desa UHAK	1 Paket	PAUD		85.000.000	DD	√				
		c.	Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Desa UHAK	1 Paket	Pemuda/i		45.000.000		√				
		d.	Pembinaan Anak dan Remaja (keyboard/gitar)	Desa UHAK	1 Paket			95.870.000	DD	√				
		e.	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama (Bantuan ALKITAB)	Desa UHAK				1.000.000		√				
Jumlah Per Bidang 3								270.405.000						

4	Pemberdayaan Masyarakat	a.	Pemberdayaan Guru TK (Insentif)	Desa UHAK	1 Tahun	Guru TK		2.300.000	DDS/ADD				
		b.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Desa UHAK	1 Paket	Kelompok		50.000.000	ADD				
		c.	Pemberdayaan Posyandu	Desa UHAK	1 Tahun	Kader		12.000.000					
		d.	Pemberdayaan Usaha Kecil dan Rumahan					5.000.000					
		e.	Peningkatan kapasitas Masyarakat					7.000.000					
		f.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi					45.000.000					
Jumlah Per bidang 4								121.300.000					
5	Tak Terduga		Kejadian Luar Biasa					2.000.000					
Jumlah per Bidang 5													
JUMLAH TOTAL								1.444.387.396					

Lorulun,2019

Mengetahui :
KEPALA DESA

Disusun oleh:
Tim Penyusun RKP Desa

J. S. MOSES MAKESSO

MOSES SAMPONU



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
KECAMATAN WER TAMRIAN
DESA LORULUN

Jln. KOLSERAN NO 02

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa Di Desa Lorulun Kecamatan Wer Tamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku maka pada :

Hari dan Tanggal : Sabtu 13 Juli 2019
J a m : 19.30 wst
Tempat : Rumah Ibpk. M. SERMATAN (ketua RT 01)

Telah dilaksanakan kegiatan Pengkajian Keadaan Desa, yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, Kepala dusun, Warga Dusun, Tokoh Masyarakat dan unsur lainnya yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam proses pengkajian keadaan Desa tersebut adalah:

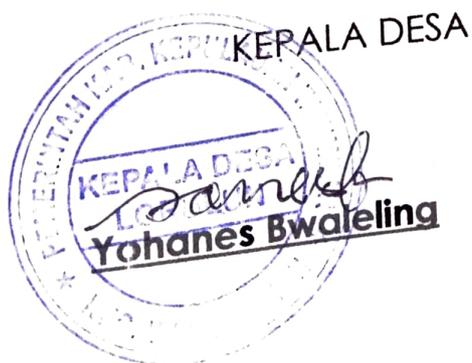
1. Penyesuaian Data Desa
2. Penggalan Gagasan Masyarakat menggunakan 3 alat kaji atau disesuaikan dengan kondisi desa
3. Penyusunan Laporan Hasil PKD

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lorulun,13 Juli.....2019

Mengetahui

Ketua Tim Penyusun RPJMDesa



Moses Samponu

**DAFTAR HADIR
PELAKSANAAN PENKAJIAN KEADAAN DESA**

Lorulun., 13 Juli... 2019

NO	NAMA	JENIS KEL (L/P)	JABATAN DALAM MASYARAKAT	PARAF
1.	BENEDEKTUS - LELANGLUAN	L		
2.	MARTINUS. SELMATAN	L	PNS	
3.	MLOWIRA - FADIRSYAIR	L	KET. RT. 001	
4.	ANTONIUS. SELMATAN	P	SEK RT 001	
5.	ANTONIA. MANDESSY	L	PETANI	
6.	UBERTUS - FADIRSYAIR	P	- II -	
7.	BERNANDETTA. MELSASAI	L	- II -	
8.	PIUS. LAMAMASE	P	- II -	
9.	SISKA. FADIRSYAIR	L	- II -	
10.	BERNAR. FABUMASE	P	- II -	
11.	ANTONIUS. BULWADITY	L	- II -	
12.	KOSTAN. SASAKE	L	- II -	
13.	PIUS DASMASOLA	L		
14.	Martina Sakleresi	P		
15.	PATERNUS FADIRSYAIR	L		
16.	REKUS FADIRSYAIR	L		
17.	PIUS NUSMUSSE	L		
18.	MAGDALENA OHOIULUN	P		
19.	TIMOTIUS FABUMASE	L		
20.	MARLA Sanyakut	P		
21.	Datus fabumase	L		
22.	Rafela Melsasai	P		
23.	WENSES. FABUMASE	L		
24.	Yohanus lelangluan	L		
25.	Yohanis Batmomolin	L		
26.	YOHANA ANGWARMASE	P		
27.	ANTONIS SANGAJI	L		
28.	MOSES Fabumase	L		
29.	Angelina layan	P		



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
KECAMATAN WER TAMRIAN
DESA LORULUN

Jln. KOLSERAN NO 02

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa Di Desa Lorulun Kecamatan Wer Tamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku maka pada :

Hari dan Tanggal : Jumad 12 Juli 2014
Jam : 19.00 w.t
Tempat : Rumah Bpk. L. Baturaditi (ketua RT 02)

Telah dilaksanakan kegiatan Pengkajian Keadaan Desa, yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, Kepala dusun, Warga Dusun, Tokoh Masyarakat dan unsur lainnya yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam proses pengkajian keadaan Desa tersebut adalah:

1. Penyelarasan Data Desa
2. Penggalan Gagasan Masyarakat menggunakan 3 alat kaji atau disesuaikan dengan kondisi desa
3. Penyusunan Laporan Hasil PKD

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lorulun , ...12 Juli.....2019

Mengetahui

Ketua Tim Penyusun RPJMDesa

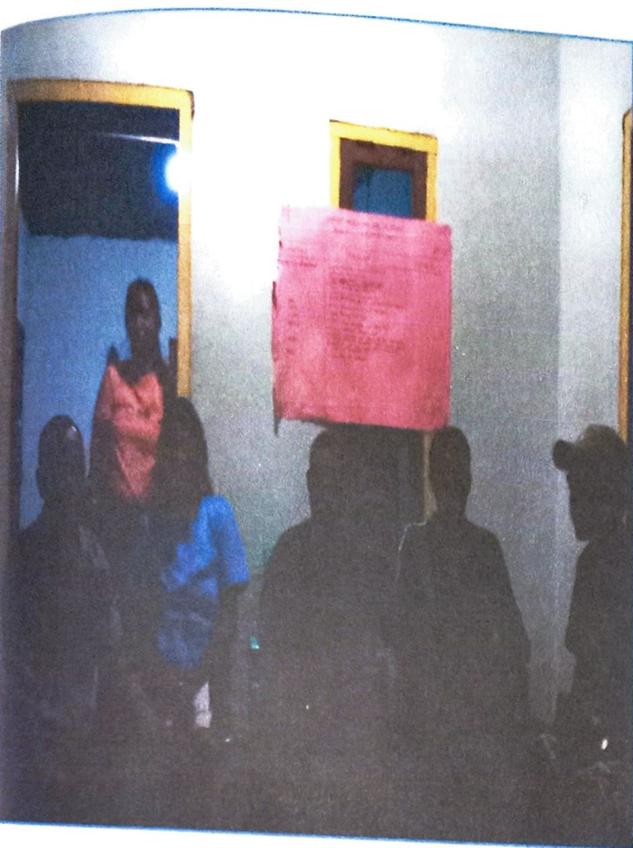



Moses Samponu

DAFTAR HADIR
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA
 Lorulun..12.juli....2019

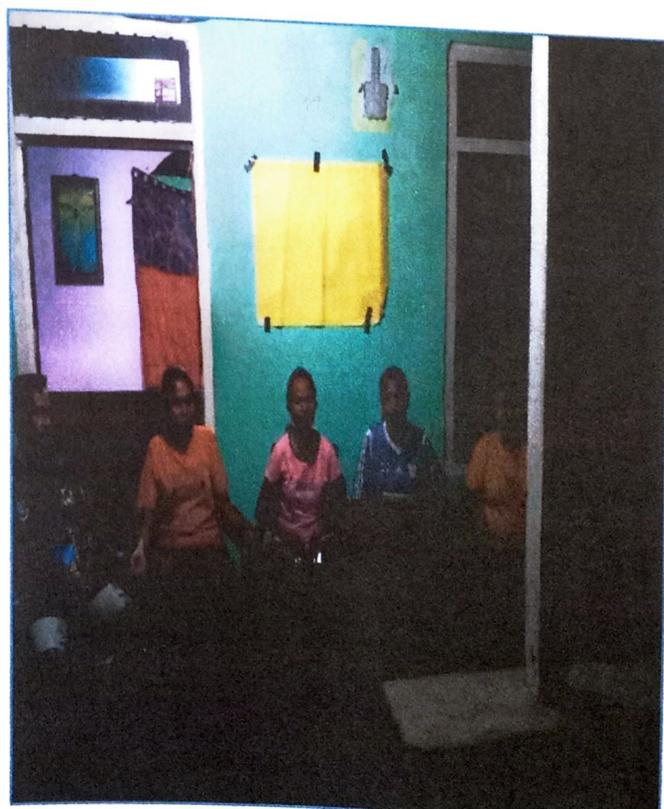
NO	NAMA	JENIS KEL (L/P)	JABATAN DALAM MASYARAKAT	PARAF
1.	PIUS. FALEM LEREBULAN	L	WKL. KOTA RT	
2.	YOSINA TALAKUA	P	MASYARAKAT	
3.	YUSTINA SAINYAKIT	P	MASYARAKAT	
4.	ALOSIUS FABUMASE	L	MASYARAKAT	
5.	DIDIMUS. LELANGLUAN	L	MASYARAKAT	
6.	CASPARINA OHOIRA	P	PNS	
7.	YULIA LEREBULAN	P	MASYARAKAT	
8.	MARIA SALMA LELANGLUAN	P	MASYARAKAT	
9.	VERONIKA NGILAMELE	P	MASYARAKAT	
10.	MAURSELINUS NUSMESE	L	MASYARAKAT	
11.	ESEKIEL RANGKOLI	L	MASYARAKAT	
12.	LIBERATUS BULURIDITY	L	KETUA RT. 02	
13.	PATERNUS RELSASAIL	L	masyarakat	
14.	WELELMINA LELANGLUAN	P	masyarakat	
15.	YULIANA YABARUMASE	P	MASYARAKAT	
16.	KAROL NUSMESA	L	Petani	
17.	LUKAS FABUMASE	L	Petani	
18.	TIRSA OWONDITY	P	- " -	
19.	PAUSTYUS FAIBUMASE	L	- " -	
20.	HERMAN JOSEPH LELANGLUAN	L	- " -	
21.	AGATHA SAINYAKIT	P	- " -	
22.	ABRAHAM SOLAR BESAIN	L	- " -	
23.	MARIA FABUMASE	P	- " -	
24.	LUSIA YABARUMASE	P	- " -	
25.	SILVESTER SOLAR BESAIN	L	- " -	
26.	KIKI R. DASMASELA	L	- " -	
27.	YOHANIS NUSMESA	L	- " -	
28.	JOSEPH NUSMESA	L	- " -	
29.	KORNELIA BATLAYECI	P	- " -	
30.	ENGELBERTA NEMERE	P	- " -	
31.	BRUNO LEREBULAN	L	- " -	
32.	MARSELINUS SERMATAN	L	- " -	
33.	EFRAIM SOLAR BESAIN	L	- " -	
34.	PETRUS NUSMESA	L	- " -	
35.	MARIA HURLATY	P	- " -	

DOKUMENTASI PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA (PKD) RT 001 dan RT 002



DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
BAGIAN KELEMBAGAAN RT 02

LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
RT/ RW	<ul style="list-style-type: none"> Kelembagaan RT/ RW belum optimal Adanya masalah lain yang belum terpecahkan RT/ RW belum memiliki sumber daya yang memadai Salah satu masalah yang dihadapi RT/ RW adalah belum adanya sumber daya yang memadai Kelembagaan RT/ RW belum optimal Kelembagaan RT/ RW belum optimal 	
PKK	<ul style="list-style-type: none"> Kelembagaan RT/ RW belum optimal Adanya masalah lain yang belum terpecahkan RT/ RW belum memiliki sumber daya yang memadai Salah satu masalah yang dihadapi RT/ RW adalah belum adanya sumber daya yang memadai Kelembagaan RT/ RW belum optimal Kelembagaan RT/ RW belum optimal 	
KEAS	<ul style="list-style-type: none"> Kelembagaan RT/ RW belum optimal Adanya masalah lain yang belum terpecahkan RT/ RW belum memiliki sumber daya yang memadai Salah satu masalah yang dihadapi RT/ RW adalah belum adanya sumber daya yang memadai Kelembagaan RT/ RW belum optimal Kelembagaan RT/ RW belum optimal 	
LEMB	<ul style="list-style-type: none"> Kelembagaan RT/ RW belum optimal Adanya masalah lain yang belum terpecahkan RT/ RW belum memiliki sumber daya yang memadai Salah satu masalah yang dihadapi RT/ RW adalah belum adanya sumber daya yang memadai Kelembagaan RT/ RW belum optimal Kelembagaan RT/ RW belum optimal 	
LINMAS	<ul style="list-style-type: none"> Kelembagaan RT/ RW belum optimal Adanya masalah lain yang belum terpecahkan RT/ RW belum memiliki sumber daya yang memadai Salah satu masalah yang dihadapi RT/ RW adalah belum adanya sumber daya yang memadai Kelembagaan RT/ RW belum optimal Kelembagaan RT/ RW belum optimal 	
PERMUDA	<ul style="list-style-type: none"> Kelembagaan RT/ RW belum optimal Adanya masalah lain yang belum terpecahkan RT/ RW belum memiliki sumber daya yang memadai Salah satu masalah yang dihadapi RT/ RW adalah belum adanya sumber daya yang memadai Kelembagaan RT/ RW belum optimal Kelembagaan RT/ RW belum optimal 	
PENGUSI	<ul style="list-style-type: none"> Kelembagaan RT/ RW belum optimal Adanya masalah lain yang belum terpecahkan RT/ RW belum memiliki sumber daya yang memadai Salah satu masalah yang dihadapi RT/ RW adalah belum adanya sumber daya yang memadai Kelembagaan RT/ RW belum optimal Kelembagaan RT/ RW belum optimal 	
BPD	<ul style="list-style-type: none"> Kelembagaan RT/ RW belum optimal Adanya masalah lain yang belum terpecahkan RT/ RW belum memiliki sumber daya yang memadai Salah satu masalah yang dihadapi RT/ RW adalah belum adanya sumber daya yang memadai Kelembagaan RT/ RW belum optimal Kelembagaan RT/ RW belum optimal 	





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
KECAMATAN WER TAMRIAN
DESA LORULUN

Jln. KOLSERAN NO 02

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa Di Desa Lorulun Kecamatan Wer Tamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku maka pada :

Hari dan Tanggal : Jumad 12 Juli 2019
J a m : 20.00. WIT
Tempat : Rumah Bpk. E. OHOIULUN

Telah dilaksanakan kegiatan Pengkajian Keadaan Desa, yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, Kepala dusun, Warga Dusun, Tokoh Masyarakat dan unsur lainnya yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam proses pengkajian keadaan Desa tersebut adalah:

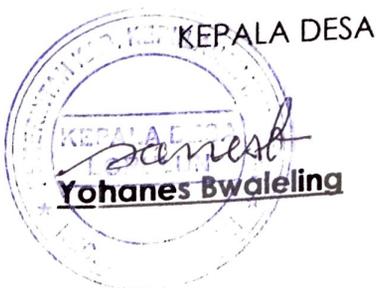
1. Penyelarasan Data Desa
2. Penggalan Gagasan Masyarakat menggunakan 3 alat kaji atau disesuaikan dengan kondisi desa
3. Penyusunan Laporan Hasil PKD

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lorulun , 12 Juli 2019

Mengetahui

Ketua Tim Penyusun RPJMDesa

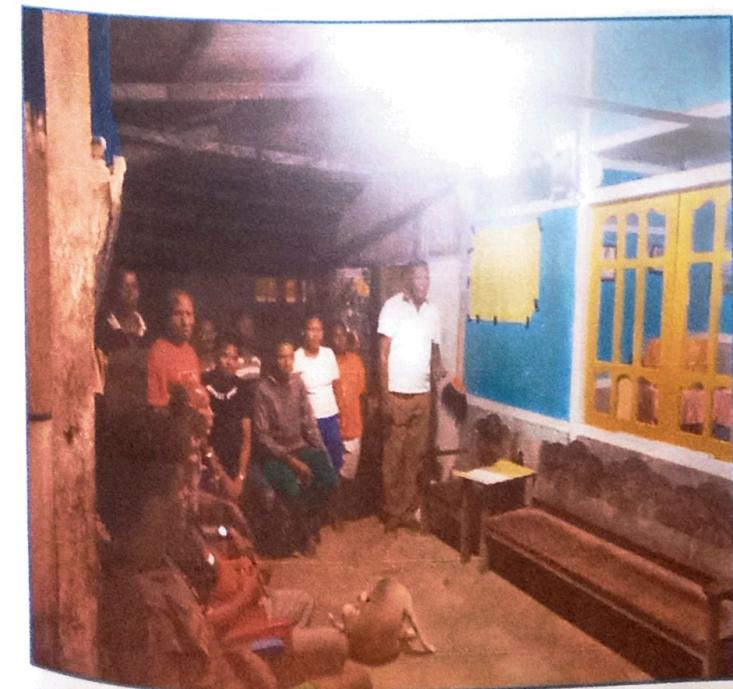
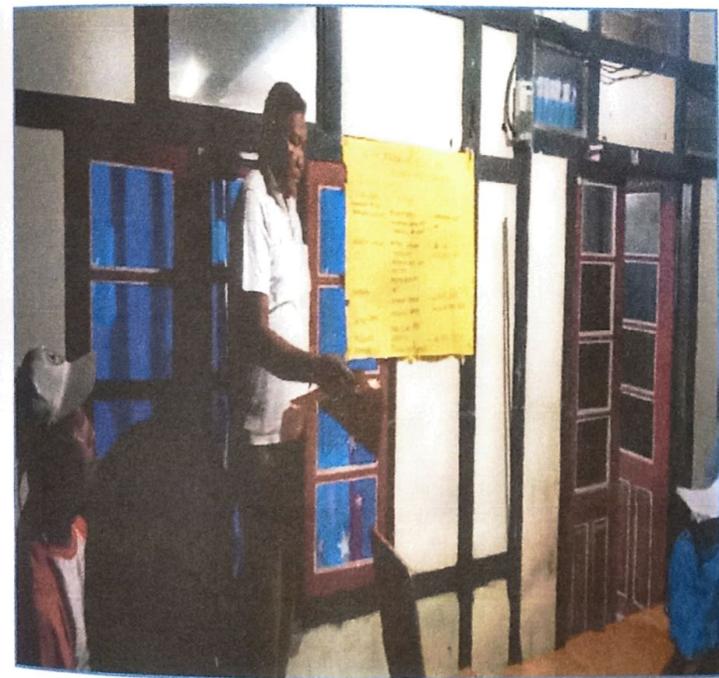


Yohanes Bwaleling

Moses Samponu

DAFTAR HADIR
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA
 Lorulun..17..Juli.....2019

NO	NAMA	JENIS KEL (L/P)	JABATAN DALAM MASYARAKAT	PARAF
1.	Fiator. Buarlele	Laki	KETUA RT 03	<i>[Signature]</i>
2.	Yohannis. Batbual	Laki	Masyarakat	<i>[Signature]</i>
3.	Dionisius. Batmanle	Laki	KOR. MASOA	<i>[Signature]</i>
4.	FRANSISKUS - LABOSAR.	-1-	MASYARAKAT	<i>[Signature]</i>
5.	ABEL. F BUARLELE.	Laki	MASYARAKAT	<i>[Signature]</i>
6.	IMA. BATMOMOLIN	PEREMPUAN	MASYARAKAT	<i>[Signature]</i>
7.	ROSA. YABARMASE	PEREMPUAN	-11-	<i>[Signature]</i>
8.	THERESIA - LABOSAR.	PEREMPUAN	-11-	<i>[Signature]</i>
9.	SEBASTIANA - BUARLELE	-11-	-11-	<i>[Signature]</i>
10.	ELISABET - BATBUAL	-11-	-11-	<i>[Signature]</i>
11.	ROMANA - BUARLELE.	-11-	-11-	<i>[Signature]</i>
12.	MARTA - SUARLIK.	PEREMPUAN	-11-	<i>[Signature]</i>
13.	PIA. NGILAMELE	PEREMPUAN	-11-	<i>[Signature]</i>
14.	MARIA - BATMOMOLIN.	-11-	-11-	<i>[Signature]</i>
15.	YULITA - BUARLELE	PEREMPUAN	-11-	<i>[Signature]</i>
16.	Veronika. Barito	-11-	-11-	<i>[Signature]</i>
17.	DONATUS FUCUDENBUN	L		
18.	EMANUEL AKIRAMANIB	L		
19.	ELASius Buarlele	L		
20.	Sebastiana Fabunase	P		
21.	Andreas Batmomolin	L		
22.	DOMINIKUS KORB	L		
23.	N BATMANLISI	P		
24.	A SARBUNAN	P		
25.	8 LAROTIRASE	P		
26.	Fiator Jabarmase	L		
27.	M Buarilalai	L		
28.	Tomas Ngilamele	L		
29.	G Labohar	L		
30.	Edoardus Utukanman			





**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
KECAMATAN WER TAMRIAN
DESA LORULUN**

Jln. KOLSERAN NO 02

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa Di Desa Lorulun Kecamatan Wer Tamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku maka pada :

Hari dan Tanggal : Sabtu 13 Juli 2019
Jam : 20.00 (jam 8 malam)
Tempat : rumah Bpk. J. Lorular

Telah dilaksanakan kegiatan Pengkajian Keadaan Desa, yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, Kepala dusun, Warga Dusun, Tokoh Masyarakat dan unsur lainnya yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam proses pengkajian keadaan Desa tersebut adalah:

1. Penyelarasan Data Desa
2. Penggalan Gagasan Masyarakat menggunakan 3 alat kaji atau disesuaikan dengan kondisi desa
3. Penyusunan Laporan Hasil PKD

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

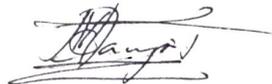
Lorulun , ...13 Juli.....2019

Mengetahui

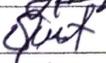
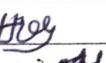
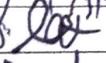
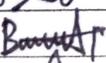
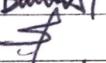
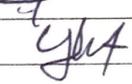
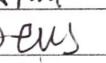
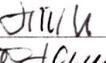
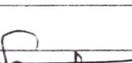
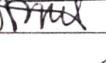
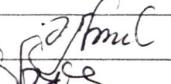
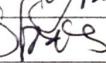
KEPALA DESA

Ketua Tim Penyusun RPJMDesa

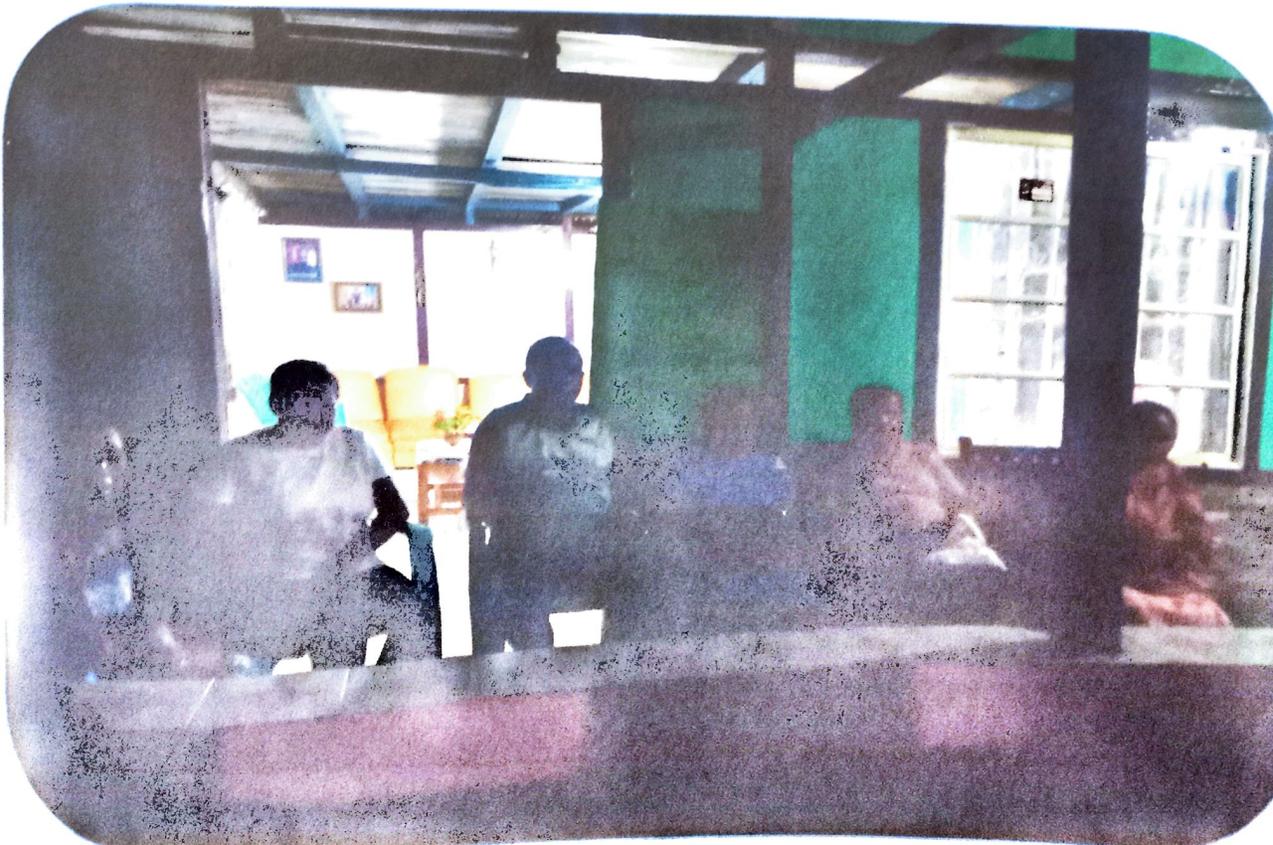

Yohanes Bwaleling
Yohanes Bwaleling


Moses Samponu

DAFTAR HADIR
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA
 Lorulun...13 Juli...2019

NO	NAMA	JENIS KEL (L/P)	JABATAN DALAM MASYARAKAT	PARAF
1.	Januunis Loudar.	L	Ketua RT 5	
2.	Ita Rumson	P	sekretaris RT 5.	
3.	Yohanis Lartutul	L	Sekuru	
4.	Petrouda Hurlatu	P	ketua dasawisma.	
5.	anus. Kabulan	L	Toko masyarakat	
6.	Flokan billo	P	— II —	
7.	Herwan J. Lartutul	L	lembaga adat.	
8.	Rino Lartutul	L	Toko Ramuda	
9.	Bani Seredity	L	ketua rukun.	
10.	YOSI UTUWALY.	P	Toko Ramuda	
11.	Yosep Suarliak	L	— II —	
12.	Tobias Sarbunan			
13.	yuliana Torontubun			
14.	Frissen Sarbunan.			
15.	Rius Sarbunan			
16.	Redomtoris Sampora			
17.	Victorus Seredity			
18.	Frans Lerschulan			
19.	DONATUS LUTURVALI			
20.	kornelus Rwar keleng			
21.	Basila SeREVITI			
22.	yakobus Loudar			
23.	yosep Suarliak			
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				

**DOKUMENTASI PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA
(PKD)
RT 005**





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
KECAMATAN WER TAMRIAN
DESA LORULUN

Jln. KOLSERAN NO 02

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa Di Desa Lorulun Kecamatan Wer Tamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku maka pada :

Hari dan Tanggal : Minggu 14 Juli 2019
Jam : 19.30 (Stengah telapani malan? wit
Tempat : Rumah Bpk. W. Mandessy

Telah dilaksanakan kegiatan Pengkajian Keadaan Desa, yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, Kepala dusun, Warga Dusun, Tokoh Masyarakat dan unsur lainnya yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam proses pengkajian keadaan Desa tersebut adalah:

1. Penyelarasan Data Desa
2. Penggalan Gagasan Masyarakat menggunakan 3 alat kaji atau disesuaikan dengan kondisi desa
3. Penyusunan Laporan Hasil PKD

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

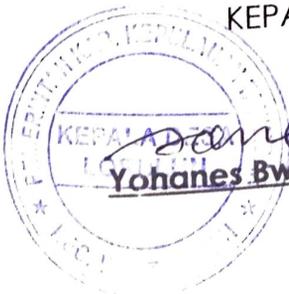
Lorulun,14 Juli.....2019

Mengetahui

Ketua Tim Penyusun RPJMDesa

Moses Samponu

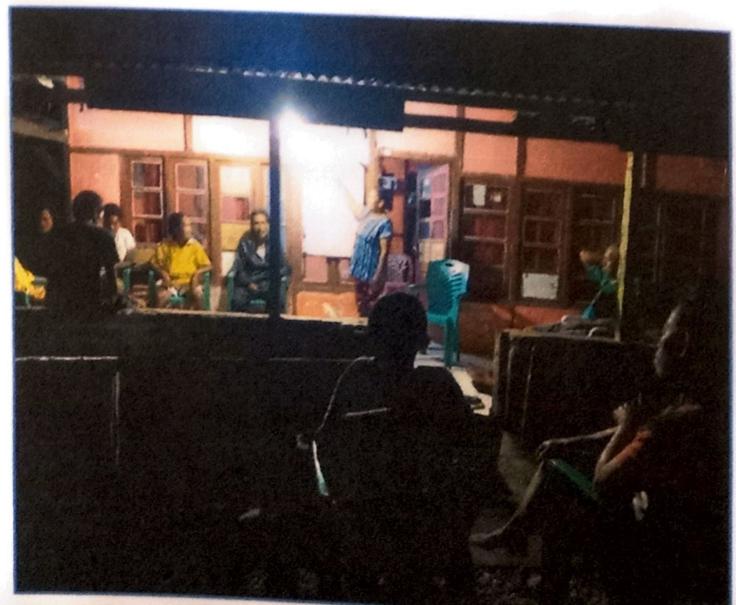
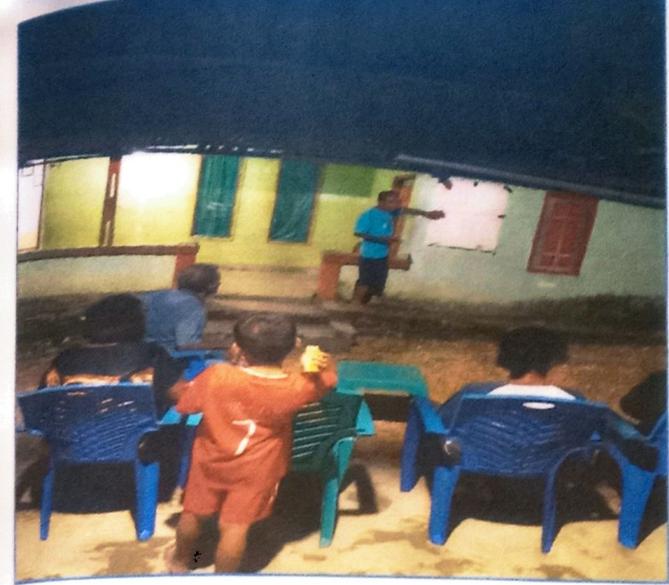
KEPALA DESA



Yohanes Bwaleling

DAFTAR HADIR
PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA
 Lorulun, 14 Juli 2019

NO	NAMA	JENIS KEL (L/P)	JABATAN DALAM MASYARAKAT	PARAF
1.	YULITA . RESILAY	P	KET. RT: 06	<i>[Signature]</i>
2.	YUSTINA . SAMANGUN	P	KET. LINMAS	<i>[Signature]</i>
3.	JANUARIS TITIRLOLOBY	L	MASYARAKAT	<i>[Signature]</i>
4.	KATARINA . SAMANGUN	P	— " —	<i>[Signature]</i>
5.	EDOARDUS MANDESSY	L	— " —	<i>[Signature]</i>
6.	MIKHAEL MANDESSY	L	— " —	<i>[Signature]</i>
7.	SARLOTA . BORUTNABIAN	P	— " —	<i>[Signature]</i>
8.	DELANI BERTUS TITIRLOLOBI	L	— " —	<i>[Signature]</i>
9.	YAKRITANUS . MANDESSY	L	— " —	<i>[Signature]</i>
10.	FLORUS . TITIRLOLOBI	L	— " —	<i>[Signature]</i>
11.	YASINTA . KASIHU	P	— " —	<i>[Signature]</i>
12.	PUT INMELDA . ELIAS	P	— " —	<i>[Signature]</i>
13.	MARTAFINA . MANDESSY	P	MASYARAKAT	<i>[Signature]</i>
14.	ASELA . LONDAR	P	— " —	<i>[Signature]</i>
15.	MIKHAEL . KUNRE	L	— " —	<i>[Signature]</i>
16.	DEFOTA . LAMERE	P	— " —	<i>[Signature]</i>
17.	YOHANA . RUMORAK	P	SEK. RT. 06	<i>[Signature]</i>
18.	JUSTUS . HURLATU	L	BB Petani	<i>[Signature]</i>
19.	YULIUS . KORPAU	L	LINMAS	<i>[Signature]</i>
20.	EDITA . SARBUNA	P	MASYARAKAT	<i>[Signature]</i>
21.	LEONARDA . MUSMERE	P	— " —	<i>[Signature]</i>
22.	MARIA . LAIKER	P	— " —	<i>[Signature]</i>
23.	ETUS - TITIRLOLOBI	L	— " —	<i>[Signature]</i>
24.	PATRISUS . BILLE	L	— " —	<i>[Signature]</i>
25.	LASA . REWENTASE	L	— " —	<i>[Signature]</i>
26.	HENI - SOMARWANE	P	— " —	<i>[Signature]</i>
27.	GITA . MANDESSY	P	— " —	<i>[Signature]</i>
28.	AGUSTINUS . BILLE	L	kaur umum	<i>[Signature]</i>
29.	Hery Korpau	L		<i>[Signature]</i>





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
KECAMATAN WER TAMRIAN
DESA LORULUN

Jln. KOLSERAN NO 02

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa Di Desa Lorulun Kecamatan Wer Tamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku maka pada :

Hari dan Tanggal : Minggu 14 Juli 2019
J a m : 19.30. (stengah delapan malam)
Tempat : rumah Bayali stepanus kempau

Telah dilaksanakan kegiatan Pengkajian Keadaan Desa,yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok,Kepala dusun,Warga Dusun,Tokoh Masyarakat dan unsur lainnya yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam proses pengkajian keadaan Desa tersebut adalah:

1. Penyelarasan Data Desa
2. Penggalan Gagasan Masyarakat menggunakan 3 alat kaji atau disesuaikan dengan kondisi desa
3. Penyusunan Laporan Hasil PKD

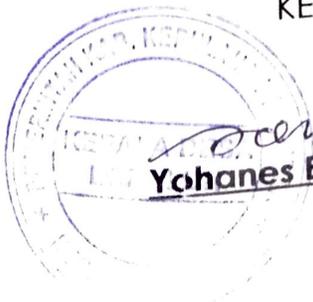
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lorulun ,14 Juli.....2019

Mengetahui

Ketua Tim Penyusun RPJMDesa

KEPALA DESA

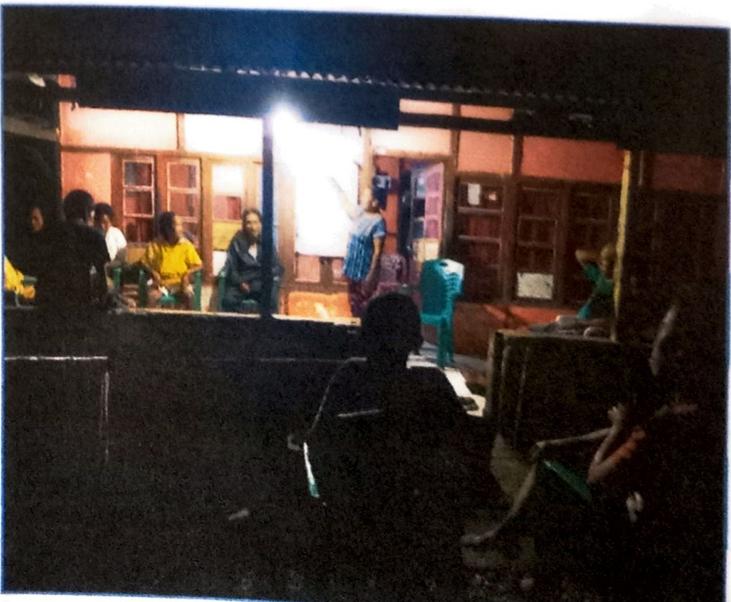
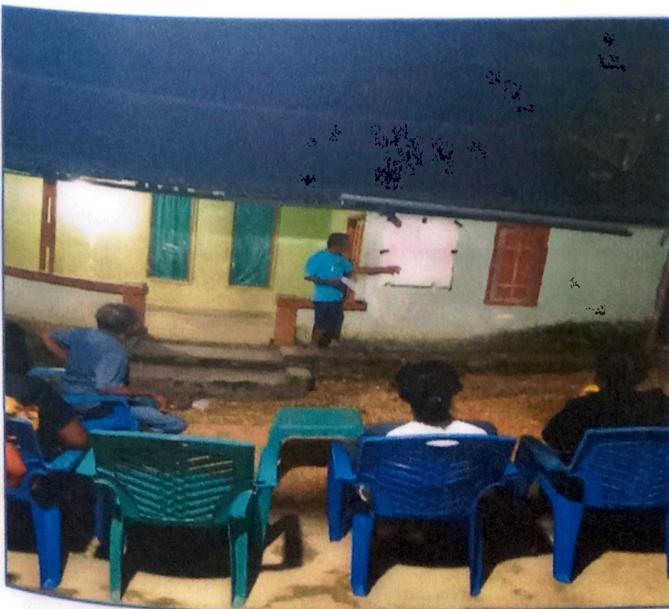
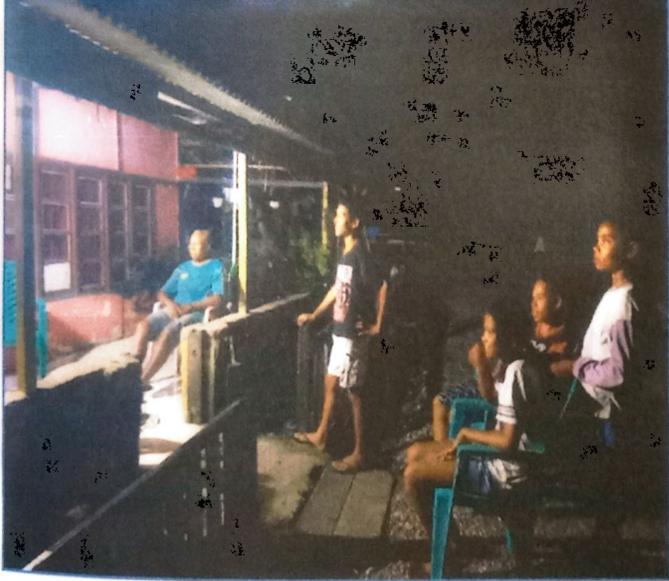


Yohanes Bwaleling
Yohanes Bwaleling

Moses Samponu

DAFTAR HADIR
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA
 Lorulun,.....4. Juli.....2019

NO	NAMA	JENIS KEL (L/P)	JABATAN DALAM MASYARAKAT	PARAF
1.	SALFA. PRAWIRTA	L		
2.	Maria, Sainyakit	P	Petani	
3.	Bernardus Mandes	L	— " —	
4.	Mateus. Kelbala	L	TOKO masyarakat	
5.	Yosep. Sainyakit	L	Petani	
6.	TH. Mandessy.	L	— " —	
7.	T. Mandessy.	L	— " —	
8.	Krespy. Mandes..	L	— " —	
9.	ANAS. Mandes.	P	— " —	
10.	MARIA-T. KOMPALL.	P	— " —	
11.	Dati. BILLE.	L	— " —	
12.	Rosa. Batlayeri.	P	— " —	
13.	IGNA. BATLAYERI	L	— " —	
14.	Landelinus mandessy	L	— " —	
15.	carolina garbunan	P	— " —	
16.	rofina taxndara	P	— " —	
17.	yohannis mandessy	L	— " —	
18.	AMBRO. MANDESS.	L	— " —	
19.	WELMINE. RATUANIK	P	— " —	
20.	Alo. SAKLIRESSY.	L	— " —	
21.	YUDIT. SARBUNAN.	P	— " —	
22.	STAN. SAINYAKIT.	L	— " —	
23.	EDELINA KOMPAN.	P	— " —	
24.	SEPTER. BATKUMDA.	L	— " —	
25.	KATHANUS. MANDESSY.	L	— " —	
26.	WALBURGA. Mandessy.	P	— " —	
27.	JOSEFINA Mandessy.	P	— " —	
28.	Juliana. Sainyakit	P	— " —	
29.	Hery Korpau	L	Kaur Umum	





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
KECAMATAN WER TAMRIAN
DESA LORULUN

Jln. KOLSERAN NO 02

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa Di Desa Lorulun Kecamatan Wer Tamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku maka pada :

Hari dan Tanggal : Jurnad 12 juli 2019
 Jam : 20.30 wil
 Tempat : rumah Bpk. B. Suariale (ketua RT 08)

Telah dilaksanakan kegiatan Pengkajian Keadaan Desa, yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, Kepala dusun, Warga Dusun, Tokoh Masyarakat dan unsur lainnya yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam proses pengkajian keadaan Desa tersebut adalah:

1. Penyelarasan Data Desa
2. Penggalan Gagasan Masyarakat menggunakan 3 alat kaji atau disesuaikan dengan kondisi desa
3. Penyusunan Laporan Hasil PKD

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lorulun, ...12 juli.....2019

Mengetahui
 Ketua Tim Penyusun RPJMDesa

Moses Samponu

KEPALA DESA

Yohanes Bwaleling

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJMDes, Desa Ilwaki Kabupaten Maluku Barat Daya, Propinsi Maluku Desa Ilwaki pada :

Hari dan Tanggal : *Jumad 12 Juli 2019*
Jam : *Jam 20.15 WIT*
Tempat : *Rumah Bpk B. Kelbulan (kelua RT 09)*

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desayang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan di dalam proses pengkajian keadaan Desa tersebut adalah :

1. Penyelrasan Data Desa
2. Penggalian Gagsan Masyarakat menggunakan tiga alat kaji atau disesuaikan dengan kondisi Desa
3. Penusunan Laporan Hasil PKD

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lorulun, *12 Juli* 2019

Mengetahui,

Ketua Tim Penyusun RPJMDes



MOSES SAMPONU

Kepala Desa Lorulun



PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Lorulun, 17. Juli. 2019

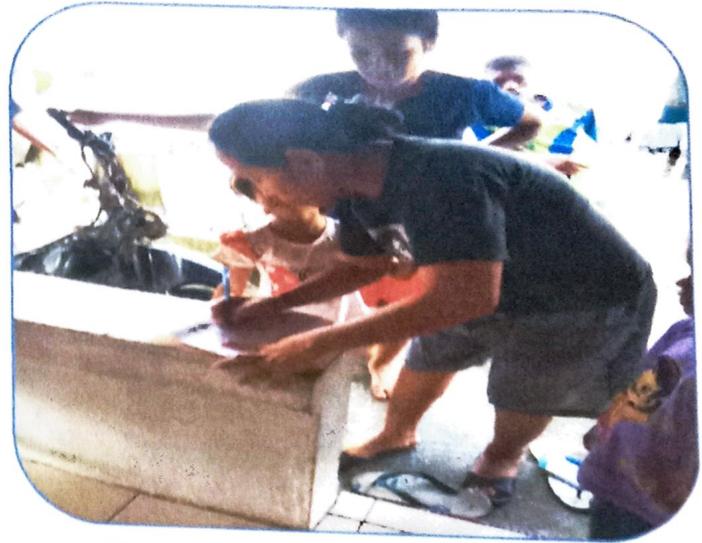
NO	NAMA	JENIS KEL (L/P)	JABATAN DALAM MASYARAKAT	PARAF
1.	SINTIA AKYUWEN	P	Masyarakat	
2.	MARIA YELUYAMAN	P	Masyarakat	
3.	MARHA BARITO	P	Masyarakat	
4.	FRANSISKA - LUTURYALI	P	Masyarakat	
5.	YOSEPHA - Kelbulan	P	Masyarakat	
6.	ROSALYA - mandessy	P	Masyarakat	
7.	HERDIKA - KORPAU	P	Masyarakat	
8.	YOSEFINA. Sainyakit	P	Masyarakat	
9.	MARIA Onyaresepan	P	Masyarakat	
10.	Melania Sarpumpwain	P	Masyarakat	
11.	Berlinda Buarlele	P	Masyarakat	
12.	Endika Buarlele	P	Masyarakat	
13.	Margareta. Lartutul	P	Masyarakat	
14.	Paulus Deke Kelbulan	L	-ll-	
15.	Petrus Batlyel	L	-ll-	
16.	R. SAMPONU	L	-ll-	
17.	Maria Yeuayanar	L	-ll-	
18.	Herdikus Suarliak	L	-ll-	
19.	Patrisius Londer	L	-ll-	
20.	Tomas Sainyakit	L	-ll-	
21.	Celias Carbulan	L	-ll-	
22.	H. Y. kelbulan	L	-ll-	
23.	S. Bwarkeling	L	-ll-	
24.	Yulius Bwarkeling	P	-ll-	
25.	M. Solarbeain	P	-ll-	
26.	P. Labobar	P	-ll-	
27.	H. Buarlele	L	Ketua RT 09	
28.	B. Kelbulan	L		
29.	Markus Baryledi	L		



DAFTAR HADIR
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA
 Lorulun, ... 12 Juli ... 2019

NO	NAMA	JENIS KEL (L/P)	JABATAN DALAM MASYARAKAT	PARAF
1.	FELISITAS SAIKMAT	P	MASYARAKAT	<i>[Signature]</i>
2.	LOISA BELWASIN	P	MASYARAKAT	<i>[Signature]</i>
3.	MARIA LIBURSI-RAN	P	MASYARAKAT	<i>[Signature]</i>
4.	BALBINA MASRTI	P	MASYARAKAT	<i>[Signature]</i>
5.	PAULA TOMMUBUN	P	MASYARAKAT	<i>[Signature]</i>
6.	YOHANA FABUMASE	P	MASYARAKAT	<i>[Signature]</i>
7.	MARIA SUARLI AK	P	MASYARAKAT	<i>[Signature]</i>
8.	Wilhelmina KELBULAN	P	TANI	<i>[Signature]</i>
9.	SISLI KAWIARNIDIN	P	TANI	<i>[Signature]</i>
10.	Rosalia Rengengulu	P	TANI	<i>[Signature]</i>
11.	Regina Suarliak	P	PNS	<i>[Signature]</i>
12.	Cresensia Fabumase	P	PETANI	<i>[Signature]</i>
13.	Rosalia Suarliak	P	PETANI	<i>[Signature]</i>
14.	Paulina ngilamele	P	PETANI	<i>[Signature]</i>
15.	Damasena melsadalim	P	PETANI	<i>[Signature]</i>
16.	Hilaria kelbulan	P	PETANI	<i>[Signature]</i>
17.	Casparina Batyetal	P	PETANI	<i>[Signature]</i>
18.	Norberta Barito	P	MASYARAKAT	<i>[Signature]</i>
19.	Ricordina ngilamel	P	PETANI	<i>[Signature]</i>
20.	Maria S Cartutul	P	PETANI	<i>[Signature]</i>
21.	Didima mitakda	P	PETANI	<i>[Signature]</i>
22.	Florentina Samangun	P	PETANI	<i>[Signature]</i>
23.	Salome Hurlatu	P	PETANI	<i>[Signature]</i>
24.	maria Samangun	P	PETANI	<i>[Signature]</i>
25.	Godelifa Saklirisi	P	PETANI	<i>[Signature]</i>
26.	Elisabeth Hurlatu	P	PENSIUN TANI	<i>[Signature]</i>
27.	marice Leki	P	PENSIUN	<i>[Signature]</i>
28.	ODILIA Batlayeri	P	PENGUSANA	<i>[Signature]</i>
29.	Waina	P		

**DOKUMENTASI PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA
(PKD)
RT 008 dan RT 009**





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
KECAMATAN WER TAMRIAN
DESA LORULUN
Jln. KOLSERAN NO 02

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa Di Desa Lorulun Kecamatan Wer Tamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku maka pada :

Hari dan Tanggal : Minggu 14 Juli
J a m : 19.30 w i T
Tempat : Rumah Bpk. Y. Yabarrase

Telah dilaksanakan kegiatan Pengkajian Keadaan Desa,yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok,Kepala dusun,Warga Dusun,Tokoh Masyarakat dan unsur lainnya yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam proses pengkajian keadaan Desa tersebut adalah:

1. Penyelarasan Data Desa
2. Penggalan Gagasan Masyarakat menggunakan 3 alat kaji atau disesuaikan dengan kondisi desa
3. Penyusunan Laporan Hasil PKD

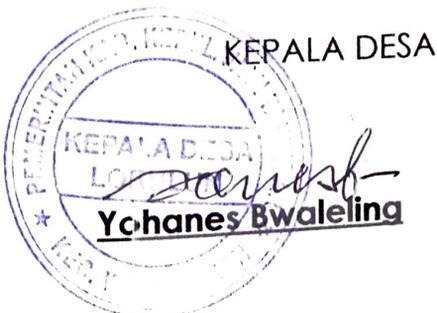
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lorulun ,14 Juli.....2019

Mengetahui

Ketua Tim Penyusun RPJMDesa

Moses Samponu



DAFTAR HADIR
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA
 Lorulun, ... 14 Juli ... 2019

NO	NAMA	JENIS KEL (L/P)	JABATAN DALAM MASYARAKAT	PARAF
1.	JUSTINUS YABARMASE	L		
2.	ROFINUS BARITO	L		
3.	AGAPITUS SUARLIAK	L		
4.	ELESEUS BWARLELING	L		
5.	SILFESTER SUARLIAK	L		
6.	YOSEP YABARMASE	L		
7.	ROSA SUARLIAK	P		
8.	SOFIA SOLARBESAIN	P		
9.	PETRA LABOBAR	P		
10.	SALDIN SARUDIN	L		
11.	ANGGELA YABARMASE	P		
12.	PETRUS SUARLIAK	L		
13.	YULI LAIJAN	P		
14.	ADE YAKIKRESI	L		
15.	TEU YAKIKRESI	L		
16.	KORNELIS SUARLIAK	L		
17.	SILVESTER BWARLELING			
18.	KAROLUS YABARMASE			
19.	MARBUS YABARMASE			
20.	Gamilian Bwarnilalai			
21.	YOSEP Baitm. anlusi			
22.	EDELBERTUS BARITO			
23.	Firminus Torimbun			
24.	Kostantinus Nalainkele			
25.	SALFINUS FAKUNKISE			
26.	VANES TERLIR			
27.	PETRUS SUARLIAK			
28.	PAU. batyel			
29.	Leontinus Ngilamele			

**DOKUMENTASI PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA
(PKD)
RT 003 dan RT 004**

